



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia



SERI-A FoLU Net Sink 2030  
Nomor: A-10/Renja-KalTeng/09/2022

# RENCANA KERJA

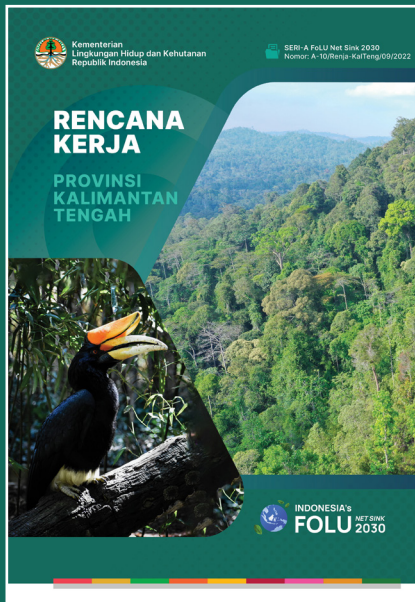
PROVINSI  
KALIMANTAN  
TENGAH



INDONESIA's  
**FOLU** NET SINK  
2030



# RENCANA KERJA SUB NASIONAL INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030



## PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### Keterangan Gambar Sampul:

1. Hutan Lindung Kalimantan
2. Burung Rangkong Badak

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

### Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

### ISBN:

XXX - XXXX - XXX - XX

### EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar, Sugianto Sabran.

### REVIEWERS:

Satyawan Pudyatmoko, Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto, Nuryakin.

### ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Noviar, Hero Marhaento, Johanna M. Rotinsulu, Mariaty.

### CONTRIBUTORS OF MOEF:

Istanto, Helmi Basalamah, Wiratno, M.R Karliansyah, Emma Rachmawaty, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Kepala BPHP Wil. X Palangkaraya, Kepala BPKH Wil. XXI Palangkaraya, Kepala Balai KSDA Kalteng, Kepala Balai PPI dan Karhutla Wil. Kalimantan, Kepala Balai PSKL Wil. Kalimantan, Kepala Balai PDASHL Kahayan Kalteng, Kepala Balai Gakkum Wil. Kalimantan, Kepala TN Sebangau Prov. Kalteng, Kepala TN Tanjung Putting Prov. Kalteng, Kepala Seksi Wil. I Balai Gakkum Wil. Kalimantan.

### CONTRIBUTORS OF PROVINCE KALIMANTAN TENGAH:

Agustan Saining (Kepala Dinas LHK Prov. Kalteng), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng, Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalteng, Kepala Bappeda Prov. Kalteng, Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalteng, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Prov. Kalteng, Dekan Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan UPR, Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Program Studi Kehutanan UMPR, Kepala UPT KPHL Gerbang Baito, Kepala UPT KPHL Kapuas Kahayang, Kepala UPT KPHP Barito Hilir, Kepala UPT KPHP Barito Hulu, Kepala UPT KPHP Barito Tengah, Kepala UPT KPHP Kahayan Hilir, Kepala UPT KPHP Kahayan Hulu, Kepala UPT KPHP Kahayan Tengah, Kepala UPT KPHP Kapuas Hulu, Kepala UPT KPHP Kapuas Tengah, Kepala UPT KPHP Katingan Hilir, Kepala UPT KPHP Katingan Hulu, Kepala UPT KPHP Kotawaringin Barat, Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu, Kepala UPT KPHP Mentaya Tengah, Kepala UPT KPHP Murung Raya, Kepala UPT KPHP Seruyan Hulu, Kepala UPT KPHP Sukamara-Lamandau, Ketua Forum DAS Kalteng, Ketua Pokja Perhutanan Sosial Prov. Kalteng.

### FACILITATORS:

Merry Magdalena Yembise, Dwi Hadi Soesanto, Nurlela Komalasari, Hasnawati Hamzah, Romilla Sari, Agung Bayu Nalendro, Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Danny Armando Wikongko, Claudia Meitriwane Silalahi, Muldalyanto, Widiati Agustina, Fadel Ibnu Perdana.



## Kata Pengantar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Hutan merupakan kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi kita dari kekeringan, panas ekstrem, dan banjir yang disebabkan oleh kerusakan iklim. Untuk itu, perlindungan yang lebih baik, dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif.



Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia dalam penurunan gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menegaskan menegaskan komitmennya kepada dunia melalui penyampaian *Enhanced NDC* kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi dari 29% di first NDC dan *updated NDC* meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. *Enhanced NDC* ini adalah transisi menuju *Second NDC* yang akan diselaraskan dengan *Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050* dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

Skenario LCCP ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan FOLU Indonesia 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO<sub>2</sub>e atau setara dengan 1,6 ton CO<sub>2</sub>e per kapita.

Guna mendukung target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Kebijakan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/ 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Di dalam Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, lokus spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan dan program, kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Dalam menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim serta untuk pencapaian target NDC serta mendukung Net Zero Emission, Pemerintah RI telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK termasuk mengeluarkan pengaturan terkait *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menjabarkan target-target Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* agar dapat diimplementasikan pada tingkat tapak telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional yang mendetailkan target-target aksi mitigasi Rencana Kerja bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi di tingkat Provinsi dengan memperhatikan landscape dan karakteristik wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah beserta Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* atas ditetapkannya Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhir kata, semoga upaya dan kerja nyata semua pihak bermanfaat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.**



## Pengantar Gubernur



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Fenomena perubahan iklim merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius karena dampaknya yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia di masa mendatang. Naiknya suhu rata-rata dunia akibat pemanasan global merupakan penyebab utama munculnya cuaca ekstrem yang saat ini semakin sering kita rasakan. Misalnya saja, dalam 5 tahun terakhir kita mengalami musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan penurunan produksi pertanian, kebakaran hutan dan lahan, dan di tahun berikutnya kita mengalami musim hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mengakibatkan banjir dimana mana. Dampak perubahan iklim sangat berpengaruh ke berbagai sektor dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung berbagai upaya mitigasi dampak perubahan iklim, termasuk untuk turut mensukseskan pencapaian target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Persetujuan Paris. Sebagai salah satu provinsi dengan tutupan hutan terluas di Indonesia, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dalam tata kelola kehutanan untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional sebesar -140 juta ton C<sub>he</sub> dari sektor FOLU (Forestry and Other Land Uses) pada tahun 2030.

Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah ini mencakup lima aksi mitigasi utama pada sektor FOLU yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2023 - 2030 yaitu: 1) Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, 2) Pembangunan Hutan Tanaman: Penanaman di PBPH-HT, 3) Sustainable Forest Management, 4) Rehabilitasi Hutan, dan 5) Pengelolaan Ekosistem Gambut. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pengelolaan hutan rendah karbon.

Akhir kata, saya mewakili seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah berharap bahwa segala upaya dalam mitigasi perubahan iklim akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bencana alam di masa mendatang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palangka Raya, Desember 2022  
Gubernur Kalimantan Tengah  
  
**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**Nomor 188.44/302/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA KERJA**

***INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030***

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, untuk pengendalian perubahan iklim telah ditetapkan antara lain kebijakan dan sasaran kerja yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara luas;



- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.181/MENLHK/PKTL/PLA.0/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 Hal Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 (Sub Nasional) Wilayah Provinsi, perlu dilakukan penyusunan rencana kerja *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah. Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

-2-

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

-3-

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 Indonesia's* Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Tenaga Ahli dan Anggota/Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 (dua) yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan sesuai dengan Rencana Operasional Nasional;
  - b. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas tim; dan
  - c. memimpin pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 (dua) yaitu:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan penyusunan sesuai dengan Rencana Operasional Nasional;
  - b. membantu Ketua melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas tim; dan



- c. memimpin pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Tengah apabila Ketua berhalangan.

KELIMA : Tugas dan tanggung Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 (tiga) yaitu:

- a. melaksanakan arahan dari Ketua;
- b. menyiapkan data dan informasi terkait kegiatan;
- c. menyiapkan kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. melakukan penyiapan administrasi kegiatan.

KEENAM : Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli, dan Anggota/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 4 (empat) yaitu:

- a. menyiapkan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap instansi;
- b. menyusun Rencana Kerja *Indonesia's Forest Land Use* 2030 Provinsi Kalimantan Tengah sebagai satu kesatuan Tim; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua TIM.

-4-

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Kalimantan Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Agustus 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Jenderal KLHK RI.
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK RI.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

|          |                     |                                                                                                                                    |            |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LAMPIRAN | KEPUTUSAN<br>TENGAH | GUBERNUR                                                                                                                           | KALIMANTAN |
|          | NOMOR<br>TANGGAL    | 188.44/302/2022<br>30 Agustus 2022                                                                                                 |            |
|          | TENTANG             | Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja<br>Indonesia's <i>Forestry and Other Land Use Net Sink</i> 2030 Provinsi Kalimantan Tengah. |            |

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA**

**INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK 2030 ;  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- I Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- II Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah  
  
Wakil Ketua II : Kepala Kelompok Kerja Perencanaan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove BRGM
- III Sekretaris I : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah  
  
Sekretaris II : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya
- IV Tenaga Ahli :
  - 1. Dr. Hero Marhaento, S. Hut, M. Sc ( Universitas Gadjah Mada)
  - 2. Dr. Ir. Johana M. Rotinsulu, MP. ( Universitas Palangka Raya)
  - 3. Mariaty, S. Hut, MP ( Universitas Muhammadiyah Palangka Raya)

## V Anggota/Tim Pelaksana

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dekan Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Palangka Raya
10. Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Program Studi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
12. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan
14. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Kahayan
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung Barito
17. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kalimantan Tengah
18. Kepala Balai Taman Nasional Sebangau
19. Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting

20. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
21. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22. Kepala Seksi Wilayah I Palangka Raya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan
23. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito;
24. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kapuas-Kahayan;
25. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir;
26. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hulu;
27. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Tengah;
28. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kahayan Hilir;
29. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kahayan Hulu;
30. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kahayan Tengah;
31. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kapuas Hulu;
32. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kapuas Tengah;
33. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Katingan Hilir;
34. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Katingan Hulu;
35. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kotawaringin Barat;

36. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentaya Hulu – Seruyan Tengah;
37. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentaya Tengah – Seruyan Hilir;
38. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Murung Raya;
39. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Seruyan Hulu;
40. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sukamara - Lamandau.
41. Ketua Forum DAS Kalimantan Tengah
42. Ketua Pokja Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**





# Daftar Isi

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR GAMBAR

## DAFTAR LAMPIRAN

## BAB I | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan dan Sasaran

Dasar Hukum

Definisi

## BAB II. RENCANA KERJA TAHUNAN

*Driving Force*

*Pressure*

*State*

*Impact*

## BAB III. RENCANA OPERASIONAL AKSI MITIGASI SUB NASIONAL KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 - 2030

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral – RO1

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut – RO2

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pencegahan Deforestasi Konsesi – RO3

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pembangunan Hutan Tanaman – RO4

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pengayaan Hutan Alam (Enhanced natural  
regeneration, ENR)

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Penerapan RIL-C

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi –  
RO7

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi – RO8

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pengelolaan Tata Air Gambut Gambut – RO9

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Restorasi  
Gambut – RO10

Rencana Operasional (RO) Perlindungan Area  
Konservasi Tinggi – RO11

Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi  
Pengelolaan Mangrove – RO12

## BAB IV. KELEMBAGAAN PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemangku Kepentingan

Penguatan Peran dan Hubungan Antar Lembaga

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

## BAB V. PENDANAAN KEGIATAN

Kebutuhan Anggaran

Mekanisme Pendanaan

Sumber Pendanaa

## BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

## BAB VII. PENUTUP

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## Daftar Tabel

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TABEL 1.</b>  | Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah                                                                 |
| <b>TABEL 2.</b>  | Luas Deforestasi Bruto dan Netto Tahun 2011 – 2020                                                                           |
| <b>TABEL 3.</b>  | Luasan deforestasi per kabupaten/kota selama lima tahun                                                                      |
| <b>TABEL 4.</b>  | Data kejadian banjir dan warga terdampak berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah                                     |
| <b>TABEL 5.</b>  | Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah                                               |
| <b>TABEL 6.</b>  | Sebaran lokasi aksi mitigasi tiap Rencana Operasional (RO) berdasarkan status kawasan hutan                                  |
| <b>TABEL 7.</b>  | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi pada lahan mineral tidak terencana (a) dan yang terencana (b) |
| <b>TABEL 8.</b>  | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral                                                 |
| <b>TABEL 9.</b>  | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral                                                           |
| <b>TABEL 10.</b> | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi pada lahan gambut tidak terencana (a) dan yang terencana (b)  |
| <b>TABEL 11.</b> | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Gambut                                                             |
| <b>TABEL 12.</b> | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Gambut                                                                       |
| <b>TABEL 13.</b> | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi tidak terencana dan yang terencana pada lahan konsesi         |
| <b>TABEL 14.</b> | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Konsesi                                                         |
| <b>TABEL 15.</b> | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Di Konsesi                                                                   |
| <b>TABEL 16.</b> | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman                                                            |
| <b>TABEL 17.</b> | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman                                                                 |
| <b>TABEL 18.</b> | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman                                                                           |
| <b>TABEL 19.</b> | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Pengayaan Hutan Alam ( <i>Enhanced natural regeneration</i> , ENR)                   |
| <b>TABEL 20.</b> | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam                                                            |
| <b>TABEL 21.</b> | Tata Waktu Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam                                                                      |
| <b>TABEL 22.</b> | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Penerapan RIL-C                                                                      |
| <b>TABEL 23.</b> | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Penerapan RIL C                                                                           |
| <b>TABEL 24.</b> | Tata Waktu Aksi Mitigasi Penerapan RIL C                                                                                     |

- TABEL 25.** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi
- TABEL 26.** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi
- TABEL 27.** Tata Waktu Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi
- TABEL 28.** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon non-Rotasi
- TABEL 29.** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi
- TABEL 30.** Tata Waktu Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi
- TABEL 31.** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Pengelolaan tata air gambut
- TABEL 32.** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut
- TABEL 33.** Tata Waktu Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut
- TABEL 34.** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi restorasi gambut
- TABEL 35.** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut
- TABEL 36.** Tata Waktu Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut
- TABEL 37.** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Perlindungan Area Konservasi Tinggi
- TABEL 38.** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut
- TABEL 39.** Tata Waktu Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambu
- TABEL 40.** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pengelolaan mangrove
- TABEL 41.** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove
- TABEL 42.** Tata Waktu Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove
- TABEL 43.** Estimasi kebutuhan anggaran pada tiap rencana aksi mitigasi

## Daftar Gambar

- GAMBAR 1.** Kerangka Drivers, Pressures, State, Impact and Response (DPSIR) pada sektor FOLU di provinsi Kalimantan Tengah
- GAMBAR 2.** Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2021
- GAMBAR 3.** Pemanfaatan Lahan dan Hutan dan perizinan di Kalimantan Tengah
- GAMBAR 4.** Pemanfaatan lahan berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang di Kalimantan Tengah
- GAMBAR 5.** Luas perubahan tutupan hutan pada KHG selama 27 tahun
- GAMBAR 6.** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011 – 2020 Provinsi Kalimantan Tengah
- GAMBAR 7.** Sebaran luas pada tiap Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi di Provinsi Kalimantan Tengah
- GAMBAR 8.** Peta sebaran rencana aksi mitigasi di provinsi Kalimantan Tengah

## Daftar Lampiran

- LAMPIRAN 1.** Tabel perbandingan luasan indikatif pada dokumen RENOPS FOLUNETSINK 2030 dan hasil perbaikan sesuai rencana operasional aksi mitigasi di Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 2.** Tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi Indonesia's FOLUNETSINK 2030 berdasarkan wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 3.** Tabel Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berada pada areal aksi mitigasi rencana operasional
- LAMPIRAN 4.** Tabel sebaran Perhutanan Sosial pada areal rencana operasional aksi mitigasi FOLUNETSINK 2030 provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 5.** Peta RO1 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 6.** Peta RO2 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 7.** Peta RO3 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 8.** Peta RO4 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 9.** Peta RO5 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 10.** Peta RO6 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 11.** Peta RO7 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 12.** Peta RO8 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 13.** Peta RO9 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 14.** Peta RO10 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 15.** Peta RO11 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 16.** Peta RO12 Provinsi Kalimantan Tengah
- LAMPIRAN 17.** Peta sebaran RO1-RO12 Provinsi Kalimantan Tengah









# BAB 01



PENDAHULUAN



## BAB I | PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk turut menahan kenaikan suhu global. Komitmen ini diwujudkan melalui disahkannya rencana jangka panjang rendah emisi (*Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience - LTSLCCR*) 2050 yang menunjukkan ambisi Indonesia dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang akan mencapai tingkat emisi bersih sebesar

540 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6-ton CO<sub>2</sub>e per kapita. Untuk memenuhi target ambisius tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan target kontribusi nasional yang ditetapkan (*Nationally Determined Contribution*, NDC) yang diperbaharui setiap lima tahunan. NDC yang pertama ditetapkan pada tahun 2016, dan dokumen pembaruan NDC telah disusun pada tahun 2021. Dalam komitmen NDC tersebut, Indonesia menyampaikan target penurunan emisinya dalam skenario tanpa syarat yang dilakukan dengan upaya sendiri (*unconditional*; CM1) sebesar 29% dan target bersyarat yang membutuhkan dukungan internasional (*conditional*; CM2) sebesar 41% dibandingkan dengan *business as usual* (BAU) pada tahun 2030.

Sektor *Forest and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan memiliki peranan yang penting dalam usaha pencapaian NDC, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor yang sulit menurunkan emisinya terutama dari sektor energi. Sektor FOLU berkontribusi terhadap 17% dari 29% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM1, atau 24% dari 41% target penurunan emisi seluruh sektor dalam skenario CM2. Mengingat pentingnya kontribusi sektor FOLU pada upaya pencapaian target ambisiun nasional, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perlu dilakukan pendekatan karbon *Net Sink* pada sektor FOLU pada tahun 2030, yang kemudian dikenal sebagai program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (IFNET 2030).

FOLU Net Sink 2030 adalah skema aksi mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan tipe lahan lainnya, untuk mencapai tingkat serapan karbon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi karbon dari hutan dan tipe lahan lainnya pada tahun 2030. Proyeksi target FOLU Net Sink 2030 adalah angka Net Sink 140 juta ton CO<sub>2</sub>e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>e. Sebagai bentuk arahan untuk mencapai target tersebut, telah disusun Rencana Operasional (RENOPS) FOLU *Net Sink* 2030 sebagaimana termuat dalam SK Menteri LHK No.168/2022.

Dokumen RENOPS FOLU Net Sink 2030 berisi rencana kegiatan yang terdiri dari 11 rencana aksi mitigasi yang merupakan penjabaran dari 5 aksi mitigasi utama yang tercantum pada NDC dan telah diakselerasi dengan dokumen LTS- LCCR. Lima aksi mitigasi utama tersebut adalah: 1) Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, 2) Pembangunan Hutan Tanaman: Penanaman di PBPH-HT, 3) *Sustainable Forest Management*, 4) Rehabilitasi Hutan, dan 5) Pengelolaan Lahan Gambut. Sedangkan 11 rencana aksi mitigasi yang merupakan turunan dari

5 aksi mitigasi utama tersebut adalah: 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (*enhanced natural regeneration*, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut gambut, 10) restorasi gambut, dan 11) perlindungan area konservasi tinggi. Selain kesebelas rencana aksi mitigasi tersebut, terdapat tambahan aksi mitigasi untuk upaya pengelolaan mangrove.

Dokumen RENOPS FOLU *Net Sink* 2030 yang saat ini telah tersusun dapat menjadi acuan arah kebijakan bagi seluruh pihak yang berkepentingan pada sektor FOLU. Namun untuk dapat dilaksanakan secara efektif pada tingkat tapak, rencana aksi mitigasi pada dokumen RENOPS yang bersifat nasional perlu diperjelas pada tingkat sub-nasional atau provinsi.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tutupan hutan paling luas di Indonesia, memiliki peran penting dalam memenuhi target capaian pengurangan emisi nasional. Dengan tutupan hutan yang lebih dari 7 juta hektar atau hampir separuh dari luas wilayah provinsi Kalimantan Tengah, hutan di provinsi Kalimantan Tengah berpotensi untuk mendukung penyerapan karbon. Selain potensi hutan, provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki kawasan gambut yang cukup luas (sekitar 30% dari luas wilayah) yang menjadi tempat simpanan karbon (*carbon sink*). Simpanan karbon pada lahan gambut ini terus meningkat seiring penambahan ketebalan gambut yang diperkirakan mencapai 3 mm/tahun (Parish et al., 2008). Namun jika kondisi alami tersebut terganggu, misalnya terdrainasi, maka akan terjadi percepatan proses pelapukan (dekomposisi) dan kebakaran hutan dan lahan yang memicu terbentuknya gas rumah kaca (GRK) terutama gas CO<sub>2</sub>.

Sebagai salah satu provinsi dari 12 Provinsi yang dimandatkan melaksanakan kegiatan FOLU Net Sink hingga 2030, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan segala perangkat yang dimungkinkan untuk mensukseskan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia hingga mencapai -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030. Dokumen Rencana Kerja IFNET Sub Nasional Kalimantan Tengah ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari pemerintah provinsi untuk turut mensukseskan target ambisius nasional dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Tengah adalah:

1. Terbangunnya komitmen bersama antar para pihak berkepentingan pada sektor FOLU di provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung tercapainya Indonesia's FOLU Net Sink 2030;
2. Tersedianya rencana kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU pada tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang dapat menjadi acuan para pihak berkepentingan;
3. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan kegiatan bagi para pihak berkepentingan sektor FOLU di provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Tengah adalah mendukung tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030.

## 1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573));
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah; Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249)
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387).

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2002 Tahun 2002 Tentang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dan Kawasan Hutan.
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat
29. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/302/2022 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 Provinsi Kalimantan Tengah

#### 1.4 Definisi

Dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Tengah ini memuat beberapa istilah dengan bahasa asing. Untuk memudahkan memahami maksud dari istilah tersebut, berikut definisi dari berbagai istilah yang digunakan.

1. *Nationally Determined Contribution* (NDC) adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. LTS-LCCR adalah dokumen yang menyampaikan visi Indonesia dalam skenario yang lebih ambisius (*Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target*; LCCP) bahwa Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO<sub>2</sub>e atau setara 4,23-ton CO<sub>2</sub>e per kapita.
3. FOLU atau *Forestry and Other Land Use* adalah kategori sektor yang merupakan salah satu sumber emisi dan rosot GRK yang berasal dari dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NDC.
4. *Net zero emission* adalah sebuah kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga *net* emisi bernilai nol.
5. *Net Sink* adalah sebuah kondisi yang menggambarkan serapan GRK dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan, dimana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem menyimpan karbon memegang peranan yang penting dalam menyerap GRK.



6. FOLU *Net Sink* 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka *net sink* 140 juta ton CO<sub>2</sub>e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>e tersebut.
7. DPSIR adalah kependekan dari *Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*. DPSIR merupakan salah satu analisis yang dilakukan berdasarkan pada konsep rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan memahami faktor pemicu (*Driving force*), tekanan yang dihasilkan oleh faktor pemicu (*Pressure*), keadaan saat ini (*State*), dampak yang terjadi (*Impact*) dan respon yang diperlukan (*Response*).







# **BAB 02**



**DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

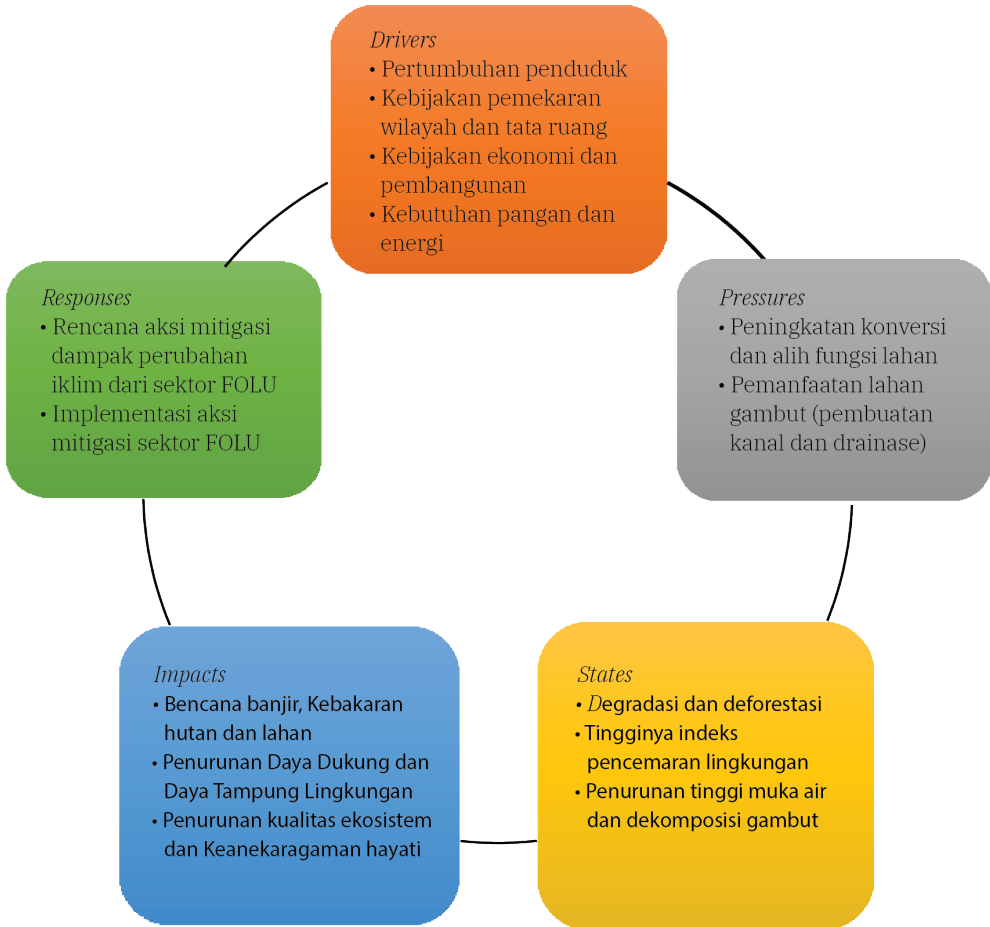
## BAB II | DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Deskripsi wilayah provinsi Kalimantan Tengah dalam kaitannya dengan pelaksanaan Indonesia's FOLU NET SINK 2030 (IFNET 2030) dijelaskan melalui metode DPSIR. DPSIR merupakan satu pendekatan yang dapat membantu untuk memberikan informasi mengenai faktor pemicu (*Driving force*), tekanan yang dihasilkan oleh faktor pemicu (*Pressure*), keadaan saat ini (*State*), dampak yang terjadi (*Impact*) dan respon yang diperlukan (*Response*). Secara terperinci, berikut penjelasan dari masing2 komponen dalam DPSIR.

1. ***Driving Force***, diartikan sebagai faktor pendorong atau pemicu yang menjelaskan terkait dengan isu atau permasalahan yang terjadi didalam suatu wilayah. Faktor pemicu ini mengarah pada berbagai aktivitas atau kegiatan manusia yang memberikan tekanan terhadap lingkungan atau hutan.
2. ***Pressure***, adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan isu atau permasalahan yang terjadi pada suatu wilayah. Secara sederhana pressure atau tekanan ini adalah hal hal yang terjadi akibat adanya suatu isu permasalahan atau dengan kata lain adalah efek langsung yang muncul dari adanya pemicu (*driver*).
3. ***State***, merupakan penjelasan dari kondisi yang terjadi pada saat ini yang kemudian akan berdampak pada lingkungan atau hutan dalam fungsinya sebagai ekosistem, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4. ***Impact***, secara umum merupakan dampak yang diterima dari adanya suatu permasalahan atau isu. Dampak ini digunakan untuk menjelaskan terkait perubahan-perubahan yang terjadi didalam kondisi yang ada dan pada akhirnya akan menimbulkan tanggapan (*response*).
5. ***Response***, merupakan tanggapan yang muncul dari dampak yang tidak diinginkan, mengacu kepada respon masyarakat baik individu maupun kelompok/lembaga.

Analisis DPSIR dilakukan berdasarkan pada konsep rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan faktor pendukung dalam pengembangan sumber daya hutan dan lahan (Setiawan & Adnan, 2021). Berdasarkan hasil analisis DPSIR, secara umum gambaran rantai hubungan potensi dan persoalan sektor FOLU di provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan sesuai Gambar 1 berikut.





**Gambar 1** | Proyeksi emisi sektor FOLU pada skenario NDC (CM1) dan LTS (LCCP)

Secara terperinci, berikut kondisi DPSIR di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2.1 Driving Force

### a) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data statistik, pertumbuhan penduduk di provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. Grafik pertumbuhan penduduk naik mencapai hingga 8,3% (Gambar 2). Angka pertumbuhan penduduk yang makin meningkat tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian, namun juga migrasi dari beberapa wilayah/provinsi lain di Indonesia, terutama dari pulau Jawa dan Sumatera. Masuknya penduduk dari wilayah lain di Indonesia ini dikarenakan adanya program transmigrasi, peluang kerja/mata pencaharian dan juga karena perkawinan.





**Gambar 2** | Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2021

**Tabel 1** | Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah

| Kabupaten/Kota     | Jumlah Penduduk (Jiwa) |         |         |
|--------------------|------------------------|---------|---------|
|                    | 2015                   | 2020    | 2021    |
| Kotawaringin Barat | 278,141                | 270,388 | 272,531 |
| Kotawaringin Timur | 426,176                | 428,895 | 432,283 |
| Kapuas             | 348,049                | 410,446 | 416,181 |
| Barito Selatan     | 131,987                | 131,140 | 131,606 |
| Barito Utara       | 127,479                | 154,812 | 157,231 |
| Sukamara           | 55,321                 | 63,464  | 64,941  |
| Lamandau           | 73,975                 | 97,611  | 100,535 |
| Seruyan            | 174,859                | 162,906 | 164,378 |
| Katingan           | 160,305                | 162,222 | 163,099 |
| Pulang Pisau       | 124,845                | 134,499 | 135,336 |
| Gunung Mas         | 109,947                | 135,373 | 138,407 |
| Barito Timur       | 113,696                | 113,229 | 114,243 |

| Kabupaten/Kota           | Jumlah Penduduk (Jiwa) |                  |                  |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|
|                          | 2015                   | 2020             | 2021             |
| Murung Raya              | 110,390                | 111,527          | 112,445          |
| Palangka Raya            | 259,865                | 293,457          | 298,954          |
| <b>Kalimantan Tengah</b> | <b>2,495,035</b>       | <b>2,669,969</b> | <b>2,702,170</b> |

Data: BPS Kalimantan Tengah<sup>1</sup>

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas dan Kota Palangka Raya adalah tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 432.283 jiwa, 416.181 jiwa, dan 298.954 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling rendah berada di Kabupaten Sukamara sejumlah 64.941 jiwa dan Lamandau sejumlah 100.535 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk secara rata-rata adalah sebesar 0,90% (2022), yang lebih rendah dibandingkan pada periode sebelumnya pada tahun 2010-2022 yang sebesar 1,84 %.

Peningkatan populasi di provinsi Kalimantan Tengah tersebut menuntut adanya ruang hidup dan ruang ekonomi yang semakin meluas. Kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan hingga untuk pembangunan infrastruktur juga akan semakin bertambah sehingga tekanan terhadap sumberdaya alam dan hutan juga akan semakin massif.

#### b) Kebijakan Pemekaran Wilayah & Tata Ruang Wilayah

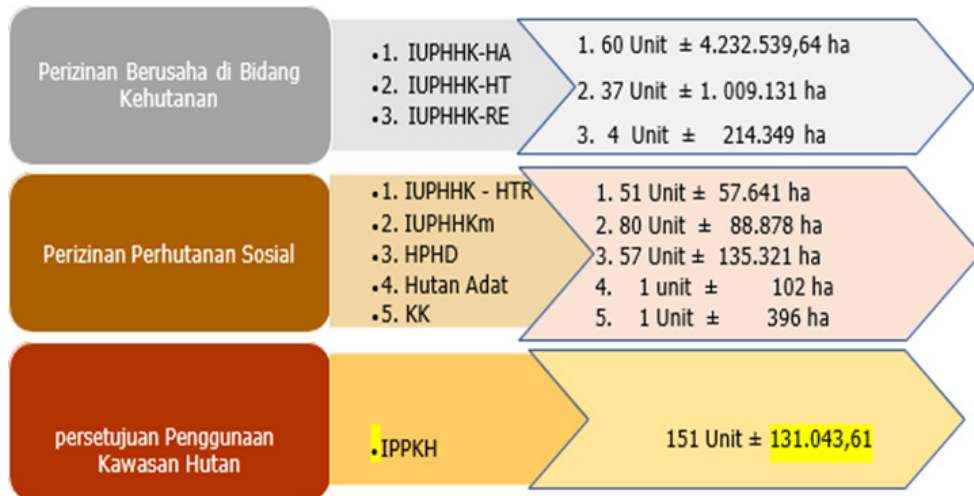
Provinsi Kalimantan Tengah pada awal terbentuknya yakni pada 23 Mei 1957 hanya terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten yakni: 1. Kabupaten Kapuas; 2. Kabupaten Kotawaringin dan; 3. Kabupaten Barito. Selanjutnya pada 1959 terjadi pemekaran wilayah menjadi 5 (lima) Kabupaten: Kabupaten Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Terakhir, berdasarkan UU No.5 Tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah kembali menjadi 13 kabupaten dan 1 (satu) kota hingga sekarang ini.

Pemekaran Kabupaten/Kota merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan. Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tercatat memiliki 1.569 desa dari 136 Kecamatan. Seiring dengan perkembangan administratif kewilayahan tersebut, maka tata ruang wilayah di provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengalami perubahan dan pengembangan yang berdampak pada kebutuhan lahan untuk mendukung pemerataan pembangunan. Tingginya kebutuhan akan lahan inilah yang selanjutnya dapat menjadi tekanan bagi kawasan hutan dan memicu terjadinya alih fungsi kawasan dan perubahan tutupan lahan.

#### c) Kebijakan Ekonomi (peningkatan PAD) & Pembangunan

Struktur ekonomi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Kalimantan Tengah masih mengandalkan sumberdaya alam dan hutan. Hal ini tertuang dalam dokumen RPJMD dimana pada misi pertama program RPJMD Tahun 2021 s.d. 2026 adalah “Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan”. Rumusan misi ini masih menyandarkan pada pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Selain itu, sumber-sumber pendapatan daerah juga ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Pada sektor kehutanan, berbagai izin usaha pemanfaatan lahan dan hutan telah dikeluarkan di provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Gambar 3 berikut.



**Gambar 3** | Pemanfaatan Lahan dan Hutan dan perizinan di Kalimantan Tengah

Data tersebut di atas belum termasuk data perubahan/alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain terutama untuk sektor Perkebunan Sawit dengan jumlah izin IUP Operasional sebanyak 207 dengan total luasan mencapai 2.134.104 ha. Sementara HGU setelah pelepasan ada 169 unit seluas 1.815.600 ha<sup>2</sup>, sehingga total perkebunan sawit di Kalimantan Tengah saat ini seluas ± 3,9 juta ha. Berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah tentunya dapat memberikan pengaruh pada kondisi hutan yang ada, sehingga perlu menjadi perhatian bersama supaya dapat mencapai keseimbangan ekonomi dan ekologis.

#### d) Pangan & Energi

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional, provinsi Kalimantan Tengah telah beberapa

kali ditunjuk sebagai kawasan proyek nasional dalam rangka pengembangan lumbung pangan nasional. Proyek pertama pada tahun 1995 - 1997 yang berupa mega proyek PLG 1,4 juta Ha, dan yang terbaru adalah proyek *Food Estate* yang dimulai pada tahun 2020, yang dalam pelaksanaannya hingga tahun 2021 luasannya mencapai 44.135 ha<sup>3</sup> dari total yang direncanakan seluas 165.000 ha hingga tahun 2024<sup>4</sup>. Proyek pertanian berskala besar ini telah memberikan kontribusi terhadap perubahan penggunaan lahan dan hutan di provinsi Kalimantan Tengah.

Selain menjadi lokasi penyediaan kebutuhan pangan nasional, provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi provinsi pendukung kebutuhan energi nasional. Sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara, provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas izin pertambangan yang mencapai 892.383,69 Ha, dengan 3 (tiga) kabupaten terluas adalah di Barito Utara seluas 283.992,94 Ha, yang disusul oleh Murung Raya seluas 202.106,00 Ha dan Kapuas seluas 164.159,00 Ha. Hanya 3 (tiga) Kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah yang tidak menghasilkan/ memproduksi batu bara yakni Sukamara, Lamadau dan Pulang Pisau<sup>5</sup>. Seperti halnya pada sektor pangan, proyek tambang baturabara ini turut berkontribusi dalam merubah lanskap di provinsi Kalimantan Tengah.

## 2.2 Pressure

### a) Meningkatnya Konversi dan Alih Fungsi Lahan

Sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Tengah yakni seluas 11.931.843,60 Ha atau sekitar 77,62% statusnya merupakan kawasan hutan. Dengan kondisi kekayaan sumberdaya alam dan hutan yang cukup tinggi, maka wajar bahwa pembangunan sektor ekonomi di provinsi Kalimantan Tengah sangat bergantung dengan keberadaan sumberdaya alam dan hutan tersebut. Bagi masyarakat provinsi Kalimantan Tengah khususnya masyarakat adat, masih banyak yang menggantungkan hidupnya langsung dari hasil hutan dan lahan. Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan adalah dengan praktek pertanian lahan kering (gilir balik) yang hingga saat ini masih berlaku di sebagian masyarakat lokal, terutama yang tinggal di daerah-daerah hulu seperti di Kabupaten Gunung Mas, Lamandau, Katingan, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, dan Murung Raya.

Selain aktivitas pemanfaatan hutan dan lahan oleh masyarakat, berbagai kegiatan terkait pembangunan khususnya untuk mencukupi kebutuhan sektor penting seperti infrastruktur, pangan dan energi telah memberikan tekanan terhadap ruang dan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan ekspor produk-produk perkebunan seperti minyak sawit dan produk pangan lainnya, yang selanjutnya dapat mendorong konversi dan alih fungsi lahan yang lebih luas.

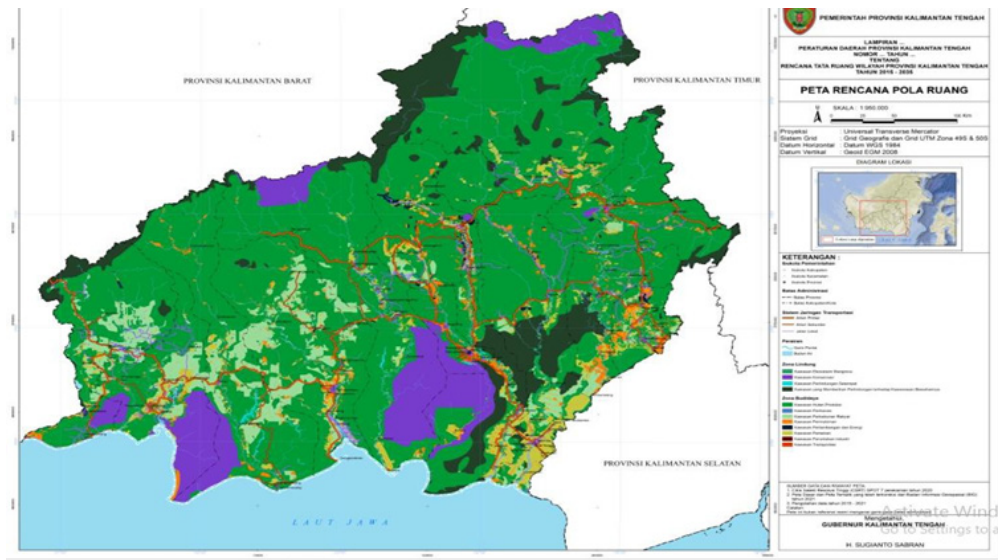
Salah satu kontrol terhadap penataan ruang yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). RTRWP Kalimantan Tengah sudah

<sup>3</sup> <https://kalteng.antaranews.com/berita/550057/berikut-luas-tanam-food-estate-kalteng-2020-2021>

<sup>4</sup> <https://diskominfo.kalteng.go.id/berita/read/558/pemprov-kalteng-berikan-paparan-teknis-program-food-estate>

<sup>5</sup> Source Url: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/10/697/1/produksi-batubara.html> Access Time: August 19, 2022, 6:14 am

ditetapkan melalui Peraturan Daerah No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035. Namun karena adanya dinamikan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi, maka pada Tahun 2022 saat ini tengah dilakukan revisi RTRWP Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambaran penggunaan lahan di Kalimantan Tengah berdasarkan dokumen laporan Rencana Tata Ruang tahun 2021 tersaji pada Gambar 4 berikut:



**Gambar 4** | Pemanfaatan Pola Ruang berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang di Kalimantan Tengah

#### b) Pemanfaatan Lahan Gambut

Berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35-unit KHG dengan luas 4.682.542 ha dan luas kubah gambut sekitar 1.581.677 hektar, sehingga rasio kubah gambut dengan luas KHG rata-rata sekitar 33,78%. Dari luasan tersebut, sekitar 45% dari total luasan KHG merupakan fungsi budidaya ekosistem Gambut, sisanya sekitar 55% terbagi atas 34% merupakan fungsi lindung ekosistem gambut berupa kubah gambut dan 21% bukan kubah gambut.

Berdasarkan data dari KLHS RTRWP Kalteng (draft, 2022) sejak tahun 1990 hingga 2017 telah terjadi perubahan tutupan hutan pada KHG di Provinsi Kalimantan Tengah, dari luas KHG sekitar 4.682.542 hektar, hanya tinggal sekitar 1.496.635 hektar (31,96%) atau turun sebesar sekitar 1.744.821 hektar (37,26%). Perubahan tutupan lahan pada KHG tersebut terutama disebabkan karena adanya kebutuhan perluasan lahan pertanian dan perkebunan pada lahan gambut. Untuk mendukung persiapan lahan, biasanya dilakukan dengan proses pengeringan gambut melalui pembuatan kanal-kanal saluran air sehingga muka air tanah menurun dan siap untuk mendukung budidaya pertanian dan perkebunan. Perlakuan ini menyebabkan kandungan bahan organik dalam gambut menjadi kering dan mudah terbakar pada saat musim kemarau, dan



menjadi sumber emisi karbon yang luar biasa besar.



**Gambar 5** | Luas perubahan tutupan hutan pada KHG selama 27 tahun (Sumber: draft KLHS RTRWP Kalteng, 2022)

### 2.3 State

#### a) Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan

Dengan adanya berbagai tekanan (*pressure*) yang terhadap hutan dan lahan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah digambarkan di bagian atas tulisan ini, telah berdampak pada tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan di provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari BPKH XXI Palangkaraya, laju deforestasi di provinsi Kalimantan Tengah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Laju deforestasi bruto: yakni angka deforestasi tanpa mempertimbangkan adanya upaya reforestasi
2. Laju deforestasi netto: yakni angka laju deforestasi yang sudah dikurangi dengan angka luasan area reforestasi.

Luas deforestasi bruto dan netto di provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 2 berikut.

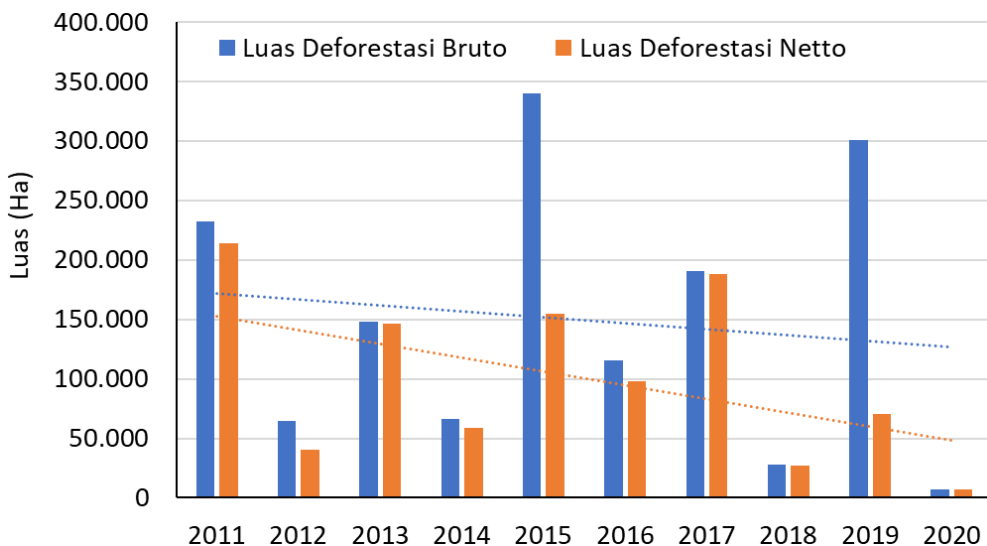
**Tabel 2** | Luas Deforestasi Bruto dan Netto Tahun 2011 – 2020

| Tahun | Luas Deforestasi Bruto | Luas Deforestasi Netto |
|-------|------------------------|------------------------|
| 2011  | 232.621,77             | 214.000,33             |
| 2012  | 64.435,06              | 40.509,75              |
| 2013  | 148.231,88             | 146.590,50             |
| 2014  | 66.552,77              | 58.783,03              |
| 2015  | 339.826,44             | 154.565,17             |

| Tahun | Luas Deforestasi Bruto | Luas Deforestasi Netto |
|-------|------------------------|------------------------|
| 2016  | 115.338,03             | 97.779,77              |
| 2017  | 190.924,05             | 188.442,28             |
| 2018  | 27.601,68              | 27.488,24              |
| 2019  | 300.518,98             | 70.440,38              |
| 2020  | 6.926,10               | 6.920,73               |

Sumber: BPKH Wilayah XXI Palangka Raya (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa tren deforestasi baik bruto maupun netto di provinsi Kalimantan Tengah terus menurun (Gambar ...). Bahkan, gap luas deforestasi bruto dan netto terus menjauh yang menunjukkan bahwa upaya reforestasi mulai menunjukkan hasil sehingga bisa mengurangi laju deforestasi bruto. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada upaya yang baik dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan berbagai pihak yang ada dalam mengurangi laju deforestasi, dan diharapkan terus menurun hingga target zero net sink pada tahun 2030.



**Gambar 6** | Trend deforestasi bruto dan netto di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011 - 2020

Untuk rincian luasan deforestasi per kabupaten/kota selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan kabupaten/kota, menunjukkan bahwa

Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan merupakan Kabupaten yang masih cukup tinggi luasan deforestasinya. Sedangkan kabupaten/kota terendah adalah Kota Palangka Raya, Murung Raya, Pulang Pisau dan Sukamara.

**Tabel 3** | Luasan deforestasi per kabupaten/kota selama lima tahun

| Luas Deforestasi per Kab./Kota | Tahun     |            |            |           |           | Jumlah Per Kab./Kota |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|
|                                | 2013-2014 | 2015-2016  | 2016-2017  | 2018-2019 | 2019-2020 |                      |
| Barito Selatan                 | 615,04    | 12.166,68  | 4.728,20   | 167,44    | -         | 17.677,37            |
| Barito Timur                   | 1.267,43  | 10.800,85  | 5.173,39   | 110,97    | -         | 17.352,64            |
| Barito Utara                   | 1.443,55  | 4.681,81   | 11.719,08  | 776,18    | 554,6     | 19.175,23            |
| Gunung Mas                     | 6.630,41  | 7.950,86   | 8.992,09   | 2.332,75  | 132,6     | 26.038,72            |
| Kapuas                         | 9.295,48  | 8.894,72   | 11.099,53  | 1.194,08  | 1.213,4   | 31.697,16            |
| Katingan                       | 11.893,69 | 13.873,07  | 12.374,31  | 2.920,21  | 2.518,4   | 43.579,69            |
| Kota Palangka Raya             | 468,46    | 1.768,24   | 3.231,20   | 239,19    | 138,7     | 5.845,79             |
| Kotawaringin Barat             | 7.983,75  | 15.596,05  | 6.949,97   | 7.564,69  | 117,4     | 38.211,85            |
| Kotawaringin Timur             | 8.587,05  | 4.556,93   | 12.556,29  | 361,62    | 160,5     | 26.222,36            |
| Lamandau                       | 9.954,88  | 7.031,84   | 10.992,62  | 6.367,79  | 824,0     | 35.171,13            |
| Murung Raya                    | 719,62    | 2.323,04   | 7.413,37   | 2.281,33  | 348,3     | 13.085,62            |
| Pulang Pisau                   | 193,81    | 5.854,43   | 3.190,01   | 1.525,20  | 682,2     | 11.445,61            |
| Seruyan                        | 7.096,53  | 18.796,00  | 8.428,02   | 249,25    | 236,1     | 34.805,93            |
| Sukamara                       | 617,78    | 1.791,32   | 6.020,38   | 118,60    | -         | 8.548,08             |
|                                | 66.767,48 | 116.085,87 | 112.868,45 | 26.209,30 | 6.926,10  | <b>328.857,20</b>    |

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Tengah (2021)

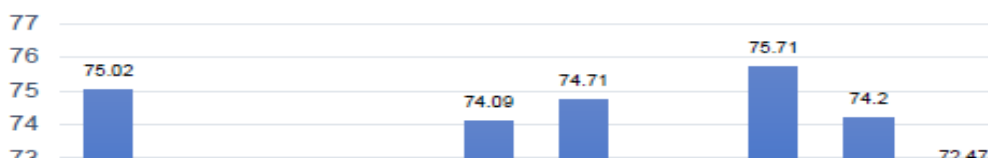
b) Indeks Pencemaran Lingkungan (IPL) berada di ambang batas

Adanya berbagai aktivitas eksploitasi hutan dan lahan di berbagai wilayah provinsi Kalimantan Tengah telah berdampak pada meningkatnya pencemaran air di berbagai sungai-sungai besar. Berdasarkan data DLH Provinsi Kalimantan Tengah (2021) diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik), namun terus menurun di tahun berikutnya yaitu 2019 sebesar 56,80 (kurang baik), tahun 2020 sebesar 53,61 (kurang baik). Turunnya nilai IKA ini ditunjang oleh memburuknya kualitas beberapa sungai besar misalnya Sungai Kahayan. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas air di Sungai Kahayan menunjukkan kisaran nilai Kualitas Air yang rata-rata tergolong buruk. Nilai parameter DO dan pH masih mendekati ambang baku mutu, namun untuk parameter NH3 dan BOD masih jauh dari baku mutu air minum yaitu (0,62 mg/L - 1,02 mg/L), dan (4,20-12,62 mg/L) (Setyawan, Rusdiansyah, & Prasetya, 2012). Berbagai penelitian lain juga melaporkan adanya kandungan merkuri yang melebihi ambang batas di beberapa Sungai di Kalimantan Tengah, yang mana hal ini diakibatkan oleh tingginya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Dari aspek kualitas udara, secara umum kualitas udara rata-rata di provinsi Kalimantan Tengah tergolong sangat baik. Penilaian ini didasarkan pada Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Namun demikian, kualitas udara secara signifikan memburuk ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti pada kejadian tahun 2015. Pada tahun tersebut, nilai partikulat harian pada tanggal 21 Oktober 2015 memiliki nilai rata-rata tertinggi Partikulat PM10 adalah 3141,0 µgram/m<sup>3</sup>, jauh diatas nilai normal yang diperkenankan sebesar 150 µgram/m<sup>3</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan buruknya kualitas udara (jauh diatas ambang batas yang di perkenankan<sup>6</sup>) ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut.

Dengan kondisi kualitas air dan udara sebagaimana dijelaskan diatas, dan cukup tingginya laju perubahan lahan yang ada, telah menyebabkan terjadinya penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2018 hingga 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6. Namun demikian, IKLH provinsi Kalimantan Tengah cukup berfluktuasi dengan kondisi yang paling rendah terjadi pada tahun 2012-2014, yang menunjukkan bahwa tren pada beberapa tahun terakhir (2018 – 2020) sudah cukup membaik dibandingkan pada periode tersebut.

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**



**Gambar 7** | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011 – 2020 Provinsi Kalimantan Tengah  
(Sumber: DLH Provinsi Kalimantan Tengah, 2021)

## 2.4 Impact

### a) Meningkatnya Bencana Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan

Banjir dan karhutla merupakan bencana yang paling sering terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan yang rawan mengalami kondisi banjir biasanya tidak jauh dari keberadaan sungai-sungai besar yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa tahun terakhir, frekuensi bencana banjir yang terjadi semakin meningkat dan luasan yang terdampak juga semakin meluas. Selain itu, rata-rata ketinggian air saat banjir juga meningkat dan berlangsung lebih lama. Kondisi ini dapat dipicu oleh adanya fenomena perubahan iklim dimana intensitas hujan ekstrim semakin meningkat, yang berbanding terbalik dengan luasan kawasan serapan air (berhutan) yang justru semakin berkurang. Berikut adalah data kejadian banjir di Kalimantan Tengah tahun 2021 yang hampir terjadi merata di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 4** | Data kejadian banjir dan warga terdampak berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah

| No | Kabupaten/Kota     | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Warga Terdampak (KK) |
|----|--------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 1  | Katingan           | 13        | 419            | 26.052               |
| 2  | Kota Palangka Raya | 4         | 12             | 2.948                |
| 3  | Kapuas             | 2         | 7              | -                    |
| 4  | Kotawaringin Timur | 8         | 42             | 4.718                |
| 5  | Kotawaringin Barat | 3         | 26             | 3.720                |



| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Warga Terdampak (KK) |
|----|----------------|-----------|----------------|----------------------|
| 6  | Pulang Pisau   | 3         | 10             | 1.019                |
| 7  | Gunung Mas     | 12        | 67             | 3.642                |
| 8  | Barito Timur   | -         | -              | -                    |
| 9  | Barito Selatan | 2         | 9              | 2.288                |
| 10 | Barito Utara   | 7         | 46             | 10.679               |
| 11 | Murung Raya    | 6         | 27             | 6.552                |
| 12 | Seruyan        | 8         | 42             | 4.718                |
| 13 | Sukamara       | 1         | 1              | 43                   |
| 14 | Lamandau       | 4         | 5              | 97                   |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (2021)

Selain bencana banjir, provinsi Kalimantan Tengah juga kerap dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutula). Berdasarkan data dari SIPONGI KLHK (2022), selama periode 2015-2020 selalu terjadi karhutla setiap tahun dengan luasan yang bervariasi, dengan kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2019 (lihat Tabel 5).

**Tabel 5** | Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

| Kab./Kota      | Tahun (Luas) |           |           |           |           |           |           |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | 2015 (Ha)    | 2016 (Ha) | 2017 (Ha) | 2018 (Ha) | 2019 (Ha) | 2020 (Ha) | 2021 (Ha) |
| Barito Selatan | 39.743       | 1.507     | 71        | 2.126     | 36.287    | 1.603     | 1.791     |
| Barito Timur   | 22.528       | 4         | 0         | 2.343     | 10.88     | 40        | 145       |
| Barito Utara   | 1.216        | 0         | 0         | 27        | 229       | 1.877     | 94        |

| Kab./Kota          | Tahun (Luas) |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 2015 (Ha)    | 2016 (Ha) | 2017 (Ha) | 2018 (Ha) | 2019 (Ha) | 2020 (Ha) | 2021 (Ha) |
| Gunung Mas         | 787          | 0         | 101       | 0         | 4.541     | 38        | 4         |
| Kapuas             | 62.413       | 325       | 12        | 4.660     | 42.882    | 1.542     | 249       |
| Katingan           | 60.094       | 428       | 423       | 1.812     | 26.906    | 303       | 65        |
| Kotawaringin Barat | 36.611       | 201       | 91        | 1.273     | 17.631    | 136       | 403       |
| Kotawaringin Timur | 38.722       | 844       | 626       | 7.974     | 17.725    | 174       | 9         |
| Lamandau           | 5.222        | 0         | 0         | 0         | 127       | 145       | 134       |
| Murung Raya        | 3.588        | 0         | 70        | 0         | 1.240     | 780       | 348       |
| Palangka Raya      | 20.133       | 310       | 54        | 1.084     | 19.848    | 29        | 34        |
| Pulang Pisau       | 220.202      | 408       | 98        | 22.348    | 95.574    | 798       | 43        |
| Seruyan            | 40.341       | 1.336     | 178       | 2.596     | 31.785    | 6         | 0         |
| Sukamara           | 29.415       | 744       | 19        | 1.190     | 12.153    | 210       | 333       |
| <b>Total</b>       | 581.015      | 6.107     | 1.743     | 47.433    | 317.809   | 7.681     | 3.652     |

Sumber: Sipongi KLHK

Berbagai kejadian karhutla yang terjadi, khususnya pada tahun 2015 dan 2019, telah berkontribusi pada luasan lahan yang terdeforestasi akibat karhutla sekaligus penyumbang emisi yang cukup signifikan. Sejak 2015, beberapa kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah memiliki area terbakar yang cukup luas, antara lain Kabupaten Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas, yang juga memiliki KHG terluas di provinsi Kalimantan Tengah.

#### b) Turunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup merupakan indikator kemampuan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya hutan dan lahan, dalam menunjang kehidupan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Daya dukung lingkungan hidup dibagi menjadi kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas penyediaan merupakan kemampuan lingkungan hidup dalam menyediakan berbagai barang dan jasa, sebagai contoh dalam penyedia pangan dan air bersih.

Sebagai penyedia pangan, pada periode tahun 2020–2021 provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan luasan kawasan panen produksi pangan dari 143.870 ha turun menjadi 125.870 ha. Demikian juga dengan fungsi penyedia air bersih yang menurun cukup signifikan terutama untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas<sup>7</sup>. Fungsi penyedia air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan hutan yang pada beberapa tahun terakhir mengalami pengurangan luasan akibat alih fungsi lahan. Dikawatirkan pada masa-masa mendatang, provinsi Kalimantan Tengah akan mengalami krisis air akibat adanya penurunan kemampuan ekosistem dalam menyediakan air bersih bagi kehidupan.

c) Menurunnya kualitas ekosistem dan tingkat Keanekaragaman hayati

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai tipe ekosistem hutan alami, mulai dari ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan gambut, hutan kerangas, hingga hutan rawa air tawar. Berbagai tipe ekosistem hutan tersebut memiliki berbagai fungsi dan jasa ekosistem dalam pengaturan tata air, perlindungan (mitigasi) bencana, pengolahan dan penguraian limbah, menjaga kualitas udara, pengaturan untuk penyerbukan alami, pengaturan pencegahan hama dan penyakit, pengaturan kesuburan tanah, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, dengan turunnya luasan dan kualitas tutupan hutan alami yang ada, maka berbagai fungsi dan jasa ekosistem hutan yang dihasilkan juga turut menurun. Tingginya laju konversi lahan hutan alami menjadi hutan industri dan area perkebunan, juga telah menurunkan berbagai potensi keanekaragaman hayati yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam aspek penataan ruang wilayah supaya tidak terjadi kepunahan berbagai spesies tumbuhan dan satwa liar langka.

## 2.5 Response

Berbagai kondisi sebagaimana dijelaskan diatas telah memberikan dampak yang luas bukan hanya terhadap lingkungan namun juga terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah. Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia terhadap berbagai upaya mitigasi perubahan iklim, maka pengelolaan hutan dan lahan yang ada di provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi sorotan. Dengan tutupan hutan yang hampir separuh dari luas wilayah provinsi Kalimantan Tengah, maka hutan di provinsi Kalimantan Tengah berpotensi untuk mendukung penyerapan karbon dan pengurangan emisi. Terlebih dengan adanya kawasan gambut yang cukup luas di provinsi Kalimantan Tengah, sekitar 30% dari luas wilayah, yang menjadi tempat simpanan karbon (*carbon sink*).

Salah satu upaya untuk merespon berbagai kondisi dan tantangan yang ada adalah dengan menyusun rencana aksi mitigasi dampak perubahan iklim dari sektor FOLU. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi yang dimandatkan untuk turut mensukseskan program FOLU Net Sink 2030, turut bertanggung jawab untuk mengurangi emisi dan meningkatkan serapan karbon pada area seluas 12.404.349,9 Ha yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota.

Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 pada lingkup provinsi Kalimantan Tengah ini disusun

<sup>7</sup> Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah

dengan melibatkan semua stakeholder terkait, baik unit UPT KLHK yang ada di Kalimantan Tengah seperti BPKH XXI, BPHP X, BPDASHL Kahayan, dan BKSDA Kalimantan Tengah, Balai Taman Nasional Sebangau dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Kalimantan, OPD tingkat provinsi seperti Dinas Kehutanan beserta Unit kerja yang ada di KPH-KPH, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kelautan & Perikanan. Diharapkan dengan adanya rencana kerja ini, implementasi aksi mitigasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim di provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan keadilan lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat lokal.





# BAB 03



RENCANA OPERASIONAL AKSI MITIGASI  
SUB NASIONAL KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023 - 2030



## BAB III | RENCANA KERJA AKSI MITIGASI SUB NASIONAL KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 – 2030

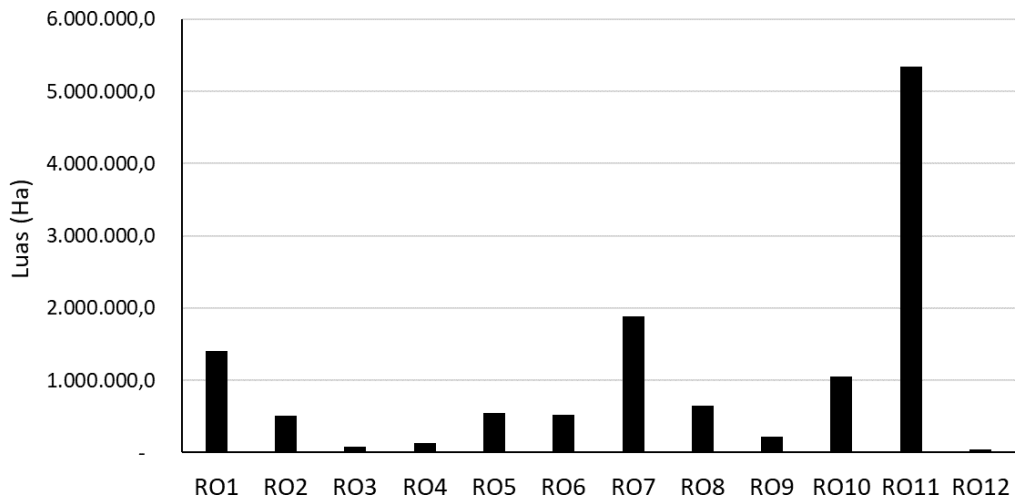
Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Sub Nasional Kalimantan Tengah Tahun 2023 – 2030 ini mencakup 12 rencana aksi mitigasi yaitu 1) pencegahan deforestasi lahan mineral, 2) pencegahan deforestasi lahan gambut, 3) pencegahan deforestasi konsesi, 4) pembangunan hutan tanaman, 5) pengayaan hutan alam (*enhanced natural regeneration*, ENR), 6) penerapan RIL-C, 7) peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, 8) peningkatan cadangan karbon non rotasi, 9) pengelolaan tata air gambut gambut, 10) restorasi gambut, 11) perlindungan area konservasi tinggi, dan 12) pengelolaan mangrove.

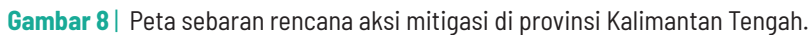
Masing-masing rencana aksi tersebut akan dilaksanakan pada lokasi yang sudah ditentukan sesuai arahan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) pada dokumen RENOPS FOLU Net Sink 2030. Pada penyusunan IPL tersebut, digunakan tiga informasi berbasis spasial yang meliputi; (1) Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan Berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (IJLT), (2) Peta Tipologi Kelembagaan, dan (3) Peta Indeks Biogeofisik (IBGF). Area yang masuk kategori prioritas tinggi ialah yang nilai IPL 7 sampai 9 dan yang masuk kategori sedang ialah yang nilai IPL 5 dan 6, dan yang rendah yang nilai IPL 1 sampai 4.

Dari hasil analisis spasial yang sudah dilakukan, sebaran lokasi prioritas tiap aksi mitigasi RO1-RO12 di provinsi Kalimantan Tengah tersaji pada Tabel 6. Dari Tabel 6 tersebut diketahui bahwa luas kawasan intervensi untuk aksi mitigasi perubahan iklim di provinsi Kalimantan Tengah mencapai 12,4 juta hektar, dengan luasan terbesar untuk aktivitas RO11 yang mencapai 5,3 juta hektar, dan terendah pada aktivitas RO12 yang seluas 47,7 ribu hektar. Sedangkan berdasarkan status kawasan hutan, paling luas di HPT dan HP dengan area intervensi untuk masing-masing kawasan seluas 3,8 dan 3,7 juta hektar. Gambar 7 menunjukkan peta sebaran rencana aksi mitigasi di provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 6** | Luas area pelaksanaan aksi mitigasi berdasarkan pemangku kawasan hutan di provinsi Kalimantan Tengah

| Pemangku Kawasan | Jenis Pengelolaan | Deforestasi   |              | Degradasi Konsesi (RO3) | PBPH-HT (RO4) | PHL       |             | Peningkatan Cadangan Karbon |                  | Pengelolaan Gambut |                  | Konservasi Tinggi (RO11) | Pengelolaan Mangrove |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
|                  |                   | Mineral (RO1) | Gambut (RO2) |                         |               | ENR (RO5) | RIL-C (RO6) | Rotasi (RO7)                | Non-Rotasi (RO8) | Tata Air (RO9)     | Restorasi (RO10) |                          |                      |
| KSDAE            | Konservasi        | 89.774        | 128.430      | -                       | -             | 1.112     | -           | -                           | 171.191          | 577                | 185.952          | -                        | 16.813               |
| PSKL             | PS & PIAPS        | 114.519       | 124.807      | -                       | 3.777         | 3.098     | 5           | 49.219                      | 56.444           | 8.851              | 255.815          | 406.669                  | 2.800                |
| PHL              | PBPH-HT           | 91.615        | 12.236       | -                       | 204.635       | 29.385    | 25.950      | 159.791                     | 56.057           | 1.361              | 9.325            | 344.063                  | 149                  |
|                  | PBPH-HA           | 699.290       | 3.554        | 77.122                  | -             | 516.194   | 477.526     | 540.101                     | 114.372          | -                  | 1.287            | 2.769.661                | -                    |
|                  | PBPH-RE           | 1.379         | 56.876       | -                       | -             | 448       | 151         | 13.793                      | 774              | 353                | 37.608           | 155.780                  | -                    |
| PEMDA            | HL-Non PIAPS      | 24.879        | 70.566       | -                       | -             | 670       | -           | -                           | 42.967           | 11.347             | 202.096          | 797.839                  | 18.555               |
| PEMDA            | HPK Non PIAPS     | 171.594       | 42.871       | -                       | -             | 1.746     | 166         | 539.290                     | 114.301          | 15.740             | 75.019           | 190.185                  | 1.480                |
| PEMDA            | HP-Non Konsasi    | 93.219        | 51.220       | -                       | -             | 401       | 16.881      | 222.569                     | 48.969           | 23.140             | 147.028          | 551.696                  | 2.105                |
| PEMDA            | PEMDA-Non HGU     | 98.964        | 21.060       | -                       | -             | -         | 619         | 329.416                     | 41.423           | 120.961            | 128.002          | 102.983                  | 5.981                |
|                  | PEMDA-HGU         | 20.705        | 3.853        | -                       | -             | -         | -           | 37.238                      | 9.607            | 35.772             | 5.755            | 22.305                   | 67                   |
| JUMLAH           |                   | 1.405.937     | 515.272      | 77.122                  | 208.412       | 553.053   | 521.298     | 1.891.417                   | 656.105          | 219.101            | 1.047.887        | 5.341.181                | 47.750               |

**Gambar 7** | Sebaran luas pada tiap Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi di Provinsi Kalimantan Tengah



### 3.1 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral – RO1

Lokasi yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi ini adalah pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alam dengan IPL relatif tinggi dan berdasarkan IJLH termasuk arahan lindung dan produksi. Lokasi dengan IPL tinggi memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkonversi menjadi non-hutan ataupun terdegradasi. Lokasi masih berhutan alam yang masuk ke dalam arahan lindung dan produksi harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan hutan memberikan layanan jasa lingkungan dan juga produk hasil hutan. Secara

detail, pemilihan lokasi untuk kegiatan RO1 di provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7 |** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi pada lahan mineral tidak terencana (a) dan yang terencana (b)

**a. Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana**

| No | Parameter       | Kriteria I                                                   | Kriteria II                       | Kriteria III                      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Kawasan         | HK, HL, HP, HPT<br>(termasuk PBPH- HA PBPH-<br>RE, dan PIAPS | PBPH                              | APL, HGU, PIAPS,<br>di APL        |
| 2  | Tanah           | Mineral                                                      | Mineral                           | Mineral                           |
| 3  | IPL             | 7, 8, 9                                                      | 7, 8, 9                           | 7, 8, 9                           |
| 4  | IJL             | Lindung dan Produksi                                         | Lindung                           | Lindung                           |
| 5  | Penutupan Lahan | Hutan alam primer dan<br>sekunder                            | Hutan alam primer dan<br>sekunder | Hutan alam primer dan<br>sekunder |
|    | Catatan         |                                                              | Telaah RKU/RKT                    |                                   |

**b. Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana**

| No | Parameter       | Kriteria I                                                                                                                  | Kriteria II                       | Kriteria III                                                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Kawasan         | HPK                                                                                                                         | PBPH-HT                           | APL, HGU                                                     |
| 2  | Tanah           | Mineral                                                                                                                     | Mineral                           | Mineral                                                      |
| 3  | IPL             | 7, 8, 9                                                                                                                     | 7, 8, 9                           | 7, 8, 9                                                      |
| 4  | IJL             | Lindung dan Produksi                                                                                                        | Lindung                           | Lindung                                                      |
| 5  | Penutupan Lahan | Hutan alam primer dan<br>sekunder                                                                                           | Hutan alam<br>primer dan sekunder | Hutan alam<br>primer dan sekunder                            |
|    | Catatan         | Disesuaikan untuk Provinsi yang masuk kriteria<br>Penataan Kawasan Hutan PP 23/2021, dan<br>Permen LHK 7/2021 Pasal 129 (1) | Telaah RKU/RKT                    | Disesuaikan dengan<br>Permen LHK 7/2021<br>dan Perda terkait |

Adapun rencana aksi mitigasi RO1 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO1 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 8 | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral

| Strategi (R0)                                                  | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan    | Tujuan Program              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| R01<br>Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan | 1.405.937                     | KK; HL; HPT; HP; HPK; dan APL | Aksi Pengurangan emisi      |
|                                                                |                               |                               | Aksi Mempertahankan Serapan |



|  | Program                        | Kegiatan |                                                                                                                                |
|--|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | P.1. Pencegahan karhutla       | P.1.1.   | Sosialisasi kawasan rawan karhutla                                                                                             |
|  |                                | P.1.2.   | Pengamanan: patrol rutin, system peringatan dini (EWS)                                                                         |
|  |                                | P.1.3.   | Pengembangan dan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api)                                                                         |
|  | P2. Penanggulangan karhutla    | P.2.1.   | Penyediaan sarana prasarana pemadaman karhutla (peralatan, APD, sumur bor, dll)                                                |
|  |                                | P.2.2.   | Membangun jaringan koordinasi & komunikasi antar stakeholders (terkait penanganan karhutla)                                    |
|  |                                | P.2.3.   | Pembangunan infrastruktur pendukung penanggulangan karhutla                                                                    |
|  | P.3. Penanganan pasca karhutla | P.3.1.   | Monitoring dan evaluasi lahan bekas terbakar (pemantauan suksesi vegetasi alami, penelitian kondisi lahan pasca terbakar, dll) |
|  | P.4. Pengamanan kawasan hutan  | P.4.1.   | Sosialisasi tata batas kawasan hutan konservasi (KSA & KPA)                                                                    |
|  |                                | P.4.2    | Sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan                                                                                  |
|  |                                | P.4.3    | Patroli gabungan/terpadu                                                                                                       |
|  |                                | P.4.4    | Identifikasi dan inventarisasi potensi SDH                                                                                     |
|  |                                | P.4.5    | Mempertahankan areal berhutan pada HGU dengan menjadikannya sebagai areal HCV.                                                 |
|  |                                | P.4.6    | Skema insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal berhutanny                                                          |
|  |                                | P.4.7    | Pengelolaan area berhutan di luar kawasan hutan                                                                                |
|  |                                | P.4.8    | Mengawasi dan mengendalikan peredaran hasil hutan baik kayu dan non kayu                                                       |

| Strategi (R0) | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program            |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|               |                               |                            | Aksi meningkatkan Serapan |
|               |                               |                            | Kelembagaan               |
|               |                               |                            |                           |

| Program                                    | Kegiatan                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.5.Pengembangan RIL-C & Pengelolaan SILIN | P.5.1 Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN                                            |
|                                            | P.5.2 Membangun komitmen pemegang ijin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN                                                       |
| P.6.Rehabilitasi hutan dan lahan           | P.6.1 Rehabilitasi pada kawasan bekas terbakar                                                                                 |
|                                            | P.6.2 Rehabilitasi pada kawasan lahan kritis dan terdegradasi                                                                  |
|                                            | P.6.3 Rehabilitasi pada lahan dan hutan yang dikelola masyarakat (Perhutanan Sosial)                                           |
| P.7.Penguatan kelembagaan masyarakat       | P.7.1 Penguatan kelembagaan Forum Komunikasi/Koordinasi antar pemangku kepentingan                                             |
|                                            | P.7.2 Sosialisasi Perhutanan Sosial                                                                                            |
|                                            | P.7.3 Pembentukan dan pembinaan KTH pemegang persetujuan Perhutanan Sosial                                                     |
|                                            | P.7.4 Kerjasama kemitraan antara PBPH- HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)                                         |
|                                            | P.7.5 Penyusunan & Pengesahan RPHJP KPH                                                                                        |
|                                            | P.7.6 Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan                                                                    |
|                                            | P.7.7 Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola sektor kehutanan                                                       |
|                                            | P.7.8 Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan             |
|                                            | P.7.9 Fasilitasi pendampingan kelompok tani hutan & bimbingan teknis dalam pengelolaan PS                                      |
|                                            | P.7.10 Pembangunan demplot agroforestry dan pengembangan skema Jangka Benah                                                    |
|                                            | P.7.11 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (ekowisata, air, penyimpanan/ penyerapan karbon)                                |
|                                            | P.7.12 Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengamanan hutan (pamswakarsa terpadu)                                               |
|                                            | P.7.13 Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan HHBK dan multi usaha kehutanan pada areal yang dibebani izin usaha kehutanan |

**Tabel 9** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral

| R0  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                                                  | Pelaksana Kegiatan      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R01 | P.1.1.        | Sosialisasi kawasan rawan karhutla                                                                                             | KSDAE; PSKL; PHL; PEMDA |
|     | P.1.2.        | Pengamanan: patroli rutin, system peringatan dini (EWS)                                                                        |                         |
|     | P.1.3.        | Pengembangan dan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api)                                                                         |                         |
|     | P.2.1.        | Penyediaan sarana prasarana pemadaman karhutla (peralatan, APD, sumur bor, dll)                                                |                         |
|     | P.2.2.        | Membangun jaringan koordinasi & komunikasi antar stakeholders (terkait penanganan karhutla)                                    |                         |
|     | P.2.3.        | Pembangunan infrastruktur pendukung penanggulangan karhutla                                                                    |                         |
|     | P.3.1.        | Monitoring dan evaluasi lahan bekas terbakar (pemantauan suksesi vegetasi alami, penelitian kondisi lahan pasca terbakar, dll) |                         |
|     | P.4.1.        | Sosialisasi tata batas kawasan hutan konservasi (KSA & KPA)                                                                    |                         |
|     | P.4.2         | Sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan                                                                                  |                         |
|     | P.4.3         | Patroli gabungan/terpadu                                                                                                       |                         |
|     | P.4.4         | Identifikasi dan inventarisasi potensi SDH                                                                                     |                         |
|     | P.4.5         | Mempertahankan areal berhutan pada HGU dengan menjadikannya sebagai areal HCV.                                                 |                         |
|     | P.4.6         | Skema insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal berhutannya                                                         |                         |
|     | P.4.7         | Pengelolaan area berhutan di luar kawasan hutan                                                                                |                         |

|  | Indikator Keberhasilan                                                         | Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                                                                                | 20<br>23    | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |
|  | Tersosialisasikannya kawasan rawan karhutla di 13 Kab, 1 Kota                  | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya Patroli dan pengembangan sistem peringatan dini (EWS)            | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terbangunnya kelompok MPA yang memadai                                         | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Tersedianya sarana prasarana pemadaman karhutla                                | X           | X        | X        |          |          |          |          |          |
|  | Terbangunnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan              | X           | X        |          |          |          |          |          |          |
|  | Terbangunnya infrastruktur pendukung penanggulangan karhutla                   | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi (penilaian) lahan bekas terbakar         | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Tersosialisasikannya batas kawasan hutan konservasi (KSA & KPA)                | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Tersosialisasikannya mekanisme perlindungan dan pengamanan hutan               | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya patroli keamanan hutan gabungan (terpadu)                        | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi Sumber Daya Hutan                 | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terjaganya area HCV pada area HGU                                              | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terealisasikannya pemberian intensif bagi HGU mempertahankan areal berhutannya | x           |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial                                        | X           | X        | X        | X        | X        |          |          |          |



| R0 | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                                | Pelaksana Kegiatan |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | P.4.8         | Mengawasi dan mengendalikan peredaran hasil hutan baik kayu dan non kayu                                     |                    |
|    | P.5.1         | Sosialisasi pemanenan hutan dengan RIL-C dan pengelolaan PBPH-HA dengan SILIN                                |                    |
|    | P.5.2         | Membangun komitmen pemegang ijin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN                                           |                    |
|    | P.6.1         | Rehabilitasi pada kawasan bekas terbakar                                                                     |                    |
|    | P.6.2         | Rehabilitasi pada kawasan lahan kritis dan terdegradasi                                                      |                    |
|    | P.6.3         | Rehabilitasi pada lahan dan hutan yang dikelola masyarakat (Perhutanan Sosial)                               |                    |
|    | P.7.1         | Penguatan kelembagaan Forum Komunikasi/Koordinasi antar pemangku kepentingan                                 |                    |
|    | P.7.2         | Sosialisasi Perhutanan Sosial                                                                                |                    |
|    | P.7.3         | Pembentukan dan pembinaan KTH pemegang persetujuan Perhutanan Sosial                                         |                    |
|    | P.7.4         | Kerjasama kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)                              |                    |
|    | P.7.5         | Penyusunan & Pengesahan RPHJP KPH                                                                            |                    |
|    | P.7.6         | Pengadaan tenaga POLHUT dan Tenaga Penyuluh Kehutanan                                                        |                    |
|    | P.7.7         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola sektor kehutanan                                           |                    |
|    | P.7.8         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan |                    |

|  | Indikator Keberhasilan                                                                                          | Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                                                                                                                 | 20<br>23    | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |
|  | Meningkatnya aspek kontrol terhadap pemanfaat hutan hasil hutan kayu dan non kayu                               | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Tersosialisasikannya praktek RIL-C dan SILIN pada PBPH- HA                                                      | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terbangunnya komitmen pemilik ijin untuk pelaksanaan RIL-C dan SILIN                                            | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya rehabilitasi pada kawasan bekas terbakar                                                          | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya rehabilitasi pada lahan kritis dan terdegradasi                                                   | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya rehabilitasi dilahan kelola masyarakat (PS)                                                       | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terbangunnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan                                               | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Tersosialisasikannya skema Perhutanan Social                                                                    | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terbentuknya KTH PS dan terlaksananya pembinaan kelompok pengelola PS                                           | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terbangunnya kerjasama kemitraan antara PBPH-HA /HT dan masyarakat sekitar (realisasi KULIN KK)                 | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terselenggarannya dan penyusunan Pengesahan RPHJP                                                               |             |          | X        | X        | X        |          |          |          |
|  | Terlaksananya pengadaan tenaga POLHUT dan tenaga kehutanan                                                      | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terselenggarannya pelatihan dan terbangunnya peningkatan kapasitas aparatur pelaksana                           | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

| R0 | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                                | Pelaksana Kegiatan |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | P.7.8         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan |                    |
|    | P.7.8         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan |                    |
|    | P.7.8         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan |                    |
|    | P.7.8         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan |                    |
|    | P.7.8         | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola persetujuan PS dan masyarakat sekitar kawasan hutan |                    |

|  | Indikator Keberhasilan                                                                                          | Pelaksanaan |          |          |          |          |          |          |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                                                                                                                 | 20<br>23    | 20<br>24 | 20<br>25 | 20<br>26 | 20<br>27 | 20<br>28 | 20<br>29 | 20<br>30 |
|  | Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
|  | Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola | X           | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

### 3.2 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Lahan Gambut – RO2

Sama halnya dengan RO1, pencegahan deforestasi pada lahan gambut merupakan salah satu prioritas penting bagi semua pemangku kawasan. Pemilihan lokasi intervensi dilakukan pada kawasan yang masih memiliki tutupan hutan alam dengan IPL relatif tinggi dan berdasarkan IJLH termasuk arahan lindung dan produksi. Lokasi dengan IPL tinggi memiliki tingkat risiko tinggi untuk terkonversi menjadi non-hutan ataupun terdegradasi. Lokasi masih berhutan alam yang masuk ke dalam arahan lindung dan produksi harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan hutan memberikan layanan jasa lingkungan dan juga produk hasil hutan. Secara detail, pemilihan lokasi untuk kegiatan RO2 di provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi pada lahan gambut tidak terencana (a) dan yang terencana (b)

#### a. Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana

| No             | Parameter       | Kriteria I                                                         | Kriteria II                       | Kriteria III                      |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | Kawasan         | HK, HL, HP<br>(termasuk HP, HPT, PBPH-HA,<br>PBPH-RE,<br>dan PIAPS | PBPH-HT                           | APL, HGU, PIAPS, di APL           |
| 2              | Tanah           | Gambut                                                             | Gambut                            | Gambut                            |
| 3              | IPL             | 7, 8, 9                                                            | 7, 8, 9                           | 7, 8, 9                           |
| 4              | IJL             | Lindung dan Produksi                                               | Lindung                           | Lindung                           |
| 5              | Penutupan Lahan | Hutan alam primer dan sekunder                                     | Hutan alam<br>primer dan sekunder | Hutan alam<br>primer dan sekunder |
| <b>Catatan</b> |                 |                                                                    | Telaah RKU/RKT                    |                                   |

**b. Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana**

| No             | Parameter                                                                                                             | Kriteria I5                    | Kriteria II                    | Kriteria III                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1              | Kawasan                                                                                                               | HPK                            | PBPH-HT                        | APL, HGU                                               |
| 2              | Tanah                                                                                                                 | Gambut                         | Gambut                         | Gambut                                                 |
| 3              | IPL                                                                                                                   | 7, 8, 9                        | 7, 8, 9                        | 7, 8, 9                                                |
| 4              | IJL                                                                                                                   | Lindung dan Produksi           | Produksi                       | Produksi                                               |
| 5              | Penutupan Lahan                                                                                                       | Hutan alam primer dan sekunder | Hutan alam primer dan sekunder | Hutan alam primer dan sekunder                         |
| <b>Catatan</b> | Disesuaikan untuk Provinsi yang masuk kriteria Penataan Kawasan Hutan PP 23/2021, dan Permen LHK 7/2021 Pasal 129 (1) |                                | Telaah RKU/RKT                 | Disesuaikan dengan Permen LHK 7/2021 dan Perda terkait |

Adapun rencana aksi mitigasi RO2 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO2 dapat dilihat pada Lampiran 2.



Tabel 11 | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Gambut

| Strategi (Ro)                      | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan    | Tujuan Program               |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| R02. Pencegahan deforestasi Gambut | 515.272                       | KK; HL; HPT; HP; HPK; dan APL | Aksi Pengurangan Emisi       |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               | Aksi Mempertahan kan Serapan |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |
|                                    |                               |                               |                              |

|  | Program                               | Kegiatan |                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | P.1. Pencegahan karhutla gambut       | P.1.1    | Sosialisasi kawasanrawan karhutla gambut                                                                                       |
|  |                                       | P.1.2    | Pengamanan: patrol rutin, system peringatan dini (EWS)                                                                         |
|  |                                       | P.1.3    | Pengembangan dan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api)                                                                         |
|  | P.2. Penanggulangan karhutla gambut   | P.2.1    | Penyediaan sarana prasarana pemadaman karhutla (peralatan, APD, sumur bor, dll)                                                |
|  |                                       | P.2.2    | Membangun jaringan koordinasi & komunikasi antar stakeholders (terkait penanganan karhutla)                                    |
|  |                                       | P.2.3    | Pembangunan infrastruktur pendukung penanggulangan karhutla                                                                    |
|  |                                       | P.2.4    | Pemadaman langsung                                                                                                             |
|  | P.3. Penanganan pasca karhutla gambut | P.3.1.   | Monitoring dan evaluasi lahan bekas terbakar (pemantauan suksesi vegetasi alami, penelitian kondisi lahan pasca terbakar, dll) |
|  | P.4. Pengelolaan ekosistem gambut     | P.4.1    | Identifikasi dan inventarisasi potensi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)                                                        |
|  |                                       | P.4.2    | Penyusunan RPPEG Kabupaten/Kota                                                                                                |
|  |                                       | P.4.3    | Implementasi perlindungan & pengelolaan ekosistem gambut melalui pembasahan gambut, pengukuran TMA                             |
|  |                                       | P.4.4    | Identifikasi dan inventarisasi potensi SDH                                                                                     |
|  | P.5. Pengamanan kawasan hutan         | P.5.1    | Penataan batas kawasan dan areal Perhutanan Sosial                                                                             |

| Strategi (Ro) | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program            |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            | Aksi meningkatkan serapan |
|               |                               |                            | Pengembangan kelembagaan  |
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            |                           |
|               |                               |                            |                           |

|  | Program                                         | Kegiatan |                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                 | P.5.2    | Sosialisasi tata batas kawasan hutan                                                  |
|  | P.6. Pengelolaan areal HCV                      | P.6.1    | Mempertahankan areal berhutan pada HGU sebagai areal HCV                              |
|  |                                                 | P.6.2    | Pemberian insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan kawasan HCV                  |
|  | P.7. Revegetasi lahan gambut                    | P.7.1    | Revegetasi gambut dengan pola agroforestry (Sylvopastura dan Sylvofishery)            |
|  | P.8. Sosialisasi dan money pelaksanaan kegiatan | P.8.1    | Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan KTH Perhutanan Sosial                          |
|  |                                                 | P.8.2    | Monitoring dan Evaluasi persetujuan PS                                                |
|  | P.9. Pemberdayaan Masyarakat                    | P.9.1    | Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan                                       |
|  |                                                 | P.9.2    | Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK                                                  |
|  |                                                 | P.9.3    | Fasilitasi pertumbuhan investasi dan pengembangan industry berbasis HHBK              |
|  |                                                 | P.9.4    | Promosi produk hasil hutan baik kayu maupun non kayu untuk pemulihan ekonomi nasional |

[illegible]

|  | Program | Kegiatan                                                                                                 |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | P.9.5 Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perlindungan hutan                                             |
|  |         | P.9.6 Pengembangan SDM untuk masyarakat kelompok tani hutan (bimtek, pelatihan, diklat dll)              |
|  |         | P.9.7 Pengembangan multiusaha kehutanan pada areal berizin                                               |
|  |         | P.9.8 Kerjasama kemitraan antara PBPH- HA/HT/RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)                     |
|  |         | P.9.9 Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                            |
|  |         | P.9.10 Pengembangan sarana dan prasarana KUP                                                             |
|  |         | P.10.1 Pengembangan SDM untuk aparaturnya pelaksana kehutanan (melalui Diklat, Studi Banding dan magang) |
|  |         | P.10.2 Pembentukan RPH (Resort Pengelolaan Hutan)                                                        |
|  |         | P.11.1 Resolusi konflik tenurial melalui skema TORA dan PS                                               |



**Tabel 12** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Gambut

| RO  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                                                  | Pelaksana Kegiatan      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R02 | P.1.1         | Sosialisasi kawasan rawan karhutla gambut                                                                                      | KSDAE; PSKL; PHL; PEMDA |
|     | P.1.2         | Pengamanan: patroli rutin, system peringatan dini (EWS)                                                                        |                         |
|     | P.1.3         | Pengembangan dan pembinaan MPA (Masyarakat Peduli Api)                                                                         |                         |
|     | P.2.1         | Penyediaan sarana prasarana pemadaman karhutla gambut (peralatan, APD, sumur bor, dll)                                         |                         |
|     | P.2.2         | Membangun jaringan koordinasi & komunikasi antar stakeholders (terkait penanganan karhutla gambut)                             |                         |
|     | P.2.3         | Pembangunan infrastruktur pendukung penanggulangan karhutla gambut                                                             |                         |
|     | P.2.4         | Pemadaman langsung                                                                                                             |                         |
|     | P.3.1.        | Monitoring dan evaluasi lahan bekas terbakar (pemantauan suksesi vegetasi alami, penelitian kondisi lahan pasca terbakar, dll) |                         |
|     | P.4.1         | Identifikasi dan inventarisasi potensi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)                                                        |                         |
|     | P.4.2         | Penyusunan RPPEG Kabupaten/Kota                                                                                                |                         |
|     | P.4.3         | Implementasi perlindungan & pengelolaan ekosistem gambut melalui pembasahan gambut, pengukuran TMA                             |                         |

|  | Indikator Keberhasilan                                                                   | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                          | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Tersosialisasikannya kawasan rawan karhutla gambut                                       | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terselenggaranya patrol rutin dan system EWS                                             | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Terbangunnya dan terbinananya kelompok MPA                                               | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Tersedianya sarana prasarana pemadaman karhutla gambut                                   | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan                        | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terbangunnya infrastruktur pendukung penanggulangan karhutla gambut                      | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terlaksananya reaksi cepat pemadaman karhutla gambut                                     | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi (penilaian) lahan bekas terbakar                   |             |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi potensi di 35 KHG                           | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Tersusunnya RPPEG di 12 Kabupaten 1 Kota                                                 | X           | X    |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan pengukuran TMA di 35 KHG |             |      |      | X    | X    | X    | X    |      |

| RO | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                         | Pelaksana Kegiatan |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | P.4.4         | Identifikasi dan inventarisasi potensi SDH pada ekosistem gambut                      |                    |
|    | P.5.1         | Penataan batas kawasan areal Perhutanan Sosial                                        |                    |
|    | P.5.2         | Sosialisasi tata batas kawasan hutan                                                  |                    |
|    | P.6.1         | Mempertahankan areal berhutan pada HGU sebagai areal HCV                              |                    |
|    | P.6.2         | Pemberian insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan kawasan HCV                  |                    |
|    | P.7.1         | Revegetasi gambut dengan pola agroforestry (Sylvopastura dan Sylvofishery)            |                    |
|    | P.8.1         | Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan KTH Perhutanan Sosial                          |                    |
|    | P.8.2         | Monitoring dan Evaluasi persetujuan PS                                                |                    |
|    | P.9.1         | Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan                                       |                    |
|    | P.9.2         | Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK                                                  |                    |
|    | P.9.3         | Fasilitasi pertumbuhan investasi dan pengembangan industry berbasis HHBK              |                    |
|    | P.9.4         | Promosi produk hasil hutan baik kayu maupun non kayu untuk pemulihan ekonomi nasional |                    |
|    | P.9.5         | Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perlindungan hutan                                |                    |
|    | P.9.6         | Pengembangan SDM untuk masyarakat kelompok tani hutan (bimtek, pelatihan, diklat dll) |                    |
|    | P.9.7         | Pengembangan multiusaha kehutanan pada areal berizin                                  |                    |

|  | Indikator Keberhasilan                                                                 | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                        | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terlaksananya inventarisasi potensi sumber daya hutan pada ekosistem gambut            | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya penataan batas areal PS                                                  | X           | X    |      |      |      |      |      |      |
|  | Tersosialisasikannya batas kawasan hutan                                               |             |      | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terbangunnya HCV pada lahan HGU                                                        | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Tersusunnya skema insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan kawasan HCV           | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya program revegetasi gambut melalui pola agroforestry                      | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pembentukan KTH PS                            | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi persetujuan PS                                   |             |      |      |      | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan                                    | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terbentuknya skema pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK                                |             |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya fasilitasi pertumbuhan investasi dan pengembangan industry berbasis HHBK | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya promosi produk hasil hutan kayu dan non kayu                             |             |      |      |      | X    | X    | X    | X    |
|  | Penambahan jumlah kualitas SDM perlindungan hutan                                      | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kelompok tani hutan                            | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terealisasikannya pengembangan multi usaha kehutanan pada areal berizin                |             |      | X    | X    | X    | X    | X    |      |

| RO | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                     | Pelaksana Kegiatan |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | P.9.8         | Kerjasama kemitraan antara PBPH-HA/ HT/ RE dengan masyarakat sekitar (KULIN KK)                   |                    |
|    | P.9.9         | Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)                                                           |                    |
|    | P.9.10        | Pengembangan sarana dan prasarana KUPS                                                            |                    |
|    | P.10.1        | Pengembangan SDM untuk aparaturnya pelaksana kehutanan (melalui Diklat, Studi Banding dan magang) |                    |
|    | P.10.2        | Pembentukan RPH (Resort Pengelolaan Hutan)                                                        |                    |
|    | P.11.1        | Resolusi konflik tenurial melalui skema TORA dan PS                                               |                    |

|  | Indikator Keberhasilan                                                                | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                       | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terlaksananya kemitraan kehutanan (KULIN KK dengan PBPH)                              | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terbentuknya MPA                                                                      | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terealisasikannya bantuan sarana prasarana KUPS                                       | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM melalui Diklat, Pelatihan, Studi Banding dll) | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terbentuknya RPH                                                                      | X           | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Berkurangnya permasalahan konflik tenurial melalui skema TORA dan PS                  |             |      | X    | X    | X    | X    |      |      |

### 3.3 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Konsesi – RO3

Sama halnya dengan RO1 dan RO2, pencegahan deforestasi merupakan salah satu prioritas penting bagi semua pemangku kawasan, termasuk pemegang ijin konsesi (PBPH). Hutan produksi sebagaimana fungsinya bertujuan untuk memproduksi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang dalam pengelolaannya harus tetap mengutamakan pengelolaan hutan produksi berkelanjutan. Beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan produksi diantaranya aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, kesinambungan produksi, konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta berbagai lini fungsi hutan bagi lingkungan.

Sebagian besar deforestasi di Indonesia terjadi di kawasan hutan produksi yang diduga akibat akses bebas alias *open access*. Oleh sebab itu, kegiatan pengelolaan hutan produksi menjadi penting dalam hal mitigasi deforestasi. Apabila terdapat area *open access* yang tinggi dalam kawasan HP maka ada indikasi menjadi rentan atas deforestasi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki area PBPH seluas 5.456.019,64 ha namun tidak keseluruhan area konsesi tersebut menjadi lokasi prioritas aksi mitigasi RO3. Pemilihan lokasi untuk kegiatan RO3 di provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 13. berikut.

**Tabel 13** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi tidak terencana dan yang terencana pada lahan konsesi

| No | Parameter | Degradasi Tidak Terencana                            | Degradasi Terencana       |
|----|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Kawasan   | PBPH                                                 | PBPH                      |
| 2  | IPL       | 7, 8, 9                                              | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3  | IJL       | Lindung, Rehabilitasi, dan Rehabilitasi Agroforestry | Produksi dan Konversi     |
|    | Catatan   | Telaah RKU/RKT                                       | Telaah RKU/RKT            |

Adapun rencana aksi mitigasi RO3 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 14 dan Tabel 15, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO3 dapat dilihat pada Lampiran 3.



**Tabel 14** | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi Di Konsesi

| Strategi (RO)                             | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program              | Program                                    | Kegiatan                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| R03.<br>Pencegahan Deforestasi di Konsesi | 77.122                        | HL; HPT; HP; dan APL       | Aksi Pengurangan Emisi      | P.1.Pengamanan kawasan hutan               | P.1.1 Patroli pengamanan kawasan hutan & pencegahan karhutla            |
|                                           |                               |                            | Aksi Mempertahankan Serapan | P.2.Pengelolaan kawasan                    | P.2.1 Penataan Areal kerja                                              |
|                                           |                               |                            |                             | P.3.Pengembangan RIL-C & Pengelolaan SILIN | P.2.2 Monitoring dan Evaluasi RKU/ RKT                                  |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.3.1 Penerapan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari                   |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.3.2 Sosialisasi dan komitmen untuk penerapan RIL C & SILIN            |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.3.3 Implementasi RIL C dan SILIN di PBPH                              |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.3.4 Pemberdayaan masyarakat mitra/binaan                              |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.3.5 Monev penerapan RIL C dan SILIN di PBPH                           |
|                                           |                               |                            | Aksi meningkatkan Serapan   | P.4.Rehabilitasi hutan dan lahan           | P.4.1 Rehabilitasi area bekas tebangan dan pemeliharaan tegakan tinggal |
|                                           |                               |                            | Kelembagaan                 | P.5.Pemberdayaan                           | P.4.2 Rehabilitasi lahan dengan pola agroforestri                       |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.5.1 Pengembangan Multi Usaha Kehutanan                                |
|                                           |                               |                            |                             |                                            | P.5.2 Kerjasama Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)                          |

**Tabel 15** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Konsesi

| R0  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                     | Pelaksana Kegiatan |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| R03 | P.1.1         | Patroli pengamanan kawasan hutan & pencegahan karhutla            | PHL                |
|     | P.2.1         | Penataan areal kerja                                              |                    |
|     | P.2.2         | Monitoring dan Evaluasi RKU/ RKT                                  |                    |
|     | P.3.1         | Penerapan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari                   |                    |
|     | P.3.2         | Sosialisasi dan komitmen untuk penerapan RIL C & SILIN            |                    |
|     | P.3.3         | Implementasi RIL C dan SILIN di PBPH                              |                    |
|     | P.3.4         | Pemberdayaan masyarakat mitra/binaan                              |                    |
|     | P.3.5         | Monev penerapan RIL C dan SILIN di PBPH                           |                    |
|     | P.4.1         | Rehabilitasi area bekas tebangan dan pemeliharaan tegakan tinggal |                    |
|     | P.4.2         | Rehabilitasi lahan dengan pola agroforestri                       |                    |
|     | P.5.1         | Pengembangan Multi Usaha Kehutanan                                |                    |
|     | P.5.2         | Kerjasama Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)                          |                    |

|  | Indikator Keberhasilan                                                             | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                    | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Telaksananya patroli pengamanan dan pencegahan karhutla                            | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Telaksananya penataan areal kerja                                                  | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Telaksananya monitoring dan evaluasi RKU/RKT                                       |             |      |      | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | 100% PBPH sudah tersertifikasi pengelolaan hutan lestari                           |             |      |      | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Telaksananya sosialisasi dan terbangunnya komitmen untuk penerapan RIL C dan SILIN | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | 100% PBPH melakukan RIL C dan SILIN                                                |             |      | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | 100% PBPH melakukan pemberdayaan masyarakat                                        | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Telaksananya monitoring dan evaluasi implementasi RIL C dan SILIN                  |             |      |      |      |      | X    | X    | X    |
|  | Telaksananya rehabilitasi area bekas tebangan dan pemeliharaan tegakan tinggal     | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Telaksananya rehabilitasi lahan dengan pola Agroforestri                           | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Telaksananya Pengembangan Multi Usaha Kehutanan                                    |             |      |      | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terbangunnya kerjasama kemitraan kehutanan (Kulin KK)                              | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |

### 3.4 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman – RO4

Pada kawasan PBPH HT seringkali terdapat potensi perluasan hutan tanaman pada lahan tidak produktif. Selain lahan tidak produktif, cukup banyak area kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat yang juga potensial untuk dikembangkan hutan tanaman. Namun demikian untuk mengembangkan kawasan tersebut tidaklah mudah karena adanya konflik tenurial dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan solusi penyelesaian persoalan lahan dalam konsesi, salah satunya melalui Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Penentuan lokasi prioritas untuk aksi mitigasi RO4 ini ditujukan untuk meningkatkan pembangunan hutan tanaman industri pada area konsesi PBPH-HT dan area PIAPS yang masuk ke dalam arahan IJLH produksi. Pembangunan Hutan Tanaman juga dapat berupa hutan alam dan restorasi ekosistem. Pemilihan lokasi untuk kegiatan RO4 di provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 16. berikut.

**Tabel 16** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman

| No             | Parameter       | Pembangunan Hutan Tanaman |
|----------------|-----------------|---------------------------|
| 1              | Kawasan         | PBPH-HT dan PIAPS (HTR)   |
| 2              | IPL             | 7,8,9                     |
| 3              | IJL             | Produksi dan Konversi     |
| 4              | Penutupan Lahan | Tidak Produktif           |
| <b>Catatan</b> |                 |                           |

Adapun rencana aksi mitigasi RO4 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO4 dapat dilihat pada Lampiran 4.

**Tabel 17** | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman

| Strategi (R0)                     | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program              | Program                                                                                  | Kegiatan |                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| R04.<br>Pembangunan Hutan Tanaman | 208.412                       | HPT; HP; HPK; dan APL      | Aksi Pengurangan Emisi      | P.1. Pembukaan Lahan Ramah Lingkungan                                                    | P.1.1    | Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar                                     |
|                                   |                               |                            | Aksi Mempertahankan Serapan | P.2. Pengamanan Kawasan                                                                  | P.2.1    | Penataan Areal Kerja                                                        |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.2.2    | Pemetaan wilayah rawan konflik tenurial                                     |
|                                   |                               |                            | Aksi meningkatkan Serapan   | P.3. Penilaian tingkat kesuburan lahan                                                   | P.3.1    | Penilaian tingkat kesuburan lahan                                           |
|                                   |                               |                            |                             | P.4. Penanaman dan perluasan hutan tanaman                                               | P.4.1    | Penanaman Hutan Tanaman dengan pola kemitraan antara PBPH dengan masyarakat |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.4.2    | Penanaman pada areal Pesetujuan Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)    |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.4.3    | Penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)                       |
|                                   |                               |                            | Kelembagaan                 | P.5. Fasilitasi percepatan pengembangan HTE pada PBPH sebanyak 22 PBPH hingga tahun 2030 | P.5.1    | Sosialisasi potensi Hutan Tanaman Energi (HTE) pada PBPH                    |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.5.2.   | pembangunan demplot HTE                                                     |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.5.3    | integrasi industry HTE                                                      |
|                                   |                               |                            |                             | P.6.Peningkatan Kapasitas SDM                                                            | P.6.1    | Fasilitasi dan Pembinaan/ penguatan aparatur KPH                            |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.6.2    | Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH (Kelompok Tani Hutan) di KPH     |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.6.3    | Pengembangan Multiusaha Kehutanan                                           |
|                                   |                               |                            |                             |                                                                                          | P.6.4    | Monitoring Evaluasi pada 16 KPHP                                            |

**Tabel 18** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman

| RO  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                               | Pelaksana Kegiatan |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| R04 | P.1.1         | Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar                                     | PSKL; PHL          |
|     | P.2.1         | Penataan Areal Kerja                                                        |                    |
|     | P.2.2         | Pemetaan wilayah rawan konflik tenurial                                     |                    |
|     | P.3.1         | Penilaian tingkat kesuburan lahan                                           |                    |
|     | P.4.1         | Penanaman Hutan Tanaman dengan pola kemitraan antara PBPH dengan masyarakat |                    |
|     | P.4.2         | Penanaman pada areal<br>Pesetujuan Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) |                    |
|     | P.4.3         | Penerapan sertifikasi<br>Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)                    |                    |
|     | P.5.1         | Sosialisasi Hutan Tanaman Eenergi (THE) pada PBPH                           |                    |
|     | P.5.2.        | pembangunan demplot HTE                                                     |                    |
|     | P.5.3         | integrasi industry HTE                                                      |                    |
|     | P.6.1         | Fasilitasi dan<br>Pembinaan/penguatan                                       |                    |

|  | Indikator Keberhasilan                                                      | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                             | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terlaksananya sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar di 16 KPHP            | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya penataan areal kerja di seluruh PBPH                          | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Tersedianya peta wilayah rawan konflik tenurial di 16 KPHP                  | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Penilaian tingkat kesuburan lahan                             | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya penanaman di PBPH-HT dengan pola kemitraan bersama masyarakat |             |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya penanaman pada PPHTR                                          |             |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | 100% PBPH memiliki sertifikasi pengelolaan hutan lestari                    |             |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya sosialisasi HTE pada 22-unit PBPH hingga tahun 2030           | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya demplot hutan tanaman energy                                   | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya integrasi industri hutan tanaman energy                        |             |      | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya fasilitasi dan penguatan kapasitas                            | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |



| RO | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan             | Pelaksana Kegiatan |
|----|---------------|---------------------------|--------------------|
|    |               | aparatur KPH              |                    |
|    | P.5.1         | Sosialisasi Hutan Tanaman |                    |
|    |               | Eenergi (THE) pada PBPH   |                    |
|    |               |                           |                    |
|    | P.5.2.        | pembangunan demplot HTE   |                    |
|    |               |                           |                    |
|    | P.5.3         | integrasi industry HTE    |                    |
|    |               |                           |                    |
|    | P.6.1         | Fasilitasi dan            |                    |
|    |               | Pembinaan/penguatan       |                    |
|    |               | aparatur KPH              |                    |

|  | Indikator Keberhasilan    | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                           | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | SDM di 16 KPHP            |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya sosialisasi |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | HTE pada 22-unit PBPH     | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | hingga tahun 2030         |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya demplot      | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | hutan tanaman energy      |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya integrasi    |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | industri hutan tanaman    |             |      | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | energy                    |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya fasilitasi  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | dan penguatan kapasitas   | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | SDM di 16 KPHP            |             |      |      |      |      |      |      |      |

### 3.5 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pengayaan Hutan Alam (*Enhanced natural regeneration, ENR*)

Kegiatan pengayaan (ENR) merupakan salah satu kegiatan mitigasi yang diharapkan dapat meningkatkan laju regenerasi alami hutan alam. Upaya mitigasi dengan meningkatkan laju serapan GRK melalui tindakan pengayaan (ENR) memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target NDC dan juga net sink 2030. Di dalam skenario menuju net sink 2030, laju regenerasi hutan sekunder di area konsesi yang seluas 0,313 juta hektar melalui pengayaan mencapai 2,5 tC/ha/tahun.

Pemilihan lokasi untuk diterapkan ENR adalah pada area dengan tutupan lahan hutan alam namun berada pada arahan konversi dan rehabilitasi mengindikasikan bahwa kondisi hutan sudah mengalami degradasi berat atau sudah berupa belukar. Kegiatan ENR juga diarahkan pada area konsesi yang tutupan lahannya berupa hutan alam dan masuk ke dalam arahan konservasi dan rehabilitasi, termasuk hutan sekunder di arahan produksi. Di provinsi Kalimantan Tengah, pemilihan lokasi untuk kegiatan RO5 dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut.

**Tabel 19 |** Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Pengayaan Hutan Alam (*Enhanced natural regeneration, ENR*)

| No | Parameter       | Kriteria I                                           | Kriteria II                                          |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Kawasan         | HK, HL, HP, (HP, HPT, HPK tanpa konsesi) dan PIAPS   | PBPH                                                 |
| 2  | Tanah           | Gambut dan Mineral                                   | Gambut dan Mineral                                   |
| 3  | IPL             | 7, 8, 9                                              | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                            |
| 4  | IJL             | Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan konversi | Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan konversi |
| 5  | Penutupan Lahan | Hutan alam primer dan sekunder                       | Hutan alam primer dan sekunder                       |
|    | Catatan         |                                                      |                                                      |

Adapun rencana aksi mitigasi RO5 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO5 dapat dilihat pada Lampiran 5.

**Tabel 20** | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam

| Strategi (RO)                                   | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan             | Tujuan Program                  | Program                                          |       | Kegiatan                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| R0.5<br>Penerapan<br>Pengayaan<br>Hutan<br>Alam | 553.053                       | KK; HL;<br>HPT; HP;<br>HPK; dan<br>APL | Aksi<br>pengurangan emisi       | P.1<br>Pemulihan<br>Ekosistem                    | P.1.1 | Sosialisasi tentang Pengayaan Hutan Alam paska kebakaran     |
|                                                 |                               |                                        |                                 |                                                  | -     | -                                                            |
|                                                 |                               |                                        | Aksi<br>meningkatkan<br>serapan | P.2.Rehabilitasi/<br>Reforestasi                 | P.2.1 | Rehab DAS                                                    |
|                                                 |                               |                                        |                                 |                                                  | P.2.2 | Penanaman/Pengkayaan pada areal bekas tebangan               |
|                                                 |                               |                                        |                                 |                                                  | P.2.3 | Penanaman pada areal lahan kosong dan bekas terbakar         |
|                                                 |                               |                                        |                                 |                                                  | P.2.4 | Penanaman pada Kawasan Hutan HL, HPT, HP, HPK                |
|                                                 |                               |                                        |                                 |                                                  | P.2.5 | Penanaman pada areal PIAPS & PS                              |
|                                                 |                               |                                        |                                 |                                                  | P.2.6 | Penanamankawasan hutan dengan pola kemitraan masyarakat      |
|                                                 |                               |                                        | Kelembagaan                     | P.3.<br>Pengembangan<br>Multi Usaha<br>Kehutanan | P.3.1 | Pengembangan multi usaha kehutanan melalui pola agroforestri |

**Tabel 21** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam

| RO  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                             | Pelaksana Kegiatan                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| R05 | P.1.1         | Sosialisasi tentang<br>Pengayaan Hutan Alam<br>paska kebakaran            | KSDAE;<br><br>PSKL; PHL;<br>PEMDA |
|     | P.2.1         | Rehab DAS                                                                 |                                   |
|     | P.2.2         | Penanaman/Pengkayaa n pada areal bekas<br>tebangan                        |                                   |
|     | P.2.3         | Penanaman pada areal<br><br>lahan kosong dan<br>bekas terbakar            |                                   |
|     | P.2.4         | Penanaman pada Kawasan Hutan HL,<br>HPT, HP, HPK                          |                                   |
|     | P.2.5         | Penanaman pada areal<br><br>PIAPS & PS                                    |                                   |
|     | P.2.6         | Penanaman kawasan hutan dengan pola<br>kemitraan masyarakat               |                                   |
|     | P.3.1         | Pengembangan multi<br>usaha kehutanan<br><br>melalui pola<br>agroforestri |                                   |

|  | Indikator Keberhasilan                                                     | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                            | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terlaksananya sosialisasi Pengayaan Hutan Alam paska kebakaran             | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksanananya rehabilitasi DAS                                           |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya penanaman /pengkayaan pada areal bekas tebangan              |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Terlaksananya penanaman pada areal lahan kosong dan bekas terbakar         |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya penanaman pada kawasan HL, HPT, HP, HPK                      |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Terlaksananya penanaman pada areal PIAPS & PS                              |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Terlaksananya penanaman dengan pola kemitraan masyarakat                   | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Terlaksananya pengembangan multi usaha kehutanan melalui pola agroforestri | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |

### 3.6 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C

*Reduced Impact Logging-Carbon* (RIL-C) merupakan teknik pemanenan hutan dengan dampak rendah karbon yang bertujuan untuk mendapatkan volume produksi sesuai target tanpa melakukan degradasi hutan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan stok karbon hutan. Kegiatan RIL-C ini terutama dilakukan pada area dengan tutupan hutan alam primer yang masuk arahan produksi dan berada di konsesi PBPH-HA. Pada area tersebut, RIL dapat diterapkan pada hutan primer dan pada hutan alam sekunder dilakukan dengan teknik SILIN (Tebang Pilih Tanam Rumpang, Tebang Pilih Tanam Jalur). Selain pada PBPH HA, RIL-C juga dapat diterapkan pada area PBPH HT yang berhutan alam. Hal ini memungkinkan karena adanya kebijakan multi usaha kehutanan.

Di provinsi Kalimantan Tengah, pemilihan lokasi untuk kegiatan RO6 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 22. berikut.

**Tabel 22** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Penerapan RIL-C

| No | Parameter       | Pembangunan Hutan Tanaman      |
|----|-----------------|--------------------------------|
| 1  | Kawasan         | PBPH                           |
| 2  | IPL             | 1,2,3,4,5,6,7,8,9              |
| 3  | IJL             | Produksi                       |
| 4  | Penutupan Lahan | Hutan alam primer dan sekunder |
|    | <b>Catatan</b>  |                                |

Adapun rencana aksi mitigasi RO6 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 23 dan Tabel 24, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO6 dapat dilihat pada Lampiran 6.





| Program                                               |       | Kegiatan                                                                                    |   |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| -                                                     | -     | -                                                                                           | - |
| P1. Pembukaan Hutan                                   | P.1.1 | Pembukaan wilayah hutan secara terencana pada PBPH-HA/ HT                                   |   |
|                                                       | P.1.2 | Penentuan Sistem Silvikultur sesuai karakteristik tapak (TPTI/ TPTJ/SILIN) pada PBPH-HA/ HT |   |
|                                                       | P.1.3 | Penerapan RIL dan RIL-C pada PBPH-HA/ HT                                                    |   |
|                                                       | P.1.4 | Pemanenan berbasis kearifan lokal setempat pada areal Hutan Desa                            |   |
|                                                       | P.1.5 | Patroli perlindungan dan pengamanan hutan                                                   |   |
|                                                       | P.1.6 | Sosialisasi Sistem Silvikultur dan Praktek RIL C                                            |   |
| -                                                     | -     | -                                                                                           | - |
| P2. Pembuatan Peta Areal Kerja dan Penyusunan Rencana | P.2.1 | Pembuatan Peta Areal Kerja menyeluruh pada PBPH-HA/ HT                                      |   |
|                                                       | P.2.2 | Penyusunan Rencana Penebangan pada PBPH-HA/ HT                                              |   |
| P3. Pelaporan implementasi PHL                        | P.3.1 | Pelaporan Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH-HA/ HT                                        |   |
| P.4.Peningkatan SDM                                   | P.4.1 | Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH-HA/ HT                                 |   |
|                                                       | P.4.2 | Peningkatan kapasitas SDM pelaksana RIL C                                                   |   |
|                                                       | P.4.3 | Pembinaan masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu                      |   |
|                                                       | P.4.4 | Pembinaan dan pendampingan PBPH                                                             |   |
|                                                       | P.4.5 | Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon                                           |   |
| P.5.Pemberdayaan Masyarakat                           | P.5.1 | Pengembangan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHHK bersama masyarakat pada PBPH-RE        |   |
|                                                       | P.5.2 | Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu                                    |   |

| Strategi (R0) | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|               |                               |                            |                |

**Tabel 24** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Penerapan RIL C

| R0  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                              | Pelaksana Kegiatan |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| R06 | P.1.1         | Pembukaan wilayah Hutan secara terencana pada PBPH- HA/ HT                                 | PSKL; PHL; PEMDA   |
|     | P.1.2         | Penentuan Sistem Silvikultur sesuai karakteristik Tapak (TPTI/TPTJ/SILIN) pada PBPH-HA/ HT |                    |
|     | P.1.3         | Penerapan RIL dan RIL-C pada PBPH-HA/ HT                                                   |                    |
|     | P.1.4         | Pemanenan dengan menggunakan kearifan lokal setempat pada areal hutan desa                 |                    |
|     | P.1.5         | Patroli perlindungan dan pengamanan hutan                                                  |                    |
|     | P.1.6         | Sosialisasi Sistem Silvikultur dan Praktek RIL C                                           |                    |
|     | P.2.1         | Pembuatan Peta Areal Kerja menyeluruh pada PBPH-HA/ HT                                     |                    |
|     | P.2.2         | Penyusunan Rencana Penebangan pada PBPH-HA/ HT                                             |                    |

| Program                      | Kegiatan                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| P.6. Monitoring dan Evaluasi | P.6.1 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH) |

| Indikator Keberhasilan                                                   | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                          | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 100% PBPH-HA/HT melakukan pembukaan wilayah hutan sesuai rencana         | X           | X    |      |      |      |      |      |      |
| 100% PBPH-HA/HT menerapkan sistem Silvikultur sesuai karakteristik lahan |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
| 100% PBPH-HA/ HT menerapkan RIL dan RIL-C                                |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
| 100% Hutan Desa melakukan praktek pemanenan berbasis kearifan lokal      |             |      | X    | X    | X    | X    | X    |      |
| Terlaksananya patroli perlindungan dan pengamanan hutan                  |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
| Terlaksananya sosialisasi Sistem Silvikultur dan Praktek RIL C           | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
| 100% PBPH-HA/ HT memiliki Peta Areal Kerja                               | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
| 100% PBPH-HA/ HT memiliki Rencana Penebangan                             | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |

| RO | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                        | Pelaksana Kegiatan |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | P.3.1         | Penyusunan Laporan dan Monev Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH-HA/HT               |                    |
|    | P4.1          | Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH- HA/ HT                         |                    |
|    | P.4.2         | Peningkatan kapasitas SDM                                                            |                    |
|    | P.4.3         | Pembinaan masyarakat desa hutan pemanfaatan hasil hutan non-kayu                     |                    |
|    | P.4.4         | Pembinaan dan pendampingan PBPH                                                      |                    |
|    | P.4.5         | Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon                                    |                    |
|    | P.5.1         | Pengembangan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHBK bersama masyarakat pada PBPH-RE |                    |
|    | P.5.2         | Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu                             |                    |
|    | P.6.1         | Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH)                       |                    |

| Indikator Keberhasilan                                                              | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                     | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 100% PBPH-HA/HT melakukan pelaporan dan money Pengelolaan Hutan Lestari             |             |      |      | X    | X    | X    | X    | X    |
| Terlaksananya Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH-HA/ HT           |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
| Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM                                    | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
| Terlaksananya Pembinaan masyarakat desa hutan dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu  | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
| Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan PBPH                                       | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
| Terlaksananya Bimbingan teknis perhitungan nilai ekonomi karbon                     | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
| Terbangunnya percontohan Multi Usaha Kehutanan dan produksi HHBK bersama masyarakat |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
| Terbangunnya Pengembangan industry Primer Kehutanan berbasis non kayu               |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
| Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan (KPH & PBPH)        |             |      |      |      | X    | X    | X    | X    |

### 3.7 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi – RO7

Salah satu aksi mitigasi untuk meningkatkan serapan emisi adalah melalui kegiatan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan utama penyelenggaraan RHL adalah menurunkan deforestasi/degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air. Kegiatan RHL dengan rotasi adalah salah satu upaya pemulihan lahan dengan sekaligus meningkatkan fungsi produksi.

Pemilihan lokasi prioritas untuk RHL dengan rotasi adalah area dengan IPL tinggi yang tutupan lahannya tidak produktif, lahan budidaya semusim dan perkebunan yang masuk ke dalam arahan produksi dan berada pada kawasan hutan produksi dan bukan merupakan lahan gambut. Apabila pada lahan gambut, maka diarahkan untuk restorasi. Dari aspek penanggungjawab, rehabilitasi untuk rotasi di area APL merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sedangkan di dalam area konsesi merupakan tanggungjawab pemegang izin dan dalam kawasan hutan non konsesi oleh Pemerintah Pusat (KLHK). Arahan pemilihan lokasi untuk kegiatan RO7 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 25 berikut.

**Tabel 25** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi

| No | Parameter       | Kriteria I                               | Kriteria II                  | Kriteria III                 | Kriteria IV     |
|----|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1  | Kawasan         | (HP, HPT, HPK) tanpa PBPH, PIAPS (HTR)   | PBPH                         | PBPH-HA, PBPH-RE             | APL dan HGU     |
| 2  | Tanah           | Mineral                                  | Mineral                      | Mineral                      | Mineral         |
| 3  | IPL             | 7, 8, 9                                  | 1, 2, 3, 4, 5,<br>6, 7, 8, 9 | 1, 2, 3, 4, 5,<br>6, 7, 8, 9 | 7, 8, 9         |
| 4  | IJL             | Produksi dan Konversi                    | Produksi dan Konversi        | Produksi dan Konversi        | Produksi        |
| 5  | Penutupan Lahan | Perkebunan, Budidaya dan Tidak Produktif | Perkebunan dan Budidaya      | Tidak Produktif              | Tidak Produktif |
|    | Catatan         |                                          |                              |                              |                 |

Adapun rencana aksi mitigasi RO7 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 26 dan Tabel 27, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO7 dapat dilihat pada Lampiran 7.

**Tabel 26 |** Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi

| Strategi (R0) | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program   | Program       | Kegiatan |                                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| R07           | 1.891.417                     | HL; HPT; HP;               | Aksi Peningkatan | P.1.Penanaman | P.1.1    | Penanaman pada Areal KPH             |
| Peningkatan   |                               | HPK; dan                   | Serapan          |               | P.1.2    | Penanaman pada Areal PBPH            |
| Cadangan      |                               | APL                        |                  |               | P.1.3    | Penanaman pada Areal PS              |
| Karbon dengan |                               |                            |                  |               | P.1.4    | Penanaman pada Areal PIAPS           |
| Rotasi        |                               |                            |                  |               | P.1.5    | Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU |

**Tabel 27 |** Tata Waktu Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi

| R0  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                        | Pelaksana Kegiatan | Indikator Keberhasilan                   | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |               |                                      |                    |                                          | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| R07 | P.1.1         | Penanaman pada Areal KPH             | PSKL; PHL; PEMDA   | Terlaksananya Penanaman pada Areal KPH   |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|     | P.1.2         | Penanaman pada Areal PBPH            |                    | Terlaksannaya Penanaman pada Areal PBPH  |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|     | P.1.3         | Penanaman pada Areal PS              |                    | Telaksananya Penanaman pada Areal PS     |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|     | P.1.4         | Penanaman pada Areal PIAPS           |                    | Terlaksananya Penanaman pada Areal PIAPS |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|     | P.1.5         | Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU |                    | Penanaman pada Areal HGU dan Non HGU     |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |



### 3.8 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi – RO8

Kegiatan peningkatan cadangan karbon non rotasi adalah kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon yang tidak dipanen kayunya (non-rotasi). Kegiatan ini terutama dilakukan pada area hutan lindung dan hutan konservasi, selain itu juga pada hutan produksi yang belum dibebani izin, area PBPH HT dan area perhutanan sosial.

Area di luar kawasan hutan konservasi dan lindung yang menjadi sasaran kegiatan rehabilitasi tanpa rotasi umumnya memiliki nilai konservasi tinggi karena kemungkinan merupakan area perlintasan satwa. Mekanisme penentuan lokasi prioritas kegiatan rehabilitasi ini dinilai berdasarkan kondisi lahan kritis dan DAS yang dipulihkan yang merujuk pada Peraturan Menteri LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa prioritas pelaksanaan RHL adalah pada lahan kritis, lahan terbuka dan atau lahan bekas kebakaran dan juga memperhatikan tingkat rawan bencana dan status DAS sebagai DAS prioritas yang merupakan wilayah tangkapan air untuk danau, dam, bendungan atau waduk termasuk sempadan dan dapat juga merupakan wilayah tujuan wisata nasional atau ekosistem tertentu seperti mangrove dan gambut.

Arahan pemilihan lokasi untuk kegiatan RO8 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 28 berikut.

**Tabel 28** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon non-Rotasi

| No             | Parameter       | Kriteria I                                      | Kriteria II                                     | Kriteria III                                             |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1              | Kawasan         | (HP, HPT, HPK) tanpa PBPH dan PIAPS (non HTR)   | PBPH                                            | HL (tanpa PBPH)                                          |
| 2              | Tanah           | Mineral                                         | Mineral                                         | Mineral                                                  |
| 3              | IPL             | 7, 8, 9                                         | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                       | 7, 8, 9                                                  |
| 4              | IJL             | Lindung Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry | Lindung Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry | Lindung Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry          |
| 5              | Penutupan Lahan | Perkebunan, Budidaya dan Tidak Produktif        | Perkebunan, Budidaya, dan Tidak Produktif       | Hutan Tanaman, Perkebunan, Budidaya, dan Tidak Produktif |
| <b>Catatan</b> |                 |                                                 |                                                 |                                                          |

| No | Parameter | Kriteria I       | Kriteria II     | Kriteria III    |
|----|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Kawasan   | HK               | PIAPS (di HL)   | APL dan HGU     |
| 2  | Tanah     | Mineral          | Mineral         | Mineral         |
| 3  | IPL       | 7, 8, 9          | 7, 8, 9         | 7, 8, 9         |
| 4  | IJL       | Lindung,         | Lindung,        | Lindung,        |
|    |           | Produksi         | Produksi        | Rehabilitasi,   |
|    |           | Rehabilitasi,    | Rehabilitasi,   | Rehabilitasi    |
|    |           | Rehabilitasi     | Rehabilitasi    | Agroforestry    |
|    |           | Agroforestry dan | Agroforestry    |                 |
|    |           | Konversi         |                 |                 |
| 5  | Penutupan | Hutan tanaman,   | Hutan           | Tidak Produktif |
|    | Lahan     | Perkebunan,      | tanaman,        |                 |
|    |           | Budidaya, dan    | Perkebunan,     |                 |
|    |           | Tidak produktif  | Budidaya, dan   |                 |
|    |           |                  | Tidak Produktif |                 |
|    | Catatan   |                  |                 |                 |

Adapun rencana aksi mitigasi RO8 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 29 dan Tabel 30, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO8 dapat dilihat pada Lampiran 8.



| Program                                                                                                  |  | Kegiatan |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.1.Penanaman                                                                                            |  | P.1.1    | Penanaman pada Kawasan hutan konservasi dan hutan lindung                                                                                               |
|                                                                                                          |  | P.1.2    | Penanaman pada Areal KPH dan PIAPS                                                                                                                      |
|                                                                                                          |  | P.1.3    | Penanaman pada Areal PBPH                                                                                                                               |
|                                                                                                          |  | P.1.4    | Penanaman pada Areal APL HGU dan Non HGU                                                                                                                |
| P.2 Pembentukan Kelembagaan Sub Nasional Implementasi Folu Net Sink Kalimantan Tengah                    |  | P.2.1    | Membentuk komisi Daerah Folu Net Sink 2022 sd 2030/ Forum Koordinasi Folu Net Sink/ POKJA                                                               |
|                                                                                                          |  | P.2.2    | Membentuk secretariat Folu Net Sink                                                                                                                     |
|                                                                                                          |  | P.2.3    | Membentuk sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRF) untuk Sub Nasional                                                                          |
|                                                                                                          |  | P.2.4    | Membangun pertemuan/ media komunikasi dalam rangka Monev Pelaksanaan Folu Net Sink Regional Kalimantan Tengah                                           |
| P.3 Penguatan Kelembagaan Sub Nasional (Anggota Komda, OPD dari tingkat Kabupaten/ Kota) Provinsi hingga |  | P.3.1    | Memperkuat kelembagaan sitem MRF dengan membangun pusat pelatihan untuk pemantauan, penilaian/ pengukuran emisi karbon pada kawasan hutan dan non hutan |
|                                                                                                          |  | P.3.2    | Memperkuat Perangkat Laboratorium, uji analitik, metode riset untuk pengukuran atau monitoring emisi karbon pada kawasan hutan dan non hutan            |
|                                                                                                          |  | P.3.3    | Menyusun dan memperbaharui sistem impormasi pelaksanaan Folu Net Sink Kalimantan Tengah                                                                 |
|                                                                                                          |  | P.3.4    | Membangun Kerjasama untuk pengembangan teknologi dan pengembangan ilmu terapan dengan lembaga penelitian                                                |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|                      |                                                                   |       |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.4 dalam            | Memperkuat kebijakan daerah rangka pelaksanaan FoLU Net Sink 2030 | P4.1  | Membangun payung hukum untuk implementasi FoLU Net Sink di Level Provinsi (Peraturan Gubernur/ Perda)                                                                          |
|                      |                                                                   | P4.2  | Meninjau kembali izin-izin yang tidak procedural, melakukan legal audit dan <i>legal Compliance</i> usaha kehutanan, perkebunan dan petambangan implementasi P23/24 tahun 2021 |
|                      |                                                                   | P4.3  | Mengharmonisasikan kebijakan dan mensinergikan regulasi sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan dan peternakan.                           |
| P.5 Resolusi Konflik |                                                                   | P.5.1 | Meningkatkan status pengelolaan dan penguasaan lahan masyarakat melalui TORA dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap                                                    |
|                      |                                                                   | P.5.2 | Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Wilayah Adat serta pembuatan peta indikasi wilayah adat serta Hutan Adat                                                                 |

**Tabel 30** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi

| RO  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                                              | Pelaksana Kegiatan         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| R08 | P.1.1         | Penanaman pada<br>Kawasan hutan<br>konservasi dan hutan<br>lindung                                                         | KSDAE; PSKL;<br>PHL; PEMDA |
|     | P.1.2         | Penanaman pada Areal<br>KPH dan PIAPS                                                                                      |                            |
|     | P.1.3         | Penanaman pada Areal PBPH                                                                                                  |                            |
|     | P.1.4         | Penanaman pada Areal<br>APL HGU dan Non HGU                                                                                |                            |
|     | P.2.1         | Membentuk komisi<br>Daerah Folu Net Sink<br>2022 sd 2030/ Forum<br>Koordinasi Folu Net<br>Sink/ POKJA                      |                            |
|     | P.2.2         | Membentuk sekretariat<br>Folu Net Sink                                                                                     |                            |
|     | P.2.3         | Membentuk sistem pemantauan, pelaporan<br>dan verifikasi (MRF) untuk Sub Nasional                                          |                            |
|     | P.2.4         | Membangun pertemuan/<br>media komunikasi dalam rangka Monev Pelaksanaan Folu Net<br>Sink Regional<br><br>Kalimantan Tengah |                            |
|     | P.3.1         | Memperkuat<br>kelembagaan sitem MRF<br>dengan membangun<br>pusat pelatihan untuk<br>pemantauan, penilaian/                 |                            |





|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
|       |  | pengukuran emisi             |  |
|       |  | karbon pada kawasan          |  |
|       |  | hutan dan non hutan          |  |
| P.3.2 |  | Memperkuat Perangkat         |  |
|       |  | Laboratorium, uji            |  |
|       |  | analitik, metode riset       |  |
|       |  | untuk pengukuran atau        |  |
|       |  | monitoring emisi karbon      |  |
|       |  | pada kawasan hutan dan       |  |
|       |  | non hutan                    |  |
| P.3.3 |  | Menyusun dan                 |  |
|       |  | memperbaharui sistem         |  |
|       |  | impormasi pelaksanaan        |  |
|       |  | Folu Net Sink                |  |
|       |  | Kalimantan Tengah            |  |
|       |  |                              |  |
| P.3.4 |  | Membangun Kerjasama          |  |
|       |  | untuk pengembangan           |  |
|       |  | teknologi dan                |  |
|       |  | pengembangan ilmu            |  |
|       |  | terapan dengan lembaga       |  |
|       |  | penelitian                   |  |
| P4.1  |  | Membangun payung             |  |
|       |  | hukum untuk                  |  |
|       |  | implementasi Folu Net        |  |
|       |  | Sink di Level Provinsi       |  |
|       |  | (Peraturan Gubernur/         |  |
|       |  | Perda)                       |  |
| P4.2  |  | Meninjau kembali izin-       |  |
|       |  | izin yang tidak              |  |
|       |  | prosedural, melakukan        |  |
|       |  | legal audit dan <i>legal</i> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standarisasi perangkat analitik/ laboratorium untuk pengukuran Karbon terpenuhi                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Terbangunnya sistem informasi terstruktur dan sistematis guna mendukung kegiatan Folu Net Sink Kalimantan Tengah (terbangunnya pusat Data Base) Terealisasikannya kerjasama dalam pengembangan teknologi dan ilmu terapan Folu Net Sink dengan lembaga pendidikan/ penelitian |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Terbentuknya payung Hukum sebagai landasan kerja Implementasi Folu Net Sink Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Terlaksananya audit atas izin-izin yang tidak procedural dan dilaksanakan penegakan                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |       |                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |       | <i>Compliance</i> usaha                                                                                                                                                   |  |
|  |       | kehutanan, perkebunan<br>dan petambangan<br>implementasi P23/24<br>tahun 2021                                                                                             |  |
|  | P4.2  | Mengharmonisasikan<br>kebijakan dan<br>mensinergikan regulasi<br>sektor kehutanan,<br>perkebunan, pertanian,<br>pertambangan,<br>perkebunan, perikanan<br>dan peternakan. |  |
|  | P.5.1 | Meningkatkan status<br>pengelolaan dan<br>penguasaan lahan<br>masyarakat melalui<br>TORA dan PTSL<br>(Pendaftaran Tanah<br>Sistematis Lengkap                             |  |
|  | P.5.2 | Identifikasi, Verifikasi dan<br>Validasi Wilayah Adat<br>serta pembuatan peta<br>indikasi wilayah adat<br>serta Hutan Adat                                                |  |
|  |       |                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hukum/sanksi sesuai                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| dengan ketentuan yang                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
| berlaku                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Terciptanya harmonisasi<br>kebijakan antar sektoral                                                                                                          | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kepastian status pengelolaan/ penguasaan lahan secara legal<br>untuk masyarakat                                                                              | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Terwujudnya pengakuan<br>dan perlindungan<br>masyarakat Hukum adat<br>melalui proses<br>identifikasi, verifikasi dan<br>validasi MHA di Kalimantan<br>tengah | X | X | X | X | X | X | X | X |

### 3.9 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut Gambut – RO9

Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari dekomposisi dan kebakaran pada lahan gambut terutama dilakukan melalui rangkaian kegiatan pembasahan (rewetting) dan penghijauan kembali (revegetasi). Kegiatan ini difokuskan pada lahan gambut dalam yang saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian serta pada lahan yang tidak produktif. Termasuk dalam kegiatan ini ialah upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui perbaikan pengelolaan tata air gambut di area perkebunan (HGU) dan hutan tanaman industri (PBPH).

Penunjukkan lokasi pengelolaan tata air gambut diprioritaskan pada area konsesi dan HGU yang tutupan lahannya sudah menjadi hutan tanaman dan perkebunan. Pada lokasi tersebut selanjutnya dilakukan pengawasan secara ketat terhadap pemegang konsesi dalam pengelolaan tata air sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2017. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah, arahan pemilihan lokasi untuk kegiatan RO9 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 31 berikut.

**Tabel 31** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Pengelolaan tata air gambut

| No      | Parameter       | Kriteria I                                                                      | Kriteria II                                                                 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Kawasan         | PBPH-HT                                                                         | APL dan HGU                                                                 |
| 2       | Tanah           | Gambut                                                                          | Gambut                                                                      |
| 3       | IPL             | 7, 8, 9                                                                         | 7, 8, 9                                                                     |
| 4       | IJL             | Lindung, Produksi Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan Konversi, dan APL | Lindung, Produksi Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry, Konversi dan APL |
| 5       | Penutupan Lahan | Hutan tanaman                                                                   | Perkebunan                                                                  |
| Catatan |                 | -                                                                               | -                                                                           |

Adapun rencana aksi mitigasi RO9 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 32 dan Tabel 33. sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO9 dapat dilihat pada Lampiran 9.

**Tabel 32** | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut

| Strategi (R0)                            | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan             | Tujuan Program                          | Program                                                 | Kegiatan |                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| R09<br>Pengelolaan<br>Tata Air<br>Gambut | 218.101                       | KK; HL;<br>HPT; HP;<br>HPK;<br>dan APL | Aksi<br>Mengurangi Emisi                | -                                                       | -        | -                                                               |
|                                          |                               |                                        | Aksi<br>Mempertahankan<br>Serapan Emisi | P.1. Pembuatan<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Sekat kanal    | P.1.1    | Pembuatan sekat kanal pada APL                                  |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.1.2    | Pembuatan sekat kanal pada areal TNTP                           |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.1.3    | Pemeliharaan sekat kanal dan sumur Bor di areal konservasi      |
|                                          |                               |                                        | Aksi<br>Meningkatkan<br>Serapan Emisi   | P.2.<br>Pengamanan<br>Hutan                             | P.2.1    | Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi          |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.3.1    | Revegetasi lahan gambut pada kawasan hutan                      |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.3.2    | Revegetasi lahan gambut pada APL                                |
|                                          |                               |                                        | Kelembagaan                             | P.3.3<br>Restorasi lahan gambut pada areal konsesi PBPH | P.3.3    | Restorasi lahan gambut pada areal konsesi PBPH                  |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.4.1    | Penerapan kegiatan Paludikultur atau teknik silvikultur lainnya |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.5.1    | Pemberdayaan masyarakat sekitar area konsesi                    |
|                                          |                               |                                        |                                         |                                                         | P.5.2    | Penerapaaan skema multiusaha                                    |

**Tabel 33** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut

| RO  | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                   | Pelaksana Kegiatan      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R09 | P.1.1         | Pembuatan sekat kanal pada APL                                  | KSDAE; PSKL; PHL; PEMDA |
|     | P.1.2         | Pembuatan sekat kanal pada areal TNTP                           |                         |
|     | P.1.3         | Pemeliharaan sekat kanal dan sumur bor di areal konservasi      |                         |
|     | P.2.1         | Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi          |                         |
|     | P.3.1         | Revegetasi lahan gambut pada kawasan hutan                      |                         |
|     | P.3.2         | Revegetasi lahan gambut pada APL                                |                         |
|     | P.3.3         | Restorasi lahan gambut pada areal konsesi PBPH                  |                         |
|     | P.4.1         | Penerapan kegiatan Paludikultur atau teknik silvikultur lainnya |                         |
|     | P.5.1         | Pemberdayaan dan sosialisasi lahan gambut pada areal konservasi |                         |
|     | P.5.2         | Penerapan skema multiusaha                                      |                         |

|  | Indikator Keberhasilan                                                                | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                       | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terlaksananya pembangunan sekat kanal pada APL                                        | X           | X    |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Pembangunan sekat kanal pada areal TNTP                                 |             | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya pemeliharaan Pemeliharaan sekat kanal dan sumur bor di areal konservasi |             |      | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Terlaksanya patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi                    | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | Revegetasi lahan gambut pada kawasan hutan                                            |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya Revegetasi lahan gambut pada APL                                        |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya Restorasi lahan gambut pada areal konsesi PBPH                          |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terbangunnya ujicoba penanaman dengan Paludikultur atau teknik silvikultur lainnya    |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terlaksananya pemberdayaan dan sosialisasi lahan gambut pada areal konservasi         | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terlaksananya skema multiusaha                                                        |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |



### 3.10 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Restorasi Gambut – RO10

Berbeda dengan aksi mitigasi perbaikan tata air gambut yang dilakukan di area PBPH dan HGU, kegiatan restorasi lahan gambut dilakukan di kawasan APL, wilayah konsesi, dan seluruh kawasan KPH, yang memiliki tutupan lahan tidak produktif, budidaya, dan perkebunan yang berada di semua fungsi kawasan dan semua arahan. Kegiatan restorasi pada area yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya semusim dan perkebunan yang ada di luar konsesi diarahkan untuk memulihkan kembali fungsi gambut dengan mengembangkan pola budidaya paludikultur dan teknik silvikultur lainnya yang memungkinkan berdasarkan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk area yang tutupan lahan tidak produktif diarahkan untuk kegiatan restorasi yang dapat mendorong atau mempercepat regenerasi secara alami maupun secara buatan dengan pengayaan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan restorasi ikut menentukan keberhasilan dalam menurunkan emisi dari kebakaran gambut yang menjadi sumber emisi gas rumah kaca nasional terbesar. Oleh sebab itu, hanya dengan kegiatan restorasi gambut masalah penurunan muka air tanah gambut dapat diatasi khususnya pada musim kemarau panjang sehingga risiko kebakaran dapat dikurangi. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah, arahan pemilihan lokasi untuk kegiatan RO10 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 34 berikut.

**Tabel 34** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi restorasi gambut

| No      | Parameter       | Kriteria I                                                             | Kriteria II                                                            | Kriteria III                                                           | Kriteria IV                                                            |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Kawasan         | HK, HL, HP (HP, HPT, HPK tanpa konsesi) dan PIAPS                      | PBPH-HT                                                                | PBPH-HA, PBPH-RE                                                       | APL dan HGU                                                            |
| 2       | Tanah           | Gambut                                                                 | Gambut                                                                 | Gambut                                                                 | Gambut                                                                 |
| 3       | IPL             | 7, 8, 9                                                                | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                              | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                              | 7, 8, 9                                                                |
| 4       | IJL             | Lindung, Produksi Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan Konversi | Lindung, Produksi Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan Konversi | Lindung, Produksi Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan Konversi | Lindung, Produksi Rehabilitasi, Rehabilitasi Agroforestry dan Konversi |
| 5       | Penutupan Lahan | Hutan tanaman, Perkebunan, Budidaya, dan Tidak Produktif               | Perkebunan, Budidaya, dan Tidak Produktif                              | Hutan tanaman, Perkebunan, Budidaya, dan Tidak Produktif               | Budidaya dan Tidak Produktif                                           |
| Catatan |                 |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |

Adapun rencana aksi mitigasi RO10 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 35 dan Tabel 36, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO10 dapat dilihat pada Lampiran 10.

**Tabel 35** | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut

| Strategi (R0)                            | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan    | Tujuan Program                  | Program                      | Kegiatan |                                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| R010<br><br>Pelaksanaan restorasi gambut | 1.047.887                     | KK; HL; HPT; HP; HPK; dan APL | Aksi mempertahankan kan serapan | P.1. Pemulihan Ekosistem     | P.1.1    | Pembuatan sumur bor, sekat kanal dan kanal timbun di dalam kawasan hutan dan APL |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.1.2    | Inventarisasi kanal yang akan diintervensi                                       |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.1.3    | Pembuatan infrastruktur pembahasan gambut                                        |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.1.4    | Penimbunan kanal terbuka                                                         |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.1.5    | Pembangunan sumur bor                                                            |
|                                          |                               |                               | Aksi peningkatan serapan        | P.2. Penanaman Lahan Gambut  | P.2.1    | Penerapan Paludikultur dan teknik silvikultur pada areal PBPH                    |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.2.2    | Revegetasi area terbuka dan lahan bekas terbakar                                 |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.2.3    | Pemeliharaan sekat kanal                                                         |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.2.4    | Penanaman intensif dalam rangka pemulihan pada ekosistem gambut                  |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.2.5    | Revegetasi di dalam kawasan hutan di luar TN                                     |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.2.6    | Revegetasi di APL                                                                |
|                                          |                               |                               | Aksi Kelembagaan                | P.3. Pemberdayaan Masyarakat | P.3.1    | Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan restorasi gambut                        |
|                                          |                               |                               |                                 |                              | P.3.2    | Pembangunan dan pembinaan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)                      |

**Tabel 36** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut

| RO   | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                    | Pelaksana Kegiatan      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R010 | P.1.1         | Pembuatan sumur bor, sekat kanal dan kanal timbun di dalam kawasan hutan dan APL | KSDAE; PSKL; PHL; PEMDA |
|      | P.1.2         | Inventarisasi kanal yang akan diintervensi                                       |                         |
|      | P.1.3         | Pembuatan infrastruktur pembahasan gambut                                        |                         |
|      | P.1.4         | Penimbunan kanal terbuka                                                         |                         |
|      | P.1.5         | Pembangunan sumur bor                                                            |                         |
|      | P.2.1         | Penerapan Paludikultur dan teknik silvikultur pada areal PBPH                    |                         |
|      | P.2.2         | Revegetasi area terbuka dan lahan bekas terbakar                                 |                         |
|      | P.2.3         | Pemeliharaan sekat kanal                                                         |                         |
|      | P.2.4         | Penanaman intensif dalam rangka pemulihan pada ekosistem gambut                  |                         |
|      | P.2.5         | Revegetasi di dalam kawasan hutan di luar TN                                     |                         |
|      | P.2.6         | Revegetasi di APL                                                                |                         |
|      | P.3.1         | Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan restorasi gambut                        |                         |
|      | P.3.2         | Pembangunan dan pembinaan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)                      |                         |

|  | Indikator Keberhasilan                                                              | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                                                     | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terbangunnya sumur bor, sekat kanal dan kanal timbun di dalam kawasan hutan dan APL | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Teridentifikasinya kanal yang akan diintervensi                                     | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya infrastruktur pembahasan gambut                                        | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya penimbunan kanal terbuka                                              |             | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terbangunnya sumur bor                                                              | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | Terealisasinya Penerapan Paludikultur dan teknik silvikultur pada areal PBPH        |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya Revegetasi area terbuka dan lahan bekas terbakar                      |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terpeliharanya sekat kanal                                                          |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya penanaman intensif dalam rangka pemulihan ekosistem gambut            |             | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya Revegetasi di dalam kawasan hutan di luar TN                          | X           | X    | X    | X    | X    | X    |      |      |
|  | Terlaksananya revegetasi di APL                                                     | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan restorasi gambut                           | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | Terbangunnya Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)                                      |             | X    | X    | X    | X    |      |      |      |

### 3.11 Rencana Operasional (RO) Perlindungan Area Konservasi Tinggi – RO11

Dalam kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal.

Prioritas lokasi untuk kegiatan aksi mitigasi RO11 ini dilakukan pada kawasan konservasi dan pada area bernilai konservasi tinggi di luar kawasan hutan konservasi seperti pada kawasan APL. Selain itu, kegiatan RO11 juga dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dengan menjaga area bernilai konsentrasi tinggi (HCVF). Berdasarkan IJLH, area berhutan alam yang menjadi area konservasi adalah area yang masuk ke dalam arahan lindung. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah, arahan pemilihan lokasi untuk kegiatan RO11 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 37 berikut.

**Tabel 37** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi Perlindungan Area Konservasi Tinggi

| No | Parameter       | Perlindungan Areal Konservasi Tinggi                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Kawasan         | HL, HP, (HP, HPT, HPK) dan APL                      |
| 2  | IPL             | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                           |
| 3  | IJL             | Lindung, Rehabilitasi dan Rehabilitasi Agroforestry |
| 4  | Penutupan Lahan | Hutan alam primer dan sekunder                      |

Adapun rencana aksi mitigasi RO11 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada Tabel 38 dan Tabel 39. sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO11 dapat dilihat pada Lampiran 11.

Tabel 38 | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut

| Strategi (R0)                             | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan | Tujuan Program                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| R011 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi | 5.341.181                     | HL; HPT; HP; HPK; dan APL  | Aksi pengurangan emisi         |
|                                           |                               |                            | Aksi mempertahankan an serapan |
|                                           |                               |                            | Aksi meningkatkan serapan      |

|                                                   | Program                                  | Kegiatan |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | P1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan | P.1.1    | Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan                                                                                                              |
|                                                   |                                          | P.1.2    | Patroli kebakaran hutan dan lahan                                                                                                                  |
|                                                   |                                          | P.1.3    | Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin |
| P.2. Pengamanan Hutan                             |                                          | P.2.1    | Sosialisasi pengamanan hutan                                                                                                                       |
|                                                   |                                          | P.2.2    | Patroli pengamanan hutan                                                                                                                           |
|                                                   |                                          | P.2.3    | Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin                       |
|                                                   |                                          | P.2.4    | Penataan Batas Areal                                                                                                                               |
| P.3. Pengembangan RTH (Ruang Terbuka Hijau)       |                                          | P.3.1    | Menjadikan areal berhutan menjadi hutan kota                                                                                                       |
|                                                   |                                          | P.3.2    | Pembangunan dan pengembangan Ruang terbuka Hijau                                                                                                   |
| P.4. Konservasi Kehati                            |                                          | P.4.1    | Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)                                                                             |
|                                                   |                                          | P.4.2    | Sosialisasi Konservasi Kehati                                                                                                                      |
|                                                   |                                          | P.4.3    | Upaya konservasi melalui HCVF                                                                                                                      |
|                                                   |                                          | P.4.4    | Pemberian insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal berhutan (HCV)                                                                      |
|                                                   |                                          | P.4.5    | Survei Populasi Orang Utan (OU), penyusunan dan pemantauan action plan konservasi OU                                                               |
|                                                   |                                          | P.4.6    | Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam                                                                                                       |
|                                                   |                                          | P.4.7    | Rescue Satwa yang dilindungi                                                                                                                       |
|                                                   |                                          | P.4.8    | Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi                                                                                               |
|                                                   |                                          | P.4.9    | Menjaga koridor satwa                                                                                                                              |
| P.5. Jangka Benah Kebun Sawit dalam kawasan hutan |                                          | P.5.1    | Inventarisasi perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan                                                                                        |
|                                                   |                                          | P.5.2    | Sosialisasi dan implementasi jangka benah                                                                                                          |
|                                                   |                                          | P.5.3    | Pembuatan demplot Jangka Benah kebun sawit dalam kawasan hutan                                                                                     |



|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | Kelembagaan |
|--|--|--|-------------|

|                             |       |                                                                    |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| P.6.Pemberdayaan Masyarakat | P.6.1 | Pendampingan dan Monev kegiatan perlindungan Keanekaragaman Hayati |
|                             | P.6.2 | Pembinaan MPA dan peningkatan SDM                                  |
|                             | P.6.3 | Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra                |
|                             | P.6.4 | Pendampingan dan pembinaan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan)   |
|                             | P.6.5 | Diklat dan bantuan alat ekonomi produktif (AEP)                    |

**Tabel 39** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut

| RO   | Kode Kegiatan | Nama Kegiatan                                                                                                                                      | Pelaksana Kegiatan      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R011 | P.1.1         | Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan                                                                                                              | KSDAE; PSKL; PHL; PEMDA |
|      | P.1.2         | Patroli kebakaran hutan dan lahan                                                                                                                  |                         |
|      | P.1.3         | Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin |                         |
|      | P.2.1         | Sosialisasi pengamanan hutan                                                                                                                       |                         |
|      | P.2.2         | Patroli pengamanan hutan                                                                                                                           |                         |
|      | P.2.3         | Kegiatan pencegahan perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin                       |                         |
|      | P.2.4         | Penataan Batas Areal                                                                                                                               |                         |
|      | P.3.1         | Menjadikan areal berhutan menjadi hutan kota                                                                                                       |                         |
|      |               |                                                                                                                                                    |                         |

|  | Indikator Keberhasilan                                | Pelaksanaan |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                                       | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Telaksananya Sosialisasi                              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | kebakaran hutan dan                                   | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | lahan                                                 |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Patroli kebakaran hutan dan             | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | lahan                                                 |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Kegiatan                                |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | pencegahan,                                           |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | pengendalian dan                                      |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | penanggulangan                                        |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | kebakaran hutan dan                                   | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | lahan pada kawasan                                    |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | hutan produksi di                                     |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | wilayah KPH yang belum                                |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | di bebani izin                                        |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya                                         |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Sosialisasi pengamanan hutan                          | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Patroli                                 | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | pengamanan hutan                                      |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | lahan                                                 |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya penataan                                | X           | X    | X    |      |      |      |      |      |
|  | batas areal                                           |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Jumlah hutan kota di                                  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | tiap kabupaten semakin                                | X           | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |
|  | meningkat                                             |             |      |      |      |      |      |      |      |

|       |                                                                               |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| P.4.2 | Pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau                              |  |
| P.4.1 | Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna)        |  |
| P.4.2 | Sosialisasi Konservasi Kehati                                                 |  |
| P.4.3 | Upaya konservasi melalui HCVF                                                 |  |
| P.4.4 | Pemberian insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal berhutan (HCV) |  |
| P.4.5 | Survei Populasi OU, penyusunan dan pemantauan action plan konservasi OU       |  |
| P.4.6 | Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam                                  |  |
| P.4.7 | Rescue Satwa yang dilindungi                                                  |  |
| P.4.8 | Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi                          |  |
| P.4.9 | Menjaga koridor satwa                                                         |  |

|                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luasan RTH minimal 30                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| % terpenuhi di setiap kota di Kalimantan Tengah                        | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Terlaksananya                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna) |   | X | X | X | X |   |   |   |
| Terlaksananya                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sosialisasi Konservasi Kehati                                          | X | X | X | X |   |   |   |   |
| Terimplementasikannya Upaya konservasi melalui HCVF                    |   |   | X | X | X | X | X |   |
| Terealisasikannya                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pemberian insentif bagi pemegang HGU yang melaksanakan HCV             |   | X | X | X | X | X |   |   |
| Dilaksanakannya survey populasi OU                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| penyusunan dan pemantauan action plan konservasi OU                    | X | X | X |   |   |   |   |   |
| Terlaksananya Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam             | X | X | X | X |   |   |   |   |
| Terlaksananya Rescue Satwa yang dilindungi                             |   | X | X | X | X |   |   |   |
| Terlaksananya                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pemantauan peredaran Flora dan fauna yang dilindungi                   | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Terbangunnya koridor satwa yang terjaga                                | X | X | X | X | X |   |   |   |

[illegible]

[illegible]



### 3.12 Rencana Operasional (RO) Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove – RO12

Walaupun mangrove belum dimasukkan dalam bagian penghitungan target legally binding dibawah NDC maupun ambisi Indonesia dibawah LTS-LCCR, namun mangrove mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam aksi mitigasi perubahan iklim mengingat Indonesia adalah negara pemilik mangrove terluas di dunia dengan 3,4 juta hektar.

Pada saat ini telah dan sedang dilaksanakan program rehabilitasi mangrove dengan target seluas 600.000 ha. Upaya mitigasi dengan peningkatan cadangan karbon merupakan bagian dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) termasuk rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir, dan juga pembangunan hutan tanaman industri pada lahan bercadangan karbon rendah. Kegiatan RHL mangrove bertujuan untuk menurunkan degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air. Untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah, arahan pemilihan lokasi untuk kegiatan RO12 ini dilakukan dengan mengikuti kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 40 berikut.

**Tabel 40** | Kriteria pemilihan lokasi aksi mitigasi pengelolaan mangrove

| No | Parameter       | Kriteria I                                     | Kriteria II                                                                                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kawasan         | HL, TN, TWA, HP, HPK, APL, Tubuh Air           | HL, TN, TWA, HP, HPK, APL,                                                                        |
| 3  | IPL             | 7, 8, 9                                        | 7, 8, 9                                                                                           |
| 4  | IJL             | 1, 2, 3, 4, 5                                  | 1, 2, 3                                                                                           |
| 5  | Penutupan Lahan | Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder | Semak Belukar, Perkebunan, Tanah Terbuka, Semak Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering Campur Semak |

Adapun rencana aksi mitigasi RO12 dan tata waktu yang akan dilakukan selama periode 2023 – 2030 disajikan pada tabel 42 dan Tabel 42, sedangkan sebaran lokasi aksi mitigasi RO12 dapat dilihat pada Lampiran 12.

Tabel 41 | Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove

| Strategi (R0)                | Luas Intervensi Kegiatan (Ha) | Lokasi Intervensi Kegiatan    | Tujuan Program                    |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| R012<br>Pengelolaan Mangrove | 47.750                        | KK; HL; HPT; HP; HPK; dan APL | Aksi Mengurangi emisi             |
|                              |                               |                               | Aksi mempertahankan serapan emisi |
|                              |                               |                               | Aksi peningkatan serapan emisi    |
|                              |                               |                               | kelembagaan                       |

|  | Program                          | Kegiatan |                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | P.1.Pencegahan Karhutla mangrove | P.1.1    | Sosialisasi pencegahan Karhutla mangrove                                                                                                       |
|  |                                  | P.1.2    | Patroli pencegahan dan pengendalian karhutla mangrove                                                                                          |
|  |                                  | P.1.3    | Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan di wilayah KPH yang belum di bebani izin secara partisipatif              |
|  |                                  | P.1.4    | Pemadaman reaksi cepat & inventarisasi luas Karhutla                                                                                           |
|  |                                  | P.1.5    | Pengembangan dan pemeliharaan sarpras Karhutla                                                                                                 |
|  | P.2.Pengamanan Hutan mangrove    | P.2.1    | Sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan mangrove                                                                                         |
|  |                                  | P.2.2    | Patroli perlindungan dan pengamanan hutan mangrove                                                                                             |
|  |                                  | P.2.3    | Kegiatan pencegahan perambahan hutan mangrove dan pembalakan liar pada kawasan HP di wilayah KPH yang belum di bebani izin secara partisipatif |
|  |                                  | P.2.4    | Mempertahankan areal Mangrove pada izin HGU sejalan dengan Perpres 73/ 2012                                                                    |
|  |                                  | P.2.5    | Memberikan insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal mangrovenya                                                                    |
|  |                                  | P.2.6    | Sosialisasi dan fasilitasi KTH permohonan ijin PS                                                                                              |
|  |                                  | P.2.7    | Penataan batas areal rehabilitasi mangrove                                                                                                     |
|  | P.3. Penanaman                   | P.3.1    | Penanaman Mangrove                                                                                                                             |
|  |                                  | P.3.2    | Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem mangrove                                                                                            |
|  |                                  | P.3.3    | Rehabilitasi hutan dan lahan mangrove                                                                                                          |
|  | P.4.Pemberdaya an Masyarakat     | P.4.1    | Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar mangrove                                                                                             |
|  |                                  | P.4.2    | Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra                                                                                            |
|  |                                  | P.4.3    | Skema multiusaha kehutanan                                                                                                                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                                                  |       |                                                           |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| P.5.<br>Penyusunan Rencana Pengelolaan mangrove  | P.4.4 | Pembentukan (Kelompok Sadar Wisata) mangrove              | POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) mangrove                        |
|                                                  | P.4.5 | Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)         | Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)                             |
|                                                  | P.5.1 | Penyusunan RPHJP dan RPHJPD                               | Penyusunan RPHJP dan RPHJPD                                       |
|                                                  | P.5.2 | Penyusunan data potensi SDH mangrove                      | Penyusunan data potensi SDH mangrove                              |
|                                                  | P.5.3 | Monev pemanfaatan hutan mangrove                          | Monev pemanfaatan hutan mangrove                                  |
|                                                  | P.5.4 | Pengadaan sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan | Pengadaan sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan         |
|                                                  | P.5.5 | Penyusunan rencana pengelolaan mangrove                   | Penyusunan rencana pengelolaan mangrove                           |
|                                                  | P.5.6 | Pemanfaatan mangrove secara lestari untuk masyarakat      | Pemanfaatan mangrove secara lestari untuk masyarakat              |
|                                                  | P.6.1 | Peningkatan kapasitas SDM pengendalian karhutla           | Peningkatan kapasitas SDM (Diklat, pembekalan melalui BIMTEK dll) |
|                                                  | P.6.2 | Pembentukan dan Pendampingan MPA                          | Pembentukan dan Pendampingan MPA                                  |
| P.6.Peningkatan Kapasitas SDM pengelola mangrove |       |                                                           |                                                                   |

**Tabel 42** | Tata Waktu Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove

| RO   | KODE KEGIATAN | NAMA KEGIATAN                                                                                                                                         | PELAKSANA KEGIATAN         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| R012 | P.1.1         | Sosialisasi pencegahan<br>DALKARHUTLA                                                                                                                 | KSDAE; PSKL;<br>PHL; PEMDA |
|      | P.1.2         | Patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran<br>hutan dan lahan (mangrove)                                                                           |                            |
|      | P.1.3         | Kegiatan pencegahan,<br><br>pengendalian daan<br>penanggulangan kebakaran<br>hutan di wilayah KPH yang<br>belum di bebani izin secara<br>partisipatif |                            |
|      | P.1.4         | Pelaksanaan pemadaman<br>darat & Inventarisasi luas Karhutla                                                                                          |                            |
|      | P.1.5         | Pengembangan dan<br>pemeliharaan sarpras<br>DALKARHUTLA                                                                                               |                            |
|      | P.2.1         | Sosialisasi perlindungan dan<br>pengamanan hutan                                                                                                      |                            |
|      | P.2.2         | Patroli perlindungan dan<br>pengamanan hutan                                                                                                          |                            |
|      | P.2.3         | Kegiatan pencegahan<br>perambahan hutan dan<br>pembalakan liar pada                                                                                   |                            |
|      |               |                                                                                                                                                       |                            |

|  | INDIKATOR KEBERHASILAN                      | PELAKSANAAN |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |                                             | 2023        | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Terlaksananya                               |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Sosialisasi pencegahan                      | X           | X    | X    | X    | X    |      |      |      |
|  | DALKARHUTLA                                 |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Patroli pencegahan dan        |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | pengendalian                                |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | kebakaran hutan dan                         |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | lahan (mangrove)                            |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya pencegahan, pengendalian daan |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | penanggulangan kebakaran                    |             |      | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Terlaksananya                               |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | pemadaman darat &                           |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | Inventarisasi luas Karhutla                 |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya                               |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Pengembangan dan                            |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | pemeliharaan sarpras                        |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DALKARHUTLA                                 |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananaya                              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Sosialisasi                                 | X           | X    | X    | X    |      |      |      |      |
|  | perlindungan dan                            |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | pengamanan hutan                            |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya Patroli                       |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | perlindungan dan                            |             |      | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | pengamanan hutan                            |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | Adanya Kegiatan                             |             | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|  | pencegahan                                  |             |      |      |      |      |      |      |      |
|  | perambahan hutan                            |             |      |      |      |      |      |      |      |



|       |  |                                                                             |  |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|       |  | kawasan HP di wilayah KPH yang belum di bebani izin secara partisipatif     |  |
| P.2.4 |  | Mempertahankan areal Mangrove pada izin HGU sejalan dengan Perpres 73/2012  |  |
| P.2.5 |  | Memberikan insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal mangrovenya |  |
| P.2.6 |  | Sosialisasi PS                                                              |  |
| P.2.7 |  | Penataan Batas Areal                                                        |  |
| P.3.1 |  | Penanaman Mangrove                                                          |  |
| P.3.2 |  | Penanaman dalam rangka pemulihan ekosistem mangrove                         |  |
| P.3.3 |  | Rehabilitasi hutan dan lahan mangrove                                       |  |
| P.4.1 |  | Pemberdayaan masyarakat setempat/ sekitar hutan                             |  |
| P.4.2 |  | Pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat mitra                         |  |
| P.4.3 |  | Skema multiusaha kehutanan                                                  |  |
| P.4.4 |  | Pembentukan POKDARWIS                                                       |  |

|                                                           |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| dan pembalakan liar<br>pada kawasan HP                    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Terealisasikannya                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |
| perlindungan<br>Mangrove pada izin<br>HGU                 | X | X | X | X |   |   |   |  |
| Terealisasikannya                                         |   |   |   |   |   |   |   |  |
| insentif bagi pemegang<br>HGU yang                        | X | X | X |   |   |   |   |  |
| mempertahankan<br>mangrove                                |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Terlaksananya                                             | X | X | X |   |   |   |   |  |
| Sosialisasi PS                                            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Terlaksananya                                             | X | X |   |   |   |   |   |  |
| Penataan Batas Areal                                      |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Terlaksananya                                             |   | X | X | X | X | X | X |  |
| Penanaman Mangrove                                        |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Terlaksananya                                             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Penanaman dalam<br>rangka pemulihan<br>ekosistem mangrove |   | X | X | X | X | X |   |  |
| Terlaksananya                                             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Rehabilitasi hutan dan<br>lahan mangrove                  |   |   | X | X | X | X | X |  |
| Terlaksananya                                             |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Pemberdayaan<br>masyarakat setempat                       | X | X | X | X | X | X |   |  |
| Terbangunnya usaha dan kelembagaan<br>masyarakat mitra    |   | X | X | X | X | X |   |  |
| Terbangunnya Skema<br>multi usaha<br>kehutanan            |   |   |   | X | X | X | X |  |
| Terbentuknya                                              |   |   |   |   |   |   |   |  |

|       |  |                                                                               |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |  | (Kelompok Sadar Wisata)                                                       |  |
| P.4.5 |  | Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)                             |  |
| P.5.1 |  | Penyusunan RPHJP dan RPHJPD                                                   |  |
| P.5.2 |  | Penyusunan data potensi SDH pada Mangrove                                     |  |
| P.5.3 |  | Monev pemanfaatan Hutan                                                       |  |
| P.5.4 |  | Pengadaan sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan                     |  |
| P.5.5 |  | Penyusunan rencana pengelolaan mangrove                                       |  |
| P.5.6 |  | Pemanfaatan mangrove sevara lestari untuk masyarakat                          |  |
| P.6.1 |  | Peningkatan kapasitas SDM DALKARHUTLA (Diklat, pembekalan melalui BIMTEK dll) |  |
| P.6.2 |  | Pembentukan dan Pendampingan MPA                                              |  |

|                                                                                    |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| POKDARWIS<br>(Kelompok Sadar<br>Wisata)                                            |   | X | X | X | X |   |  |  |
| Terbentuknya                                                                       |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Kelompok Kerja<br>Mangrove Daerah<br>(KKMD)                                        |   | X | X | X | X |   |  |  |
| Terlaksananya                                                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Penyusunan RPHJP<br>dan RPHJPD                                                     | X | X | X | X |   |   |  |  |
| Terlaksananya                                                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Penyusunan data<br>potensi SDH pada<br>Mangrove                                    | X | X | X | X |   |   |  |  |
| Terlaksananya Monev<br>pemanfaatan Hutan                                           | X | X | X |   |   |   |  |  |
| Terlaksananya                                                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Pengadaan sarana dan<br>prasarana<br>perkantoran dan<br>sarpras teknis<br>lapangan | X | X | X | X |   |   |  |  |
| Terlaksananya                                                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Penyusunan rencana<br>pengelolaan mangrove                                         | X | X | X |   |   |   |  |  |
| Pemanfaatan<br>mangrove secara<br>lestari untuk<br>masyarakat                      |   | X | X | X | X | X |  |  |
| Terbangunnya<br>kapasitas SDM                                                      |   |   |   |   |   |   |  |  |
| DALKARHUTLA<br>melalui (Diklat, pembekalan melalui<br>BIMTEK dll)                  |   | X | X | X | X | X |  |  |
| Terbentuknya MPA dan pendampingan MPA                                              | X | X | X | X | X |   |  |  |

Program dan kegiatan pada setiap Rencana Operasional (RO) sebagaimana dijelaskan diatas, pada beberapa bagian menunjukan adanya kesamaan kegiatan. Untuk menghindari pengulangan program dan kegiatan yang muncul pada beberapa RO, maka program dan kegiatan rencana aksi mitigasi perubahan iklim dapat dikelompokkan berdasarkan strategi aksi mitigasi utama, yaitu:

1. Aksi mengurangi emisi
2. Aksi mempertahankan serapan emisi
3. Aksi meningkatkan serapan emisi
4. Aksi kelembagaan

| Tujuan Strategi: 1. Aksi Pengurangan Emisi |          |                                                                                     |                           |                      |         |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| Program                                    | Kegiatan |                                                                                     | RO terkait                | Luas intervensi (Ha) | 2023    |
| P1.<br>Pencegahan Kebakaran                | P1.1     | Sosialisasi kawasan rawan kebakaran/ DARKARHUTLA                                    | R01, R02, R011, R012      | 7.310.140            | 913.767 |
|                                            | P1.2     | Pengamanan: Patroli, peringatan Dini (Cuaca/ Curah Hujan)                           | R01, R02, R03, R011, R012 | 7.387.262            | 923.408 |
|                                            | P1.3     | Pengembangan dan pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)                              | R01, R02, R012            | 1.968.959            | 246.120 |
| P2.<br>Penanggulangan Kebakaran            | P2.1.    | Penyediaan sarana Prasarana Karhutla (peralatan, APD, Insentif, Sumur Bor, SDM dll) | R01, R02, R011, R012      | 7.310.140            | 913.767 |
|                                            | P2.2.    | Membangunan Jaringan Koordinasi & Komunikasi antar stakeholders (terkait Pemadaman) | R01, R02                  | 1.921.209            | 240.151 |
|                                            | P2.3     | Pemadaman langsung di darat dan inventarisasi                                       | R012                      | 47.750               | 5.969   |



|                            |       |                                                                                  |          |           |         |
|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
|                            |       | DARKARHUTLA                                                                      |          |           |         |
|                            | P2.4  | Pembangunan infrastruktur pendukung penanganan Karhutla                          | R01, R02 | 1.921.209 | 240.151 |
| P3.                        | P3.1. | Monitoring dan Evaluasi lahan bekas                                              | R01, R02 | 1.921.209 | 240.151 |
| Penanganan Pasca Kebakaran |       | terbakar (pemantauan Suksesi alami, Penelitian kondisi lahan pasca terbakar dll) |          |           |         |

| Tujuan Strategi: 2. Aksi Mempertahankan Serapan Emisi |          |                                                                                            |                                     |             |         |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|
| Program                                               | Kegiatan |                                                                                            | Arahan Lokasi (Rencana Operasional) | Luasan (Ha) | 2023    |
| P4. Pengamanan Kawasan Hutan                          | P4.1.    | Sosialisasi tata batas kawasan Konservasi (KSA & KPA)                                      | R01                                 | 1.405.937   | 175.742 |
|                                                       | P4.2     | Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan                                              | R01, R011, R012                     | 6.794.868   | 849.359 |
|                                                       | P4.3     | Patroli gabungan/terpadu                                                                   | R01, R011, R012                     | 6.794.868   | 849.359 |
|                                                       | P4.4     | Patroli Perlindungan dan Pengamanan kawasan konservasi                                     | R09, R012                           | 265.851     | 33.231  |
|                                                       | P4.5     | Mempertahankan areal berhutan HGU dengan menjadikannya sebagai HCV (Perpres 73 tahun 2012) | R01                                 | 1.405.937   | 175.742 |
|                                                       | P4.6     | Skema insentif bagi HGU yang mempertahankan areal berhutan / kawasan mangrove              | R012                                | 47.750      | 5.969   |
|                                                       | P4.7     | Pengelolaan Areal berhutan di luar kawasan hutan                                           | R012                                | 47.750      | 5.969   |
|                                                       | P4.8     | Mengawasi dan mengendalikan peredaran hasil hutan                                          | R01                                 | 1.405.937   | 175.742 |
|                                                       |          | baik kayu dan non kayu                                                                     |                                     |             |         |

|  |         |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 | 240.151 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |

|  |         |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|  | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 | 849.359 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 33.231  | 33.231  | 33.231  | 33.231  | 33.231  | 33.231  | 33.231  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 | 175.742 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |



|                                      |       |                                                                                              |           |           |         |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                                      | P4.9  | Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengamanan hutan (pamswakarsa terpadu)                    | R01       | 1.405.937 | 175.742 |
|                                      | P4.10 | Pemetaan wilayah rawan konflik tenurial                                                      | R04       | 208.412   | 26.052  |
| P5. Pengelolaan Hutan Lestari        | P5.1  | Penataan Areal Kerja                                                                         | R03       | 77.122    | 9.640   |
|                                      | P5.2  | Identifikasi dan Inventarisasi Potensi SDH                                                   | R01       | 1.405.937 | 175.742 |
|                                      | P5.3  | Monitoring dan Evaluasi RKU/ RKT                                                             | R03, R012 | 124. 872  | 15.609  |
|                                      | P5.4  | Pembuatan Peta Areal Kerja menyeluruh pada PBPH HA/ HT                                       | R06       | 521.298   | 65.162  |
|                                      | P5.5  | Penyusunan rencana penebangan pada PBPH HA/ HT                                               | R06       | 521.298   | 65.162  |
|                                      | P5.6  | Pembukaan wilayah hutan secara terencana pada PBPH HA/ HT                                    | R06       | 521.298   | 65.162  |
|                                      | P5.7  | Penentuan sistem silvikultur sesuai karakteristik tapak (TPTI/ TPTJ/ SILIN)                  | R06       | 521.298   | 65.162  |
|                                      | P5.8  | Penyusunan laporan dan Monev Pengelolaan Hutan Lestari pada PBPH HA/ HT                      | R06       | 521.298   | 65.162  |
|                                      | P5.9  | Pembinaan dan Pendampingan PBPH                                                              | R06, R07  | 2.412.715 | 301.589 |
|                                      | P5.10 | Penyusunan data potensi SDH hutan mangrove                                                   | R012      | 47.750    | 5.969   |
| P6.                                  | P6.1  | Sosialisasi dan komitmen penerapan RIL-C dan SILIN PBPH                                      | R01, R03  | 1.483.059 | 185.382 |
| penerapan RIL-C & Penegelolaan SILIN | P6.2  | Implementasi RIL-C dan SILIN di PBPH                                                         | R01, R03  | 1.483.059 | 185.382 |
|                                      | P6.3  | Penerapan sertifikasi pengelolaan Hutan Lestari ( <i>mandatory</i> maupun <i>voluntery</i> ) | R01, R03  | 1.483.059 | 185.382 |
|                                      | P6.4  | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RIL C dan SILIN di PBPH                                  | R03       | 77.122    | 9.640   |



|                                                     |       |                                                                                                 |           |           |         |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| P7.<br>Pengelolaan Ekosistem Gambut                 | P7.1  | Identifikasi dan inventarisasi kesatuan hidrologi gambut (KHG)                                  | R02       | 515.272   | 64.409  |
|                                                     | P7.2  | Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan hidrologi gambut                                 | R02       | 515.272   | 64.409  |
|                                                     | P7.3  | Penyusunan RPPEG Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah                                            | R02       | 515.272   | 64.409  |
|                                                     | P7.4  | Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut melalui Pembasahan, pengukuran TMTAT | R02       | 515.272   | 64.409  |
|                                                     | P7.5  | Pembuatan sumur Bor dan sekat kanal pada APL                                                    | R09       | 218.101   | 27.263  |
|                                                     | P7.6  | Pembuatan sekat kanal pada TNTP                                                                 | R09       | 218.101   | 27.263  |
|                                                     | P7.7  | Pembangunan dan Pemeliharaan sekat kanal dan sumur Bor di areal konservasi                      | R09, R010 | 1.265.989 | 158.249 |
|                                                     | P7.8  | Inventarisasi kanal                                                                             | R010      | 1.047.887 | 130.986 |
|                                                     | P7.9  | Penimbunan kanal terbuka                                                                        | R010      | 1.047.887 | 130.986 |
|                                                     | P7.10 | Pembuatan infrastruktur pembasahan gambut                                                       | R010      | 1.047.887 | 130.986 |
| P8.<br>Penerapan HCV pada kawasan konsesi (Berizin) | P8.1  | Mempertahankan areal berhutan pada HGU sebagai areal HCV.                                       | R02, R011 | 5.856.453 | 732.057 |
|                                                     | P8.2  | Pemberian Insentif bagi pemegang HGU yang mempertahankan areal HCV                              | R02, R011 | 5.856.453 | 732.057 |
| P9.<br>Konservasi Kehati                            | P9.1  | Identifikasi dan Inventarisasi Keanekaragaman hayati (Flora dan fauna)                          | R011      | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                     | P9.2  | Sosialisasi Konservasi Keanekaragaman hayati                                                    | R011      | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                     | P9.3  | Upaya konservasi melalui penerapan HCVF                                                         | R011      | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                     | P9.4  | Survei Populasi OU, penyusunan dan pemantauan <i>Action Plan</i> Konservasi OU                  | R011      | 5.341.181 | 667.648 |

[illegible]

|                                                   |       |                                                      |      |           |         |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
|                                                   | P9.5  | Identifikasi potensi Jasling dan Wisata Alam         | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                   | P9.6  | Rescue satwa yang dilindungi                         | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                   | P9.7  | Pemantauan Peredaran Flora dan Fauna yang dilindungi | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                   | P9.8  | Menjaga koridor satwa                                | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                   | P9.8  | Monitoring dan evaluasi Perlindungan                 | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                                   |       | Keanekaragaman Hayati                                |      |           |         |
| P10.<br>Pengembangan RTH<br>(Ruang Terbuka Hijau) | P10.1 | Menjadikan areal berhutan menjadi hutan kota         | R01  | 1.405.937 | 175.742 |
|                                                   | P10.2 | Pembangunan dan pengembangan Ruang terbuka hijau     | R011 | 5.341.181 | 667.648 |

**Tujuan Staretgi: 3. Aksi Peningkatan Serapan Emisi**

| Program                                                                                                    | Kegiatan |                                                                              | Arahan Lokasi<br>(Rencana Operasional) | Luasan (Ha) | 2023    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|
| P11.<br>Penilaian status lahan                                                                             | P11.1    | Identifikasi kondisi lahan                                                   | R04                                    | 208.412     | 26.052  |
|                                                                                                            | P11.2    | Penilaian tingkat kesuburan lahan                                            | R04                                    | 208.412     | 26.052  |
|                                                                                                            | P11.3    | Sosialisasi lahan gambut (KHG) pada areal konservasi                         | R09                                    | 218.101     | 27.263  |
| P12.<br>Kegiatan Rehabilitasi,<br>Reforestasi pada<br>kawasan yang<br>mengalami deforestasi /<br>Degradasi | P12.1    | Revegetasi pada kawasan terbuka dan bekas terbakar                           | R01, R010                              | 2.453.824   | 306.728 |
|                                                                                                            | P12.2    | Rehabilitasi pada Kawasan lahan kritis dan terdegradasi                      | R01, R010                              | 2.453.824   | 306.728 |
|                                                                                                            | P12.3    | Rehabilitasi di lahan dan hutan yang dikelola masyarakat (Perhutanan Sosial) | R01                                    | 1.405.937   | 175.742 |

[illegible]

|                                                                              |        |                                                                                    |               |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|
|                                                                              | P12.4  | Pembangunan Hutan dengan pola Agroporestry (Sylvopastura dan Sylvifishery)         | R02, R05      | 1.068.325 | 133.541 |
|                                                                              | P12.5  | Rehabilitasi pada areal bekas tebangan                                             | R03           | 77.122    | 9.640   |
|                                                                              |        | dan pemeliharaan tegakan tinggal                                                   |               |           |         |
|                                                                              | P12.6  | Penanaman pada areal persetujuan pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)          | R04, R07      | 2.099.829 | 262.479 |
|                                                                              | P12.7  | Penanaman Hutan tanaman dengan pola kerjasama kemitraan antara PBPH dan masyarakat | R04, R07, R08 | 2.755.934 | 344.492 |
|                                                                              | P12.8  | Penanaman Pada areal KPH dan PIAPS                                                 | R05, R07, R08 | 3.100.575 | 387.572 |
|                                                                              | P12.9  | Penanaman pada areal konservasi                                                    | R08           | 656.105   | 82.013  |
|                                                                              | P12.10 | Penanaman Pada areal APL HGU dan Non HGU                                           | R07, R08      | 2.547.522 | 318.440 |
|                                                                              | P12.11 | Revegetasi dan restorasi pada lahan gambut pada kawasan hutan dan APL              | R09, R010     | 1.265.989 | 158.249 |
|                                                                              | P12.12 | Penerapan kegiatan Paludikultur dan teknik silvikultur pada areal PBPH             | R09, R010     | 1.265.989 | 158.249 |
|                                                                              | P12.13 | Penanaman pada areal Mangrove dalam rangka pemulihan ekosistem                     | R012          | 47.750    | 5.969   |
|                                                                              | P12.13 | Penanaman pada areal kosong dan tanaman peneduh areal kiri kanan jalan             | R05           | 553.053   | 69.132  |
|                                                                              |        | Rehap DAS                                                                          | R05           | 553.053   | 69.132  |
| P13.                                                                         | P13.1  | Sosialisasi HTE pada PBPH                                                          | R04           | 208.412   | 26.052  |
| Fasilitasi percepatan HTE (Hutan Tanaman Energi) pada PBPH hingga tahun 2030 | P13.2  | Pembangunan demplot HTE                                                            | R04           | 208.412   | 26.052  |
|                                                                              | P13.3  | Integrasi Industri HTE                                                             | R04           | 208.412   | 26.052  |
|                                                                              | P13.4  | Pengembangan Hutan Tanaman Energi pada KTH (Kelompok Tani Hutan) di KPH            | R04           | 208.412   | 26.052  |

|  |         |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 133.541 | 133.541 | 133.541 | 133.541 | 133.541 | 133.541 | 133.541 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 9.640   | 9.640   | 9.640   | 9.640   | 9.640   | 9.640   | 9.640   |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 262.479 | 262.479 | 262.479 | 262.479 | 262.479 | 262.479 | 262.479 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 344.492 | 344.492 | 344.492 | 344.492 | 344.492 | 344.492 | 344.492 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 387.572 | 387.572 | 387.572 | 387.572 | 387.572 | 387.572 | 387.572 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 82.013  | 82.013  | 82.013  | 82.013  | 82.013  | 82.013  | 82.013  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 318.440 | 318.440 | 318.440 | 318.440 | 318.440 | 318.440 | 318.440 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 | 158.249 |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   | 5.969   |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  | 69.132  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |
|  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  | 26.052  |
|  |         |         |         |         |         |         |         |



|                                   |        |                                                             |      |           |         |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
| P14.<br>Implementasi Jangka Benah | P.14.1 | Inventarisasi perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                   | P.14.2 | Sosialisasi jangka benah                                    | R011 | 5.341.181 | 667.648 |
|                                   | P.14.3 | Pelaksanaan jangka benah                                    | R011 | 5.341.181 | 667.648 |

| Tujuan Strategi: 4 Aksi Kelembagaan                                                                         |          |                                                                                                                                                          |                                     |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| Program                                                                                                     | Kegiatan |                                                                                                                                                          | Arahan Lokasi (Rencana Operasional) | Luasan (Ha) | 2023   |
| P15.<br>Pembentukan Kelembagaan Sub Nasional<br><br>Implementasi Folu Net Sink Provinsi Kalimantan Tengah   | P15.1    | Membentuk Komisi daerah Folu Net Sink 2022 sd 2030 / Forum Koordinasi Folu Net Sink / POKJA                                                              | R08                                 | 656.105     | 82.013 |
|                                                                                                             | P15.2    | Membentuk Sekretariat tetap/Forum Folu Net sink                                                                                                          | R08                                 | 656.105     | 82.013 |
|                                                                                                             | P15.4    | Membentuk sistem Pemantauan, Pelaporan dan verifikasi (MRV) untuk sub nasional                                                                           | R08                                 | 656.105     | 82.013 |
|                                                                                                             | P15.5    | Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)                                                                                                        | R012                                | 47.750      | 5.969  |
|                                                                                                             | P15.6    | Membangun pertemuan/ media                                                                                                                               | R08                                 | 656.105     | 82.013 |
|                                                                                                             |          | komunikasi dalam rangka Monev Pelaksanaan Folu Net Sink Regional Kalteng                                                                                 |                                     |             |        |
| P16.<br>Penguatan Kelembagaan Sub Nasional (anggota Komda, SOPD dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota | P16.1    | Memperkuat Kelembagaan sistem MRV dengan membangun pusat pelatihan untuk pemantauan, penilaian/ pengukuran emisi karbon pada kawasan hutan dan non hutan | R08                                 | 656.105     | 82.013 |
|                                                                                                             | P16.2    | Memperkuat perangkat laboratorium, uji analitik, metode riset untuk pengukuran/ monitoring emisi karbon pada kawasan hutan dan Non Hutan                 | R08                                 | 656.105     | 82.013 |

|  | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 |
|  |        |        |        |        |        |        |        |
|  | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 |
|  | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 |
|  | 5.969  | 5.969  | 5.969  | 5.969  | 5.969  | 5.969  | 5.969  |
|  | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 |
|  |        |        |        |        |        |        |        |
|  | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 |
|  |        |        |        |        |        |        |        |
|  | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 | 82.013 |
|  |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                          |       |                                                                                                                                                          |     |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|
|                                                                                                          | P16.3 | Menyusun dan memperbaharui sistem informasi pelaksanaan Folu Net sink kalimantan Tengah                                                                  | R08 | 656.105 | 82.013 |
|                                                                                                          | P16.4 | Pengadaan tenaga POLHUT dan tenaga Penyuluh Kehutanan                                                                                                    | R02 | 515.272 | 64.409 |
|                                                                                                          | P16.5 | Pengembangan SDM dan aparatur pelaksana melalui Diklat, studi banding dan magang)                                                                        | R02 | 515.272 | 64.409 |
|                                                                                                          | P16.6 | Pembentukan RPH (Resort Pengelola Hutan)                                                                                                                 | R02 | 515.272 | 64.409 |
|                                                                                                          | P16.7 | Monitoring Evaluasi 16 KPHP hingga tahun 2030                                                                                                            | R04 | 208.412 | 26.052 |
|                                                                                                          |       | komunikasi dalam rangka Monev Pelaksanaan Folu Net Sink Regional Kalteng                                                                                 |     |         |        |
| P16. Penguatan Kelembagaan Sub Nasional (anggota Komda, SOPD dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota | P16.1 | Memperkuat Kelembagaan sistem MRV dengan membangun pusat pelatihan untuk pemantauan, penilaian/ pengukuran emisi karbon pada kawasan hutan dan non hutan | R08 | 656.105 | 82.013 |
|                                                                                                          | P16.2 | Memperkuat perangkat laboratorium, uji analitik, metode riset untuk pengukuran/ monitoring emisi kabon pada kawasan hutan dan Non Hutan                  | R08 | 656.105 | 82.013 |
|                                                                                                          | P16.3 | Menyusun dan memperbaharui sistem informasi pelaksanaan Folu Net sink kalimantan Tengah                                                                  | R08 | 656.105 | 82.013 |
|                                                                                                          | P16.4 | Pengadaan tenaga POLHUT dan tenaga Penyuluh Kehutanan                                                                                                    | R02 | 515.272 | 64.409 |
|                                                                                                          | P16.5 | Pengembangan SDM dan aparatur pelaksana melalui Diklat, studi banding dan magang)                                                                        | R02 | 515.272 | 64.409 |
|                                                                                                          | P16.6 | Pembentukan RPH (Resort Pengelola Hutan)                                                                                                                 | R02 | 515.272 | 64.409 |
|                                                                                                          | P16.7 | Monitoring Evaluasi 16 KPHP hingga tahun 2030                                                                                                            | R04 | 208.412 | 26.052 |
|                                                                                                          | P16.8 | Peningkatan kapasitas melalui Pelatihan internal penerapan RIL dan RIL C pada PBPH HA/ HT                                                                | R06 | 521.298 | 65.162 |



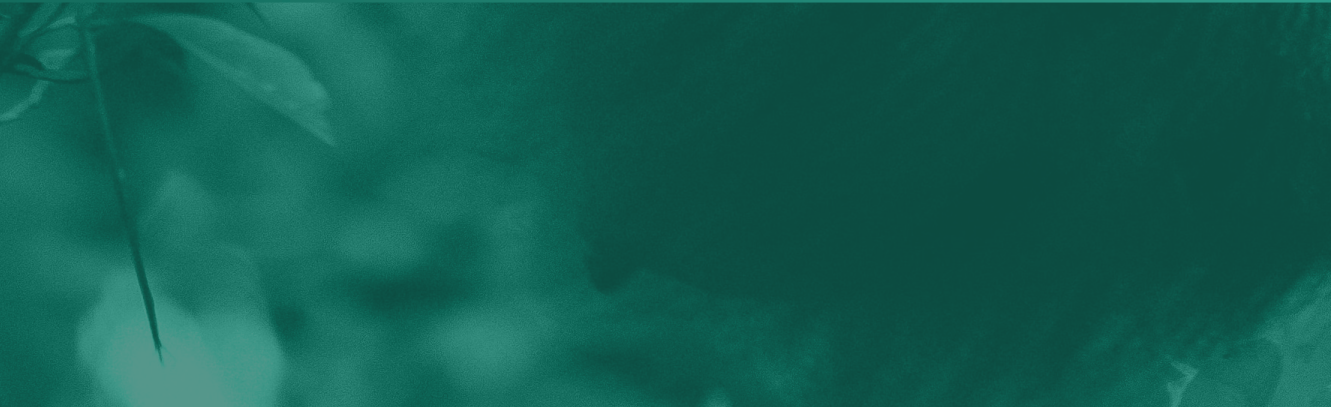
|                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                         |                |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
|                                                                                        | P16.9  | Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran dan sarpras teknis lapangan                                                                                                                      | R012           | 47.750    | 5.969   |
|                                                                                        | P16.10 | Membangun kerjasama untuk pengembangan teknologi dan pengembangan ilmu terapan dengan lembaga penelitian                                                                                | R08            | 656.105   | 82.013  |
| P17.<br><b>Memperkuat Kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan FoLU Net Sink 2030</b> | P17.1  | Membangun payung hukum untuk implementasi FoLU Net Sink di level Provinsi (Paraturan Gubernur/ Perda)                                                                                   | R08            | 656.105   | 82.013  |
|                                                                                        | P17.2  | Meninjau kembali ijin-ijin yang tidak prosedural, melakukan <i>legal audit</i> dan <i>legal compliance</i> usaha kehutanan, perkebunan dan pertambangan Implementasi P.23/24 tahun 2021 | R08            | 656.105   | 82.013  |
|                                                                                        | P17.3  | Mengharmonisasikan kebijakan & mensinergikan regulasi sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan,                                                                            | R08            | 656.105   | 82.013  |
|                                                                                        |        | perikanan dan peternakan                                                                                                                                                                |                |           |         |
|                                                                                        | P17.4  | Penyusunan RPHJP dan RPHJPD                                                                                                                                                             | R012           | 47.750    | 5.969   |
| P18.<br>Pemberdayaan Masyarakat                                                        | P18.1  | Sosialisasi Perhutanan Sosial dan PIAPS                                                                                                                                                 | R01, R02, R012 | 1.968.959 | 246.120 |
|                                                                                        | P18.2  | Kerjasama Kemitraan antara PBPH-HA/ HT dengan masyarakat sekitar (Kulin KK)                                                                                                             | R01, R02       | 1.921.209 | 240.151 |
|                                                                                        | P18.3  | Fasilitasi Perhutanan social & Hutan adat (Identifikasi, perifikasi dan Validasi)                                                                                                       | R01, R02,      | 1.921.209 | 240.151 |
|                                                                                        | P18.4  | Penataan batas areal PS                                                                                                                                                                 | R01, R02       | 1.921.209 | 240.151 |
|                                                                                        | P18.5  | Penyusunan RPHJP dan RPHJPD                                                                                                                                                             | R012           | 47.750    | 5.969   |
|                                                                                        | P18.6  | Fasilitasi pendampingan kelompok tani hutan                                                                                                                                             | R01            | 1.405.937 | 175.742 |
|                                                                                        | P18.7  | Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola PS dan masyarakat sekitar kawasan kelola                                                                                       | R01            | 1.405.937 | 175.742 |
|                                                                                        | P18.8  | Sarana prasarana PS                                                                                                                                                                     | R01, R02       | 1.921.209 | 240.151 |

[illegible]

|                                 |        |                                                                                                            |                                |            |           |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
|                                 | P18.9  | Pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan multiusaha kehutanan dan pemanfaatan HHBK                      | R01, R05, R06, R09, R010, R012 | 3..794.027 | 474.253   |
|                                 | P18.10 | Pengembang usaha dan kelembagaan masyarakat mitra                                                          | R012                           | 47.750     | 5.969     |
|                                 | P18.11 | Pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)                                                              | R012                           | 47.750     | 5.969     |
|                                 | P18.12 | Pemanfaatan MangROve secara lestari untuk masyarakat dan masyarakat adat                                   | R012                           | 47.750     | 5.969     |
|                                 | P18.13 | Pengembangan industry Primer berbasis non kayu                                                             | R06                            | 521.298    | 65.162    |
|                                 | P18.14 | Pemanfaatan Jasa lingkungan (ekowisata, Tata air, penyimpanan dan penyerapan karbon)                       | R01, R02                       | 1.921.209  | 240.151   |
|                                 | P18.15 | Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan restorasi gambut                                                  | R010                           | 1.047.887  | 1.047.887 |
|                                 | P18.16 | Pembangunan dan pembinaan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)                                                | R09, R010                      | 1.265.989  | 1.265.989 |
| P19.<br><b>Resolusi Konflik</b> | P19.1  | Resolusi konflik melalui mediasi, fasilitasi dll                                                           | R02                            | 515.272    | 64.409    |
|                                 | P19.1  | Meningkatkan status pengelolaan & Penguasaan lahan masyarakat melalui TORA dan PTSL                        | R08                            | 656.105    | 82.013    |
|                                 |        | Identifikasi, verifikasi dan validasi wilayah adat dan pembuatan peta indikasi wilayah adat dan hutan adat | R08                            | 656.105    | 82.013    |









# BAB 04



KELEMBAGAAN PELAKSANA  
PROGRAM DAN KEGIATAN

## BAB IV | KELEMBAGAAN PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN

### 4.1 Pemangku Kepentingan

Penyusunan program dan rencana kegiatan aksi mitigasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang ada, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan juga dari UPT Kementerian LHK yang ada di Kalimantan Tengah. Berikut adalah para pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Program dan Kegiatan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dalam kerangka Folu Net Sink Sub Nasional Kalimantan Tengah

#### OPD

2. Dinas Kehutanan
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Kelutan dan Perikanan
5. KPHL Gerbang Barito
6. KPHP Barito Hulu
7. KPHP Barito Tengah
8. KPHP Barito Hilir
9. KPHP Kahayan Hilir
10. KPHP Kahayan Hulu
11. KPHP Kahayan Tengah
12. KPHP Katingan Hilir
13. KPHP Katingan Hulu
14. KPHL Kapuas Kahayan
15. KPHP Kotawaringain Barat
16. KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah
17. KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir
18. KPHP Sukamara Lamandau
19. KPHP Kapuas Hulu
20. KPHP Seruyan Hulu

#### UPT KLHK

1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah XXI
2. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah
3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPSHL) Kahayan
4. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan
5. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah X Palangka Raya
6. BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove)
7. Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Karhutla wilayah Kalimantan
8. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK wilayah Kalimantan



Pada proses sosialisasi rencana kerja, berbagai komponen unsur masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan usulan terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Unsur masyarakat tersebut meliputi pemegang izin berusaha bidang kehutanan, bidang pertambangan, dan kelompok masyarakat (Perhutanan Sosial, dll.), Perguruan Tinggi (PT) setempat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

#### 4.2 Penguatan Peran dan Hubungan Antar Lembaga

Penguatan peran dan hubungan antar lembaga dicerminkan dalam konsep organisasi pelaksanaan kegiatan yang dirancang dalam desain yang terkoneksi dari pusat hingga ke tingkat tapak. Pengaturan peran dalam organisasi rehabilitasi mangrove terbagi dalam tiga bagian fungsi, yakni: 1) fungsi regulatif yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 2) fungsi pengorganisasian sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan, dan 3) fungsi pelaksanaan yang merupakan para pengelola hutan dan lahan serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan di tingkat tapak. Berikut penjelasan singkat dari fungsi kelembagaan yang dimaksud.

##### 1. Fungsi regulatif

Para pihak yang terlibat dalam kelembagaan dengan fungsi regulatif adalah KLHK dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, hingga Desa). Tujuan utama dari kelembagaan fungsi regulatif adalah untuk memperkuat kerangka regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim.

##### 2. Fungsi pengorganisasian.

Fungsi pengorganisasian ini adalah untuk memperkuat hubungan dan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan Renja Sub Nasional Kalimantan Tengah. Fungsi ini dapat dilaksanakan oleh forum yang dibentuk khusus untuk menjadi wadah yang efektif bagi para pihak dalam berkoordinasi, komunikasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan rencana aksi mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Tengah. Para pihak yang terlibat dalam Forum ini meliputi lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah (swasta dan asosiasi) terkait, perguruan tinggi, lembaga penelitian terkait, lembaga swadaya masyarakat dan unsur perwakilan masyarakat.

##### 3. Fungsi operasional.

Fungsi operasional mencakup pengelola pada tingkat tapak, baik dari unsur pengusaha, pemerintah pusat dan daerah, dan kelompok masyarakat yang memiliki atau diberikan tugas atau tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan aksi mitigasi di tingkat tapak.

### 4.3 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada fungsi operasional, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan penyuluhan, terutama tentang upaya pengurangan emisi, mempertahankan serapan karbon, meningkatkan serapan karbon, dan kelembagaan. Target group yang menjadi sasaran pelatihan adalah para petugas teknis, penyuluh kehutanan, para staf pemegang izin konsesi, masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial, dan para pendamping dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.







# BAB 05



PENDANAAN KEGIATAN



## BAB V | PENDANAAN KEGIATAN

### 5.1 Kebutuhan Anggaran

Prakiraan jumlah anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Tengah untuk tahun 2023-2030 adalah sekitar sebesar Rp. 40.715.300.000.000 (Empat Puluh Trilyun Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan total luas intervensi kegiatan 12.483.536 Hektar. Secara umum, gambaran kebutuhan anggaran tersebut tersaji pada tabel 31.

### 5.2 Mekanisme Pendanaan

Kegiatan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Tengah tahun 2023- 2030 bersifat berkelanjutan sehingga sistem penganggaran kegiatan harus dipastikan berlanjut dengan menggunakan skema penganggaran tahun jamak (*multi-years*). Hal ini penting untuk diperhatikan karena capaian kegiatan pada tahun 2030 dilalui melalui capaian berjenjang (*milestones*) tiap tahun yang sudah terukur.

### 5.3 Sumber Pendanaan

Beberapa sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan aksi mitigasi tingkat sub nasional Kalimantan Tengah tahun 2023-2030 antara lain:

1. *State-based direct investment* dalam bentuk APBN, APBD, dana transfer ke daerah (DAK, DBH-DR), dan APBDes.
2. *Private-mandatory based investment*, misalnya kewajiban penggunaan kawasan hutan untuk rehabilitasi DAS, pembayaran denda atau pajak emisi, kemitraan kehutanan, dan lain-lain.
3. *Private-voluntary based investment* dalam bentuk CSR perusahaan BUMN dan Swasta murni.
4. *Private-market based investment* yang dapat didorong adalah Izin usaha jasa lingkungan karbon dan jasa lingkungan lainnya di kawasan hutan.
5. *Trust fund*, misalnya ICCTF, GEF, BLHD-RBP, dan lain-lain.
6. Hibah dan kerjasama luar negeri lainnya baik bilateral maupun multilateral.
7. *Community based* yang dapat didorong misalnya melalui skema perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan).

**Tabel 43** | Estimasi kebutuhan anggaran pada tiap klaster rencana aksi mitigasi

| No | Wilayah Pangkuan/Kerja            | Pengurangan Emisi |                | Mempertahankan Serapan Emisi |                    |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1  | KPHP Barito Hulu Unit V           | Rp                | 1.980.432.000  | Rp                           | 1.523.638.000      |
| 2  | KPHP Barito Hilir                 | Rp                | 4.460.000.000  | Rp                           | 1.820.000.000      |
| 3  | KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir | Rp                | 1.961.974.000  | Rp                           | 812.385.500        |
| 4  | KPHP Seruyan Hulu                 | Rp                | 790.798.500    | Rp                           | 221.685.000        |
| 5  | KPHP Kapuas Tengah                | Rp                | 1.694.022.500  | Rp                           | 498.821.000        |
| 6  | KPHP Kahayan Hilir                | Rp                | 2.734.400.000  | Rp                           | 500.400.000        |
| 7  | KPHP Kahayan Hulu                 | Rp                | 4.875.000.000  | Rp                           | 1.320.000.000      |
| 8  | KPHP Kotawaringin Barat           | Rp                | 1.406.451.000  | Rp                           | 498.821.000        |
| 9  | KPHP Katingan Hulu                | Rp                | 1.369.629.750  | Rp                           | 1.128.931.000      |
| 10 | KPHP Sukamara-Lamandau            | Rp                | 1.779.284.500  | Rp                           | 571.999.500        |
| 11 | KPH MURA (Murung Raya)            | Rp                | 14.201.622.000 | Rp                           | 19.200.000.000     |
| 12 | KPHP Katingan Hilir (KatHil)      | Rp                | 1.405.967.000  | Rp                           | 743.200.500        |
| 13 | KPHP Mentaya Hulu (MenHul)        | Rp                | 1.121.930.500  | Rp                           | 621.097.000        |
| 14 | KPHP Barito Tengah                | Rp                | 3.974.394.000  | Rp                           | 4.127.679.120      |
| 15 | KPHL Kapuas Kahayan               |                   |                |                              |                    |
| 16 | Konsesi PBPH                      |                   |                | Rp                           | 35.425.648.046.732 |
| 17 | Kawasan Konservasi                | Rp                | 1.882.101.000  | Rp                           | 13.180.550.000     |
|    |                                   | Rp                | 45.638.006.750 | Rp                           | 35.472.417.254.352 |
|    |                                   |                   |                |                              |                    |

|  | Meningkatkan Serapan Emisi  |                 | Kelembagaan               |                 | Kegiatan Pendukung |                   | Total |                    |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|
|  | Rp                          | 2.304.684.500   | Rp                        | 3.570.316.000   | Rp                 | 937.907.050       | Rp    | 10.316.977.550     |
|  | Rp                          | 15.500.000.000  | Rp                        | 17.350.000.000  | Rp                 | 3.913.000.000     | Rp    | 43.043.000.000     |
|  | Rp                          | 1.165.000.000   | Rp                        | 4.260.632.000   | Rp                 | 819.999.150       | Rp    | 9.019.990.650      |
|  | Rp                          | 305.565.000     | Rp                        | 1.801.072.000   | Rp                 | 311.912.050       | Rp    | 3.431.032.550      |
|  | Rp                          | 450.000.000     | Rp                        | 3.375.622.500   | Rp                 | 601.846.600       | Rp    | 6.620.312.600      |
|  | -                           |                 | Rp                        | 775.000.000     | -                  |                   | Rp    | 4.009.800.000      |
|  | Rp                          | 6.500.000.000   | Rp                        | 12.300.000.000  | Rp                 | 2.499.500.000     | Rp    | 27.494.500.000     |
|  | Rp                          | 450.000.000     | Rp                        | 3.375.622.500   | Rp                 | 573.089.450       | Rp    | 6.303.983.950      |
|  | Rp                          | 1.203.335.500   | Rp                        | 3.499.493.500   | Rp                 | 953.365.625       | Rp    | 8.154.755.375      |
|  | Rp                          | 450.000.000     | Rp                        | 1.587.360.000   | Rp                 | 438.864.400       | Rp    | 4.827.508.400      |
|  | Rp                          | 38.000.000.000  | Rp                        | 29.000.000.000  | Rp                 | 10.040.162.200    | Rp    | 110.441.784.200    |
|  | Rp                          | 1.882.685.000   | Rp                        | 3.289.123.000   | Rp                 | 732.097.550       | Rp    | 8.053.073.050      |
|  | Rp                          | 1.943.245.000   | Rp                        | 2.226.660.400   | Rp                 | 591.293.290       | Rp    | 6.504.226.190      |
|  | Rp                          | 718.413.000     | Rp                        | 3.737.983.300   | Rp                 | 373.798.330       | Rp    | 12.932.267.750     |
|  |                             |                 |                           |                 |                    |                   |       |                    |
|  | Rp                          | 789.159.850.000 | Rp                        | 129.999.400.000 | Rp                 | 3.634.480.729.673 | Rp    | 39.979.288.026.406 |
|  | Rp                          | 416.598.134.820 |                           |                 | Rp                 | 43.166.078.582    | Rp    | 474.826.864.402    |
|  | <b>Rp 1.276.630.912.820</b> |                 | <b>Rp 220.148.285.200</b> |                 | Rp                 | 3.700.433.643.950 | Rp    | 40.715.268.103.073 |
|  |                             |                 |                           |                 | pembulatan         |                   | Rp    | 40.715.300.000.000 |





# BAB 06



MONITORING DAN EVALUASI

## BAB VI | MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan rutin untuk menilai suatu program yang mencakup pengamatan terhadap input, proses, dan output sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Monitoring dapat dilakukan dengan pengumpulan data dan analisis informasi berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan secara sistematis sehingga dapat diidentifikasi dan diantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul.

Evaluasi adalah penilaian dampak dari program dan kegiatan yang sudah dilakukan setelah waktu tertentu. Mekanisme evaluasi terdiri dari 3 aspek, yaitu relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Relevansi menggambarkan sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan yang dirumuskan. Efektifitas mengukur sejauh mana sebuah kegiatan telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Efisiensi mengukur keluaran secara kualitatif dan kuantitatif dibandingkan dengan input sumber daya. Dari kegiatan evaluasi pada akhirnya akan didapatkan informasi dan pelajaran dari pengalaman pelaksanaan program/kegiatan, output, manfaat, dan dampak dari program yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi sebagai umpan balik bagi manajemen untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan selanjutnya.

Pada Rencana Kerja tingkat sub nasional Kalimantan Tengah ini, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme berikut:

1. Monitoring dan evaluasi rutin tahunan, dimana penilaian dilakukan setiap akhir tahun kegiatan/anggaran, yang dilakukan terhadap capaian kuantitas dan kualitas setiap kegiatan yang direncanakan.
2. Monitoring dan Evaluasi tertentu, dimana penilaian dilakukan apabila terjadi perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak akibat adanya perubahan arah kebijakan maupun faktor lainnya (misalnya terjadi bencana alam).

Monitoring dan evaluasi juga dilakukan berdasarkan target dan volume capaian yang telah ditetapkan dan jangka waktu untuk mencapai target dan volume capaian pada masing-masing kegiatan.









# BAB 07



PENUTUP

## BAB VII | PENUTUP

Rencana kerja tingkat sub nasional Kalimantan Tengah ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh UPT KLHK, OPD, dan para pihak yang berkepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah intervensi sebesar 12.483.536 Hektar, maka provinsi Kalimantan Tengah akan berkontribusi sekitar 43% dari pencapaian target nasional.

Rencana Operasional (RO) aksi mitigasi dari RO1 hingga RO12 yang disusun pada renja sub nasional Kalimantan Tengah ini memiliki target luasan sesuai yang ditetapkan nasional. Beberapa RO bahkan melebihi dari target luasan yang ditetapkan, misalnya pada RO4 Pembangunan Hutan Tanaman yang akan dilakukan pada wilayah seluas 208.412 hektar, melebihi target nasional pada dokumen Renops FOLU NET SINK 2030 yang seluas 131.314 hektar untuk wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Dengan penambahan luas wilayah intervensi program dan kegiatan rencana aksi mitigasi, maka diharapkan pencapaian target (minimum) pengurangan emisi di provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai.

Pada akhirnya, seluruh rencana aksi, target, program, dan kegiatan yang tersusun pada rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi komitmen kegiatan bersama untuk dapat memenuhi target penurunan emisi yang ditargetkan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen Rencana Kerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sub Nasional Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen hidup (*living document*) yang akan selalu diupdate secara berkala mengikuti variasi wilayah dan kondisi masing-masing lokus pelaksanaan dan perkembangan kebijakan yang ada.

## Daftar Pustaka

Parish F, Sirin A, Charman D, Joosten H, Minayeva T, Silvius M, Stringer L (eds) (2008) Assessment on peatlands, biodiversity and climate change: main report. Global EnviRONment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International, Wageningen 179 pp.

Pradana, I. (2021). *Strategi Pengendalian Ekosistem MangROve Berdasarkan Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Pengembangan Kawasan Industri Kariangau*. Institut Teknologi Kalimantan,

Setiawan, Y., & Adnan, F. J. J. T. L. (2021). MODEL DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE (DPSIR) DALAM MENILAI KUALITAS UDARA KABUPATEN KUTAI BARAT. *4*(2), 31-36.

Setyawan, R., Rusdiansyah, A., & Prasetya, H. J. I.-T. (2012). Identifikasi Kualitas Perairan Di Sungai Kahayan Dari Keberadaan Sistem Keramba Studi Kasus Sungai Kahayan Kecamatan Pahandut Kalimantan Tengah. *13*(2), 192-198.

Susanto, M. (2021). *Status Pencemaran Air Sungai Di Sub Das Petangkep Kabupaten Barito Timur PROvinsi Kalimantan Tengah*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.

# Lampiran

**Lampiran 1** | Tabel perbandingan luasan indikatif pada dokumen RENOPS FOLUNETSINK 2030 dan hasil perbaikan sesuai

| NO          | KABUPATEN/KOTA     | R01       |           | R02       |           | Indikatif |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |                    | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan |           |
| 1           | Barito Selatan     | 73.292    | 73.292    | 34.323    | 34.323    |           |
| 2           | Barito Timur       | 20.214    | 20.214    | 7.166     | 7.166     |           |
| 3           | Barito Utara       | 102.591   | 102.591   |           | -         |           |
| 4           | Gunung Mas         | 100.854   | 100.855   |           | -         | 7.707     |
| 5           | Kapuas             | 104.628   | 104.629   | 90.309    | 90.309    | 2.351     |
| 6           | Katingan           | 226.009   | 226.009   | 43.506    | 43.570    | 13.112    |
| 7           | Kota Palangkaraya  | 9.126     | 9.126     | 13.062    | 13.062    |           |
| 8           | Kotawaringin Barat | 154.780   | 154.780   | 89.639    | 89.639    | 679       |
| 9           | Kotawaringin Timur | 243.011   | 243.014   | 68.859    | 68.859    | 65        |
| 10          | Lamandau           | 121.954   | 121.954   | 43        | 43        | 4.373     |
| 11          | Murung Raya        | 60.968    | 60.968    |           | -         | 48.689    |
| 12          | Pulangpisau        | 19.872    | 19.872    | 114.609   | 114.609   | 10        |
| 13          | Seruyan            | 164.114   | 164.114   | 50.810    | 50.810    | 136       |
| 14          | Sukamara           | 4.521     | 4.521     | 2.882     | 2.882     |           |
| JUMLAH (Ha) |                    | 1.405.932 | 1.405.937 | 515.207   | 515.272   | 77.122    |

| NO | KABUPATEN/KOTA     | R07       |           | R08       |           | R09       |           |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                    | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan |
| 1  | Barito Selatan     | 138.578   | 138.578   | 17.284    | 17.284    | 162       | 98        |
| 2  | Barito Timur       | 84.467    | 84.467    | 15.058    | 15.058    | 8         | 8         |
| 3  | Barito Utara       | 223.783   | 223.783   | 23.362    | 23.362    |           | -         |
| 4  | Gunung Mas         | 188.280   | 188.280   | 48.245    | 48.245    |           | -         |
| 5  | Kapuas             | 116.825   | 116.825   | 83.256    | 83.256    | 19.138    | 21.374    |
| 6  | Katingan           | 235.214   | 235.214   | 60.849    | 61.513    | 2.852     | 2.677     |
| 7  | Kota Palangkaraya  | 14.762    | 14.762    | 10.931    | 11.590    |           | -         |
| 8  | Kotawaringin Barat | 47.831    | 47.831    | 96.621    | 96.622    | 12.229    | 11.711    |
| 9  | Kotawaringin Timur | 251.010   | 251.010   | 53.058    | 53.058    | 89.397    | 88.402    |
| 10 | Lamandau           | 78.324    | 78.324    | 26.855    | 26.854    | 55        | 26        |

ai rencana operasional aksi mitigasi di Provinsi Kalimantan Tengah

| R03 |           | R04       |           | R05       |           | R06       |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan |
|     | -         | 12.159    | 13.303    | 40.000    | 40.000    | 39.166    | 39.166    |
|     | -         | 1.052     | 1.876     | 7.549     | 7.549     | 7.357     | 7.357     |
|     | -         | 4.243     | 8.543     | 265.618   | 265.618   | 265.433   | 265.433   |
|     | 7.707     | 1.307     | 4.809     | 25.334    | 25.334    | 24.725    | 24.725    |
|     | 2.351     | 11.090    | 51.273    | 23.014    | 23.014    | 19.930    | 19.930    |
|     | 13.112    | 13        | 1.454     | 41.431    | 41.431    | 39.399    | 39.399    |
|     | -         |           | 5.793     | 1.679     | 1.679     | 1.212     | 1.212     |
|     | 679       | 4.844     | 10.568    | 3.599     | 3.599     | 1.933     | 1.933     |
|     | 65        | 24.723    | 30.881    | 6.911     | 6.911     | 6.046     | 6.046     |
|     | 4.373     | 392       | 6.398     | 15.150    | 15.150    | 11.248    | 11.248    |
|     | 48.689    | 260       | 800       | 85.250    | 85.250    | 84.876    | 84.876    |
|     | 10        | 2.045     | 2.725     | 3.434     | 3.434     | 1.111     | 1.111     |
|     | 136       | 69.185    | 69.925    | 34.061    | 34.061    | 18.862    | 18.862    |
|     | -         | 1         | 65        | 26        | 26        |           |           |
|     | 77.122    | 131.314   | 208.412   | 553.053   | 553.053   | 521.298   | 521.298   |

|  | R010      |           | R011      |           | R012      |           | JUMLAH (Ha) |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|  | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan | Indikatif | Perbaikan | Indikatif   | Perbaikan |
|  | 43.724    | 49.782    | 142.799   | 142.799   |           | -         | 541.487     | 548.626   |
|  | 8.906     | 8.103     | 21.650    | 21.650    |           | -         | 173.426     | 173.448   |
|  |           | -         | 213.424   | 213.424   |           | -         | 1.098.454   | 1.102.754 |
|  |           | -         | 391.431   | 391.431   |           | -         | 787.882     | 791.385   |
|  | 152.677   | 195.281   | 652.047   | 652.047   | 788       | 788       | 1.276.052   | 1.361.076 |
|  | 75.825    | 32.897    | 769.543   | 769.543   | 4.079     | 4.079     | 1.511.831   | 1.470.897 |
|  | 32.450    | 33.738    | 78.623    | 78.623    |           | -         | 161.845     | 169.585   |
|  | 110.591   | 128.607   | 118.849   | 118.849   | 8.388     | 8.388     | 649.983     | 673.206   |
|  | 143.456   | 103.325   | 316.434   | 316.434   | 4.710     | 4.710     | 1.207.680   | 1.172.714 |
|  | 261       | 261       | 369.171   | 369.171   |           | -         | 627.824     | 633.799   |

|             |             |           |           |         |         |         |         |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 11          | Murung Raya | 157.649   | 157.670   | 24.294  | 24.294  |         | -       |
| 12          | Pulangpisau | 68.325    | 68.325    | 61.824  | 62.502  | 67.591  | 67.553  |
| 13          | Seruyan     | 242.874   | 242.874   | 109.353 | 109.353 | 24.708  | 24.464  |
| 14          | Sukamara    | 43.474    | 43.474    | 23.115  | 23.115  | 1.960   | 1.788   |
| JUMLAH (Ha) |             | 1.891.395 | 1.891.417 | 654.105 | 656.105 | 218.101 | 218.101 |

Lampiran 2 | Tabel arahan pelaksanaan aksi mitigasi Indonesia's FOLUNETSINK 2030 berdasarkan wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Tengah

| Nama KPHL/KPHP                   |         |        |        |        |         |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                                  | R01     | R02    | R03    | R04    | R05     |
| KPHL Gerbang Barito              | 489     | 748    |        |        | 202     |
| KPHL Kapuas Kahayan              | 1.827   | 63.238 |        |        | 1.243   |
| KPHP Barito Hilir                | 71.878  | 7.738  |        | 10.997 | 45.463  |
| KPHP Barito Hulu                 | 17.893  |        |        | 3.073  | 133.370 |
| KPHP Barito Tengah               | 13.890  |        |        | 1.676  | 98.018  |
| KPHP Kahayan Hilir               | 7.031   | 34.841 |        |        | 86      |
| KPHP Kahayan Hulu                | 122.273 | 49.783 | 18.839 | 1.049  | 35.970  |
| KPHP Kahayan Tengah              | 49.301  | 2.931  | 21     | 7.781  | 7.074   |
| KPHP Kapuas Hulu                 | 14.213  |        | 1.007  | 221    | 14.260  |
| KPHP Kapuas Tengah               | 6.143   |        |        | 5.371  | 3.451   |
| KPHP Katingan Hilir              | 16.642  | 2.587  |        | 1      | 211     |
| KPHP Katingan Hulu               | 20.060  |        | 2.809  | 7      | 27.781  |
| KPHP Kotawaringin Barat          | 103.910 | 18.489 | 4.832  | 3.713  | 5.714   |
| KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah | 309.463 | 160    | 178    | 9.605  | 8.774   |



|  |           |           |           |           |        |        |            |            |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|
|  |           | -         | 1.661.394 | 1.661.394 |        | -      | 2.123.379  | 2.123.940  |
|  | 238.238   | 254.672   | 131.149   | 131.149   | 19.831 | 19.831 | 728.039    | 745.794    |
|  | 167.188   | 160.553   | 468.035   | 468.035   | 9.953  | 9.953  | 1.359.279  | 1.353.140  |
|  | 74.573    | 80.668    | 6.632     | 6.632     |        | -      | 157.185    | 163.172    |
|  | 1.047.888 | 1.047.887 | 5.341.181 | 5.341.181 | 47.750 | 47.750 | 12.404.346 | 12.483.536 |

nsi Kalimantan Tengah

| Rencana Operasional |         |         |        |        |         |         |        |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 5                   | R06     | R07     | R08    | R09    | R010    | R011    | R012   |
|                     | 202     | 4.582   | 1.011  | 64     | 22.480  | 89.100  |        |
|                     |         | 11.210  | 18.550 | 7.486  | 121.619 | 128.398 | 8      |
|                     | 45.212  | 70.300  | 12.094 | 8      | 6.376   | 24.296  |        |
|                     | 133.364 | 40.354  | 8.177  |        |         | 81.487  |        |
|                     | 97.970  | 43.475  | 4.247  |        |         | 101.988 |        |
|                     |         | 18.987  | 36.841 | 61.106 | 153.099 | 40.111  | 18.538 |
|                     | 35.678  | 68.970  | 19.138 |        |         | 332.522 |        |
|                     | 5.366   | 22.195  | 26.960 | 306    | 36.366  | 220.741 |        |
|                     | 12.371  | 38.514  | 16.770 |        | 280     | 295.426 |        |
|                     | 2.997   | 8.296   | 11.399 |        | 3.513   | 159.408 |        |
|                     | 1       | 17.246  | 1.753  |        | 11.400  | 115.720 | 2.321  |
|                     | 26.587  | 82.914  | 27.030 |        |         | 514.332 |        |
|                     | 4.436   | 23.765  | 17.719 | 2.358  | 30.007  | 117.046 | 185    |
|                     | 8.507   | 103.681 | 31.629 | 2.657  | 192     | 301.200 |        |



|                                   |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir | 32.256 | 84.482 |        | 82.393 | 5.167  |
| KPHP Murung Raya                  | 12.825 |        | 48.664 | 184    | 83.790 |
| KPHP Seruyan Hulu                 |        |        | 221    |        | 19.833 |
| KPHP Sukamara Lamandau            | 9.819  | 1.501  | 22     | 207    | 9.544  |

**Lampiran 3** | Tabel Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berada pada areal aksi mitigasi rencana operasi

| JENIS PBPH | NAMA PBPH                                          | R01    | R02 | R03   | R04 |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|
| HHK-HA     | PT AGATHIS ALAM INDONESIA (DH. AKHATES PLYWOOD)    | -      | -   | 7     | -   |
|            | PT AGRA PRIMERA PLANTATION (DH. WANAKAYU BATUPUTH) |        |     |       |     |
|            | PT AGROMAS KENCANA ABADI                           | 0      | -   | -     | -   |
|            | PT AMPRAH MITRA JAYA                               | 5      | -   | -     | -   |
|            | PT AUSTRAL BYNA                                    | 46.597 | -   | -     | -   |
|            | PT AYA YAYANG INDONESIA                            |        |     |       |     |
|            | PT BARITO PUTERA                                   | -      | -   | -     | -   |
|            | PT BERKAT CAHAYA TIMBER                            | 55.766 | -   | 65    | -   |
|            | PT BINA MULTI ALAM LESTARI                         | 304    | -   | -     | -   |
|            | PT BUMIMAS PERMATA ABADI                           | 1.489  | -   | -     | -   |
|            | PT CAKRA SEJATI SEMPURNA                           | -      | -   | -     | -   |
|            | PT CARUS INDONESIA                                 | 5.772  | -   | 8.084 | -   |
|            | PT CENTRAL KALIMANTAN ABADI                        | 22.600 | -   | -     | -   |

|  |        |         |        |        |         |           |       |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-------|
|  | 4.542  | 154.786 | 34.486 | 19.774 | 142.371 | 107.942   | 3.227 |
|  | 83.686 | 50.580  | 14.309 |        |         | 1.626.343 |       |
|  | 9.657  | 32.168  | 4.615  |        |         | 308.209   |       |
|  | 5.620  | 65.554  | 29.271 | 933    | 51.753  | 204.686   |       |

sional

|  | R05     | R06     | R07    | R08   | R09 | R010 | R011   | R012 |
|--|---------|---------|--------|-------|-----|------|--------|------|
|  | 497     | 497     | 413    | 248   | -   | -    | 93.566 |      |
|  |         |         |        |       |     |      | 1.478  |      |
|  | 305     | 298     | 5.367  | 1.768 | -   | -    | 15.306 |      |
|  | 2.398   | 549     | 5.439  | 975   | -   | -    | 44.827 |      |
|  | 131.482 | 131.458 | 86.975 | 6.924 | -   | -    | 19.673 |      |
|  |         |         |        |       |     |      | 2.066  |      |
|  | 8.143   | 8.130   | 8.974  | 1.983 | -   | -    | 15.226 |      |
|  | 2.181   | 1.961   | 46.334 | 9.369 | -   | -    | 60.684 |      |
|  | 473     | 439     | 2.891  | 933   | -   | -    | 32.379 |      |
|  | 2.246   | 458     | 10.455 | 1.913 | -   | -    | 29.743 |      |
|  | -       | -       | 21     |       | -   | -    | 32.036 |      |
|  | 10.060  | 10.059  | 2.085  | 423   | -   | -    | 58.891 |      |
|  | 481     | 260     | 2.094  | 968   | -   | -    | 35.945 |      |

|            | PT DASA INTIGA                   | 14.503 | 926 | -     | -   |
|------------|----------------------------------|--------|-----|-------|-----|
|            | PT DWIMA JAYA UTAMA              | 46.708 | -   | -     | -   |
|            | PT EAST POINT INDONESIA          | 19.768 | -   | -     | -   |
| JENIS PBPH | NAMA PBPH                        | R01    | R02 | R03   | R04 |
|            | PT ERNA DJULIAWATI               | 4.461  | -   | -     | -   |
|            | PT ERYTHRINA NUGRAHA MEGAH       | 26.275 | -   | 2.321 | -   |
|            | PT FITAMAYA ASMAPARA             | 29.286 | -   | 4.400 | -   |
|            | PT GAUNG SATYA GRAHA AGRINDO     | 6.745  | -   | 1.486 | -   |
|            | PT GRAHA SENTOSA PERMAI          | 1.515  | -   | 344   | -   |
|            | PT GUNUNG MERANTI                | 29     | -   | 5.609 | -   |
|            | PT GUNUNG MURO WAHANAJAYA        | -      | -   | -     | -   |
|            | PT HASIL KALIMANTAN JAYA         | 1.342  | -   | -     | -   |
|            | PT HASNUR JAYA UTAMA             | 7.790  | -   | -     | -   |
|            | PT HUTAN DOMAS RAYA              | -      | -   | 2.840 | -   |
|            | PT HUTAN MULYA                   | 471    | -   | -     | -   |
|            | PT HUTANINDO LESTARI RAYA TIMBER | 13.610 | -   | 2.845 | -   |
|            | PT INDEXIM UTAMA CORP.           | 809    | -   | -     | -   |
|            | PT INTRADO JAYA INTIGA           | 45.120 | -   | -     | -   |
|            | PT JOLOY MOSAK                   | 710    | -   | -     | -   |

|  | 1.582  | 1.562  | 17.154 | 5.360 | -   | 299  | 97.536  |      |
|--|--------|--------|--------|-------|-----|------|---------|------|
|  | 2.818  | 2.589  | 17.343 | 3.920 | -   | -    | 103.543 |      |
|  | 1.161  | 1.148  | 18.857 | 8.008 | -   | -    | 18.621  |      |
|  | R05    | R06    | R07    | R08   | R09 | R010 | R011    | R012 |
|  | 11.700 | 3.039  | 26.262 | 3.851 | -   | -    | 141.089 |      |
|  | 1.127  | 1.127  | 34     | 263   | -   | -    | 40.588  |      |
|  | 4.951  | 4.949  | 3.156  | 432   | -   | -    | 33.952  |      |
|  | 1.572  | 1.566  | 3.770  | 774   | -   | -    | 43.469  |      |
|  | 1.313  | 1.298  | 8.796  | 1.273 | -   | -    | 34.331  |      |
|  | 17.247 | 17.239 | 2.120  | 1.429 | -   | -    | 71.508  |      |
|  | 7.427  | 7.427  | 2.309  | 266   | -   | -    | 32.552  |      |
|  | 1.405  | 1.283  | 9.852  | 7.487 | -   | -    | 17.424  |      |
|  | 7.790  | 7.790  | 21.602 | 768   | -   | -    | -       |      |
|  | 10.354 | 10.218 | 6.541  | 487   | -   | -    | 77.768  |      |
|  | 698    | 648    | 10.767 | 4.522 | -   | -    | 35.194  |      |
|  | 8.683  | 7.221  | 3.214  | 392   | -   | -    | 92.618  |      |
|  | 50.063 | 50.063 | 1.608  |       | -   | -    | 63      |      |
|  | 752    | 710    | 3.491  | 2.023 | -   | -    | 44.409  |      |
|  | 303    | 302    | 5.451  | 260   | -   | -    | 11.793  |      |

|            | PT KAHAYAN TERANG ABADI          | -      | -   | 3.407  | -   |
|------------|----------------------------------|--------|-----|--------|-----|
|            | PT KALIMANTAN SATYA KENCANA      |        |     |        |     |
|            | PT KARDA TRADES                  | 11.772 | -   | -      | -   |
|            | PT KARYA DELTA PERMAI            | 876    | -   | 24     | -   |
|            | PT KARYA WIJAYA SUKSES           |        |     |        |     |
| JENIS PBPB | NAMA PBPB                        | R01    | R02 | R03    | R04 |
|            | PT KAYU ARA JAYA RAYA            | 11     | -   | 3.030  | -   |
|            | PT KAYU TRIBUANA RAMA            | 74.954 | -   | -      | -   |
|            | PT KAYU WAJA                     | 717    | -   | 753    | -   |
|            | PT MENORAH LOGGINGINDO           | -      | -   | 40     | -   |
|            | PT MERANTI MUSTIKA               | 135    | -   | -      | -   |
|            | PT MITRA PERDANA PALANGKA        | -      | -   | 7.130  | -   |
|            | PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA | -      | -   | 30.041 | -   |
|            | PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG      | 3.098  | -   | -      | -   |
|            | PT PEMANTANG ABADITAMA           | 58     | -   | -      | -   |
|            | PT PRABA NUGRAHA TECHNOLOGY      | 1.002  | -   | -      | -   |
|            | PT RANGGAU ABDINUSA              | 5.606  | -   | -      | -   |
|            | PT RINANDA INTI LESTARI          | 6.064  | -   | -      | -   |
|            | PT SAMUDERA REJEKI PERKASA       | -      | -   | 3.088  | -   |

|  | 9.823  | 9.823  | 224    | 64    | -   | -    | 39.722 |      |
|--|--------|--------|--------|-------|-----|------|--------|------|
|  |        |        |        |       |     |      | 4      |      |
|  | 2.855  | 2.839  | 10.951 | 1.799 | -   | -    | 74.407 |      |
|  | 3.570  | 3.565  | 3.881  | 1.885 | -   | -    | 68.758 |      |
|  |        |        |        |       |     |      | 0      |      |
|  | R05    | R06    | R07    | R08   | R09 | R010 | R011   | R012 |
|  | 4.972  | 4.940  | 4.101  | 412   | -   | -    | 77.711 |      |
|  | 1.031  | 1.021  | 7.301  | 5.985 | -   | -    | 74.773 |      |
|  | 1.043  | 990    | 6.741  | 2.347 | -   | -    | 26.766 |      |
|  | 1.386  | 1.384  | 104    | 332   | -   | -    | 54.233 |      |
|  | 1.397  | 1.382  | 16.501 | 2.018 | -   | -    | 26.046 |      |
|  | 7.487  | 7.484  | 1.360  | 141   | -   | -    | 46.209 |      |
|  | 39.251 | 39.251 | 486    | 102   | -   | -    | 94.429 |      |
|  | 750    | 746    | 7.171  | 2.248 | -   | -    | 35.281 |      |
|  | 3.925  | 3.897  | 11.007 | 1.725 | -   | -    | 34.246 |      |
|  | 887    | 818    | 2.546  | 1.539 | -   | -    | 33.933 |      |
|  | 738    | 721    | 7.379  | 1.920 | -   | -    | 40.874 |      |
|  | 836    | 830    | 8.007  | 5.040 | -   | -    | 13.090 |      |
|  | 7.246  | 7.246  | -      | 41    | -   | -    | 61.654 |      |

|            | PT SARANA PIRANTI UTAMA             | 1.896   | -     | 492    | -     |
|------------|-------------------------------------|---------|-------|--------|-------|
|            | PT SARANG SAPTA PUTRA               | -       | -     | 602    | -     |
|            | PT SARI BUMI KUSUMA (UNIT I DAN II) | 14.309  | -     | 224    | -     |
|            | PT SARMIENTO PARAKANCA TIMBER       | 161.139 | -     | -      | -     |
|            | PT SEROJA UNIVERSUM NARWASTU        |         |       |        |       |
|            | PT SIKATAN WANA RAYA                | 4.167   | -     | -      | -     |
|            | PT SINDO LUMBER                     | 15.145  | -     | -      | -     |
| JENIS PBPH | NAMA PBPH                           | R01     | R02   | R03    | R04   |
|            | PT SINERGI HUTAN SEJATI             | 1.945   | 2.628 | -      | -     |
|            | PT SUKA JAYA MAKMUR                 |         |       |        |       |
|            | PT SUMALINDO LESTARI JAYA V         |         |       |        |       |
|            | PT TAMAN RAJA PERSADA               | -       | -     | 26     | -     |
|            | PT TRISETIA CITAGRAHA               | 16.085  | -     | -      | -     |
|            | PT TRISETIA INTIGA                  | 26.340  | -     | -      | -     |
|            | PT WANA INTI KAHURIPAN INTIGA       | 2.291   | -     | -      | -     |
| Jumlah     |                                     | 699.288 | 3.554 | 76.856 | -     |
| HHK-HT     | PT AGRO BORNEO LESTARI              | 1       | -     | -      | 388   |
|            | PT ASTA WEDYA BERSAMA               | 35      | -     | -      | 3.822 |
|            | PT BABUGUS WAHANA LESTARI           | 1       | -     | -      | 2.886 |

|  | 2.895   | 2.895   | 3.867   | 927     | -   | -     | 40.909    |      |
|--|---------|---------|---------|---------|-----|-------|-----------|------|
|  | 1.348   | 1.348   | 3.108   | 1.802   | -   | -     | 42.185    |      |
|  | 19.010  | 17.570  | 29.880  | 5.872   | -   | -     | 145.208   |      |
|  | 13.536  | 9.138   | 22.290  | 6.488   | -   | -     | 169.000   |      |
|  |         |         |         |         |     |       | 2.154     |      |
|  | 1.175   | 1.159   | 10.786  | 3.247   | -   | -     | 30.501    |      |
|  | 35.645  | 35.645  | 1.838   | 103     | -   | -     | -         |      |
|  | R05     | R06     | R07     | R08     | R09 | R010  | R011      | R012 |
|  | 1.334   | 1.331   | 8.678   | 3.523   | -   | 1.420 | 53.478    |      |
|  |         |         |         |         |     |       | 1         |      |
|  |         |         |         |         |     |       | 28        |      |
|  | 1.897   | 1.896   | 3.436   | 860     | -   | -     | 53.875    |      |
|  | 17.052  | 17.051  | 6.622   | 196     | -   | -     | 366       |      |
|  | 2.183   | 2.039   | 14.230  | 2.659   | -   | -     | 39.263    |      |
|  | 26.233  | 26.228  | 10.432  | 544     | -   | -     | 52.279    |      |
|  | 498.719 | 477.526 | 536.302 | 120.836 | -   | 1.719 | 2.769.661 | -    |
|  | 490     | 485     | 558     | 584     | -   | -     | 9.588     |      |
|  | -       | -       | 33      |         | -   | -     | 5.774     |      |
|  | 502     | 89      | 53      | 124     | -   | -     | 15.507    |      |



|            | PT BALANGAN INDAH LESTARI       | 0      | -      | -   | 1.145  |
|------------|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
|            | PT BARATAMA PUTRA PERKASA       | 4.636  | 0      | -   | 30.578 |
|            | PT BORNEO GREEN LESTARI         | 3.198  | -      | -   | 522    |
|            | PT BORNEO SUBUR AGRO            | 0      | -      | -   | 2.777  |
|            | PT BUKIT BERINGIN MAKMUR        | 20.574 | -      | -   | 5.551  |
|            | PT BUMI HIJAU PRIMA             | 15     | -      | -   | 1.035  |
|            | PT CERIA KARYA PRANAWA          | 4.326  | 10.985 | -   | 11.641 |
|            | PT E-GRENDDO                    | 4.758  | -      | -   | 6.619  |
|            | PT GRACE PUTRI PERDANA          | 162    | -      | -   | 4.469  |
| JENIS PBPH | NAMA PBPH                       | R01    | R02    | R03 | R04    |
|            | PT HIJAU LESTARI MAKMUR         | 1.898  | -      | -   | 553    |
|            | PT HUTAN MAHLIGAI               |        |        |     | 752    |
|            | PT HUTAN PRODUKSI LESTARI       | -      | -      | -   | 1.100  |
|            | PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION | 133    | -      | -   | 30.900 |
|            | PT KALTENG GREEN RESOURCES      | 13.983 | 1.090  | 21  | 7.351  |
|            | PT KORINTIGA HUTANI             | 1.528  | -      | -   | 3.510  |
|            | PT KUSUMA PERKASA WANA          | -      | -      | -   | 6.524  |
|            | PT LANGGENG BAKTI PERSADA       | -      | -      | -   | 2.984  |
|            | PT MERANTI SEMBADA              | 418    | -      | -   | 3.609  |
|            | PT NUSA LESTARI INDAH           | 10.098 | -      | -   | 10.027 |

| 576   | 280   | 781    | 1.128 | -     | -     | 8.195  |      |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 2.636 | 2.636 | 26.450 | 478   | 65    | 176   | 2.000  |      |
| 304   | 114   | 1.692  | 3.019 | -     | -     | 3.128  |      |
| 889   | 459   | 135    | 827   | -     | -     | 18.007 |      |
| 681   | 671   | 6.907  | 3.619 | -     | -     | 19.903 |      |
| 633   | 621   | 55     | 353   | -     | -     | 18.512 |      |
| 1.032 | 544   | 13.010 | 3.603 | 1.296 | 8.692 | 15.097 |      |
| 267   | 263   | 3.464  | 1.079 | -     | -     | 4.489  |      |
| 305   | 251   | 3.160  | 7.687 | -     | -     | 12.099 |      |
| R05   | R06   | R07    | R08   | R09   | R010  | R011   | R012 |
| 101   | 97    | 1.611  | 628   | -     | -     | 6.404  |      |
| 20    | 18    | 121    | 60    | -     | -     | 8.750  |      |
| 2.157 | 2.147 | 4.051  | 9.756 | -     | -     | 55.010 |      |
| 1.220 | 1.205 | 1.868  | 862   | -     | 558   | 19.704 |      |
| 2.174 | 787   | 1.911  | 2.316 | -     | -     | 1.300  |      |
| -     | -     | 5.553  |       | -     | -     | -      |      |
| 758   | 752   | 229    | 3.064 | -     | -     | 22.518 |      |
| 3.894 | 3.893 | 2.547  | 558   | -     | -     | 352    |      |
| 1.606 | 1.584 | 17.202 | 1.410 | -     | -     | 8.682  |      |

|            | PT OCEAN BAGUS JAYA           | -      | -      | -   | 2.391   |
|------------|-------------------------------|--------|--------|-----|---------|
|            | PT PANCARAN WANANUSA          | 1.014  | -      | -   | 146     |
|            | PT PARWATA RIMBA              | 189    | -      | -   | 3.407   |
|            | PT PERINTIS ADIWANA           | 113    | -      | -   | 1.344   |
|            | PT POLA INTI RIMBA            | 2.543  | -      | -   | 797     |
|            | PT PURWA PERMAI               | 4.787  | -      | -   | 3.206   |
|            | PT PUSPAWARNA CEMERLANG       | 774    | -      | -   | 998     |
|            | PT RAMANG AGRO LESTARI        | 9.013  | 160    | -   | 3.965   |
|            | PT RAMBA ARYA CITRA           | 3.272  | -      | -   | 711     |
|            | PT RIMBA ELOK                 | 479    | -      | -   | 2.023   |
| JENIS PBPH | NAMA PBPH                     | R01    | R02    | R03 | R04     |
|            | PT RIMBUN SERUYAN             | 3.506  | 0      | -   | 33.504  |
|            | PT SANUR HASTRA MITRA BERSAMA | 11     | -      | -   | 252     |
|            | PT SIEMON AGRO                | -      | -      | -   | 7.941   |
|            | PT TAIYOUNG ENGREEN           | 64     | 16     | -   | 3.204   |
|            | PT TRIKORINDOTAMA WANAKARYA   |        |        |     | 1.353   |
|            | PT WANA HIJAU PESAGUAN        |        |        |     |         |
|            | PT WOYLA RAYA ABADI           | 88     | -      | -   |         |
| Jumlah     |                               | 91.615 | 12.251 | 21  | 203.988 |
| RE         | PT ALAM SUKSES LESTARI        | 918    | 6.071  | -   | -       |
|            | PT RIMBA MAKMUR UTAMA         | 367    | 43.320 | -   | -       |

| -      | -      | 132     | 927    | -     | -      | -       |      |
|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|------|
| 165    | 164    | 2.557   | 98     | -     | -      | 849     |      |
| 189    | 189    | 1.480   | 963    | -     | -      | -       |      |
| 480    | 479    | 927     | 1.439  | -     | -      | 11.534  |      |
| 90     | 90     | 902     | 376    | -     | -      | 3.018   |      |
| 4.376  | 4.375  | 5.951   | 1.360  | -     | -      | 411     |      |
| 131    | 130    | 7.394   | 421    | -     | -      | 644     |      |
| 1.514  | 1.513  | 22      | 361    | -     | 20     | 7.662   |      |
| 30     | 14     | 8.967   | 1.064  | -     | -      | 3.258   |      |
| 10     | 10     | 6.222   | 1.853  | -     | -      | 470     |      |
| R05    | R06    | R07     | R08    | R09   | R010   | R011    | R012 |
| 1.364  | 1.363  | 26.456  | 2.260  | -     | 32     | 2.141   | 148  |
| 162    | 162    | 58      | 197    | -     | -      | 10.883  |      |
| -      | -      | -       | 2.222  | -     | -      | -       |      |
| 433    | 364    | 5.728   | 3.911  | -     | -      | 42.786  |      |
|        |        |         |        |       |        |         |      |
|        |        |         |        |       |        | 217     |      |
| 647    | 200    | 315     | 658    | -     | -      | 5.170   |      |
| 29.836 | 25.950 | 158.502 | 59.266 | 1.360 | 9.478  | 344.063 | 148  |
| 151    | 150    | 5.958   | 308    | 8     | 5.624  | 6.839   |      |
| 80     | 1      | 1.833   | 58     | -     | 13.757 | 141.363 |      |

|        |                            |       |        |   |   |
|--------|----------------------------|-------|--------|---|---|
|        | PT RIMBA RAYA CONSERVATION | 94    | 7.510  | - | - |
| Jumlah |                            | 1.379 | 56.901 | - | - |

**Lampiran 4 |** Tabel sebaran Perhutanan Sosial pada areal rencana operasional aksi mitigasi FOLUNETSINK 2030 provinsi

| JENIS | Nama Perhutanan Sosial | R01 | R02   | R04 |
|-------|------------------------|-----|-------|-----|
| HD    | LD Buntoi              | -   | -     |     |
|       | LD Gohong              | -   | -     |     |
|       | LD Kalawa              | -   | -     |     |
|       | LD Katunjung           | -   | -     |     |
|       | LD Mantaren I          | -   | -     |     |
|       | LPHD Bahu Palawa       | -   | 397   |     |
|       | LPHD Balukon           | -   | 1.201 |     |
|       | LPHD Batampang         | -   | -     |     |
|       | LPHD Batilap           | 0   | 0     |     |
|       | LPHD Bawan             | 846 | -     |     |
|       | LPHD Bereng Rambang    | 223 | -     |     |
|       | LPHD Bukit Bamba       | 9   | 582   |     |
|       | LPHD Bukit Liti        | -   | 356   |     |
|       | LPHD Buntut Sabon      | -   | -     |     |
|       | LPHD Harowu            | -   | -     |     |
|       | LPHD Henda             | -   | -     |     |
|       | LPHD Hiyang Bana       | 698 | 46    |     |

|  |     |     |        |     |     |        |         |   |
|--|-----|-----|--------|-----|-----|--------|---------|---|
|  | 0   | -   | 6.002  | 451 | 345 | 18.274 | 7.579   |   |
|  | 231 | 151 | 13.793 | 817 | 353 | 37.655 | 155.780 | - |

si Kalimantan Tengah

| R05 | R06 | R07 | R08 | R09   | R010  | R011  | R012 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|
| -   | -   | -   | -   | -     | 7.043 | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | 3.162 | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | 4.242 | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | 2.479 | -     | 1.382 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | 1.810 | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | -     | 397   | -    |
| -   | -   | -   | -   | 31    | 285   | 1.201 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | -     | 9.627 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | -     | 9.872 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | -     | 841   | -    |
| -   | -   | -   | 36  | -     | -     | 212   | -    |
| -   | -   | -   | 163 | -     | 301   | 591   | -    |
| -   | -   | -   | 262 | 33    | 278   | 356   | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | -     | 39    | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | -     | 1.505 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -     | 3.935 | -     | -    |
| -   | -   | 1   | 36  | -     | -     | 684   | -    |

|  |                  |   |   |  |
|--|------------------|---|---|--|
|  | LPHD Intu Lingau | - | - |  |
|--|------------------|---|---|--|

| JENIS | Nama Perhutanan Sosial   | R01 | R02   | R04 |
|-------|--------------------------|-----|-------|-----|
|       | LPHD Kahanjak Atei       | 50  | -     |     |
|       | LPHD Kampung Besiq       | -   | -     |     |
|       | LPHD Karetan Sarian      | 580 | -     |     |
|       | LPHD Karuing             | 91  | -     |     |
|       | LPHD Kayu Bulan          | -   | -     |     |
|       | LPHD Lawang Kanji        | 58  | -     |     |
|       | LPHD Lawang Tamang       | -   | -     |     |
|       | LPHD Mekar Jaya          | -   | -     |     |
|       | LPHD Mendawai            | -   | 481   |     |
|       | LPHD Paduran Mulya       | -   | -     |     |
|       | LPHD Pamarunan           | -   | 696   |     |
|       | LPHD Pandinu Pantis Ebes | 495 | -     |     |
|       | LPHD Parahangan          | 65  | 1.228 |     |
|       | LPHD Pelita Muda         | -   | 582   |     |
|       | LPHD Penda Barania       | -   | -     |     |
|       | LPHD Petuk Liti          | 19  | 1.548 |     |
|       | LPHD Pilang              | 1   | 2.670 |     |
|       | LPHD Rabambang           | -   | -     |     |
|       | LPHD Rangan Hiran        | -   | -     |     |

| -     | -   | -   | -   | -   | -     | 537   | -    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|
| R05   | R06 | R07 | R08 | R09 | R010  | R011  | R012 |
| -     | -   | 47  | 153 | -   | -     | 47    | -    |
| 5     | 5   | -   | -   | -   | -     | -     | -    |
| -     | -   | -   | 23  | -   | -     | 578   | -    |
| -     | -   | -   | 0   | -   | -     | 89    | -    |
| -     | -   | -   | -   | -   | -     | 3     | -    |
| -     | -   | 47  | 12  | -   | -     | 50    | -    |
| -     | -   | -   | -   | -   | -     | 162   | -    |
| -     | -   | -   | 687 | -   | -     | -     | -    |
| -     | -   | -   | -   | -   | 1.629 | 481   | -    |
| -     | -   | 16  | 118 | -   | 583   | -     | -    |
| -     | -   | -   | 10  | 112 | 339   | 696   | -    |
| -     | -   | -   | -   | -   | -     | 488   | -    |
| 0     | -   | -   | 51  | 2   | -     | 1.293 | -    |
| 1     | -   | -   | 30  | -   | 1.401 | 583   | -    |
| -     | -   | -   | 146 | -   | 17    | -     | -    |
| 0     | -   | 0   | 2   | -   | 536   | 1.568 | -    |
| 1.358 | -   | -   | 0   | -   | 4.564 | 4.029 | -    |
| -     | -   | -   | 76  | -   | -     | -     | -    |
| -     | -   | -   | -   | -   | -     | 631   | -    |



|       | LPHD Sebangau Permai   | -     | -     |     |
|-------|------------------------|-------|-------|-----|
|       | LPHD Sei Hambawang     | 463   | -     |     |
|       | LPHD Sigi              | 2     | 568   |     |
| JENIS | Nama Perhutanan Sosial | R01   | R02   | R04 |
|       | LPHD Sumber Mukti      | -     | -     |     |
|       | LPHD Tahawa            | 27    | 409   |     |
|       | LPHD Tambak            | -     | 532   |     |
|       | LPHD Tampelas          | 1.309 | 3.299 |     |
|       | LPHD Tangkahan         | 114   | -     |     |
|       | LPHD Tanjung Sangalang | 235   | 796   |     |
|       | LPHD Tanjung Taruna    | 0     | 3.227 |     |
|       | LPHD Telaga            | 1.412 | -     |     |
|       | LPHD Tumbang Habangoi  | 3.215 | -     |     |
|       | LPHD Tumbang Manyarung | -     | -     |     |
|       | LPHD Tumbang Maraya    | 60    | -     |     |
|       | LPHD Tumbang Tarusan   | 419   | -     |     |
|       | LPHD Tumbang Tihis     | 301   | -     |     |
|       | LPHD Tumbang Tujang    | -     | -     |     |
|       | LPHD Tuwung            | -     | 488   |     |
| HKM   | GAPOKTAN 19 POKJA      | 26    | 3.795 |     |

| -   | -   | 223 | 1.325 | -   | -     | -     | -    |
|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|------|
| -   | -   | 0   | 17    | -   | -     | 463   | 467  |
| 0   | -   | -   | 5     | -   | 363   | 562   | -    |
| R05 | R06 | R07 | R08   | R09 | R010  | R011  | R012 |
| -   | -   | -   | 22    | -   | -     | -     | -    |
| -   | -   | -   | 426   | -   | -     | 437   | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | 220   | 532   | -    |
| 0   | -   | 2   | 216   | -   | -     | 4.577 | -    |
| -   | -   | -   | 31    | -   | -     | 83    | -    |
| 0   | -   | -   | 1.169 | 55  | 588   | 1.031 | -    |
| -   | -   | -   | 29    | 257 | 1.511 | 3.227 | -    |
| -   | -   | -   | 256   | -   | -     | 1.400 | -    |
| -   | -   | -   | 2     | -   | -     | 2.604 | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | -     | 1.310 | -    |
| -   | -   | 0   | 134   | -   | -     | 60    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | -     | 415   | -    |
| 0   | -   | -   | 82    | -   | -     | 296   | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | -     | 2.957 | -    |
| -   | -   | -   | 35    | -   | 464   | 488   | -    |
| -   | -   | -   | 469   | -   | 83    | 3.821 | -    |

|       | GAPOKTAN ANOI SANGKUWAK                | -     | -     |     |
|-------|----------------------------------------|-------|-------|-----|
|       | GAPOKTAN TUMBANG MUROI                 | 271   | 34    |     |
|       | GAPOKTANHUT KAPAKAT ATEI               | -     | 4.458 |     |
|       | GAPOKTANHUT KUMAI BAHAM                | 1     | -     |     |
|       | KELOMPOK HKM SIMPUR BASEWOT            | -     | -     |     |
| JENIS | Nama Perhutanan Sosial                 | R01   | R02   | R04 |
|       | KELOMPOK MASYARAKAT JASA ASANG         | 469   | -     |     |
|       | KELOMPOK MASYARAKAT MARIKOI HAPAKAT    | 420   | -     |     |
|       | KELOMPOK MASYARAKAT SOPAN LAWANG BULAN | 159   | -     |     |
|       | KOPERASI BANTUR JAYA ABADI             | 422   | -     |     |
|       | KOPERASI BUNUT JAYA                    | 8     | -     |     |
|       | KOPERASI ITAH BELUM HAPAKAT            | 53    | -     | 0   |
|       | KOPERASI KELUARGA MANDIRI              | -     | -     |     |
|       | KOPERASI MANGKIRIK MAJU JAYA           | -     | -     |     |
|       | KOPERASI MELAYU RAYA                   | 56    | -     |     |
|       | KOPERASI MIHING MANASA                 | -     | -     |     |
|       | KOPERASI PALANGKA MAS SEJAHTERA        | -     | -     |     |
|       | KOPERASI PRODUKSI PERMADAT SEJAHTERA   | -     | -     |     |
|       | KOPERASI PUTRA MAKIKIT JAYA            | -     | -     |     |
|       | KOPERASI SAKTI JAYA                    | 1.736 | -     |     |
|       | KOPERASI SAWIT BULUH SEJAHTERA         | -     | -     |     |

| -   | -   | 129   | 3   | -   | -    | -     | -    |
|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------|------|
| 1   | -   | -     | 311 | -   | 180  | 306   | -    |
| -   | -   | -     | -   | 70  | 542  | 4.458 | -    |
| -   | -   | 1     | 35  | -   | -    | 0     | -    |
| -   | -   | -     | -   | -   | 886  | -     | -    |
| R05 | R06 | R07   | R08 | R09 | R010 | R011  | R012 |
| -   | -   | -     | 4   | -   | -    | 469   | -    |
| 2   | -   | 13    | 189 | -   | -    | 387   | -    |
| -   | -   | -     | 16  | -   | -    | 159   | -    |
| 0   | -   | -     | 1   | -   | -    | 421   | -    |
| -   | -   | -     | 1   | -   | -    | 6     | -    |
| 0   | 0   | 2.118 | 42  | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | 117   | -   | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | -     | -   | -   | -    | 30    | -    |
| -   | -   | 219   | -   | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | -     | -   | -   | -    | 0     | -    |
| -   | -   | -     | -   | -   | -    | 8     | -    |
| -   | -   | 7     | 367 | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | 2     | 142 | -   | -    | -     | -    |
| 1   | -   | -     | 117 | -   | -    | 1.596 | -    |
| -   | -   | -     | -   | 10  | 816  | -     | -    |

|       | KOPERASI SEPAN RAYA            | -     | -   |     |
|-------|--------------------------------|-------|-----|-----|
|       | KOPERASI TAMPUHAK KAPAKAT ITAH | 3     | -   |     |
|       | KSU BARAOI BERSAMA             | 1.028 | -   |     |
|       | KT BATU BULAN                  | -     | -   |     |
|       | KT BATU KACAH                  | 471   | -   |     |
|       | KT BERSAMA                     | 1     | -   |     |
|       | KT BUKIT TABAT                 | 60    | -   |     |
| JENIS | Nama Perhutanan Sosial         | R01   | R02 | R04 |
|       | KT DJAPANG HARAPAN BARU II     | -     | -   |     |
|       | KT HABUNGAN LESTARI            | 67    | 357 |     |
|       | KT HANDAK MAJU                 | -     | -   |     |
|       | KT JAYA LESTARI                | -     | -   |     |
|       | KT JORONG BERSERI              | -     | -   |     |
|       | KT KARYA BAKTI                 | -     | -   |     |
|       | KT KARYA MANDIRI BERSAMA       | 807   | -   |     |
|       | KT MAKMUR BERSAMA              | -     | -   |     |
|       | KT MANGARA MANDIRI             | 457   | -   |     |
|       | KT MIAR HAYAK                  | 60    | -   |     |
|       | KT MINA SEJAHTERA              | -     | -   |     |
|       | KT SAWIT PUKUN LESTARI         | -     | -   |     |
|       | KT SUBUR MANDIRI SEJAHTERA     | 32    | 34  |     |

| -   | -   | 159 | -     | -   | -    | -    | -    |
|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|------|
| -   | -   | -   | 290   | -   | -    | 25   | -    |
| 4   | -   | 91  | 702   | -   | -    | 826  | -    |
| -   | -   | -   | 8     | -   | -    | -    | -    |
| 0   | 0   | 1   | 5     | -   | -    | 271  | -    |
| -   | -   | 0   | 146   | -   | -    | 1    | -    |
| -   | -   | -   | 306   | -   | -    | 50   | -    |
| R05 | R06 | R07 | R08   | R09 | R010 | R011 | R012 |
| -   | -   | -   | 96    | -   | -    | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | -    | 411  | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | 936  | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | 146  | -    | -    |
| -   | -   | -   | 1     | 5   | 66   | -    | -    |
| -   | -   | -   | 169   | -   | -    | -    | -    |
| 1   | -   | 0   | 43    | -   | -    | 636  | -    |
| -   | -   | 0   | 0     | -   | 393  | -    | -    |
| -   | -   | -   | 5     | -   | -    | 427  | -    |
| 1   | -   | -   | 205   | -   | -    | 60   | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | 324  | -    | -    |
| -   | -   | 124 | 1.378 | -   | -    | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -   | 976  | 65   | -    |

|       | KT SUKA MAJU KARYA MANDIRI    | -   | -     |     |
|-------|-------------------------------|-----|-------|-----|
|       | KT USAHA MAJU BERSAMA         | 71  | -     |     |
|       | KTH BATANG PAMBELOM           | 454 | -     |     |
|       | KTH BERDIKARI SEJAHTERA       | -   | -     |     |
|       | KTH BERKAT TAMANG HAPAKAT     | -   | -     |     |
|       | KTH BERMAONG RUKO             | 0   | -     |     |
|       | KTH BHAKTI KARYA ABADI        | -   | -     |     |
|       | KTH DANAU SELULUK JAYA        | -   | 930   |     |
|       | KTH ERAI PAKAT                | 206 | -     |     |
| JENIS | Nama Perhutanan Sosial        | R01 | R02   | R04 |
|       | KTH HAPAKAT JAYA              | 2   | -     | 0   |
|       | KTH IJE ATEI                  | -   | -     |     |
|       | KTH KARYA BERSAMA             | -   | -     |     |
|       | KTH KERENG MAHAGA LEWU        | -   | 171   |     |
|       | KTH KOMUNITAS KARYA MASORAIAN | -   | 2.079 |     |
|       | KTH LESTARI                   | -   | -     |     |
|       | KTH LESTARI HUTAN KATANJUNG I | -   | -     |     |
|       | KTH MAKMUR SENTOSA            | -   | -     |     |
|       | KTH MAWAR BERSEMI             | -   | 532   |     |
|       | KTH OLUNG NAANG SEJAHTERA     | -   | -     |     |
|       | KTH RIMBA LESTARI             | -   | -     |     |

| -   | -   | 813 | 0   | -   | -    | -     | -    |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|
| 0   | -   | -   | 56  | -   | -    | 72    | -    |
| 0   | -   | 17  | 2   | -   | -    | 146   | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | 220  | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | -    | 122   | -    |
| 68  | 68  | -   | -   | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | 0   | 587 | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | 61   | 930   | -    |
| 1   | -   | 598 | 105 | -   | -    | 1     | -    |
| R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R010 | R011  | R012 |
| -   | -   | 297 | 50  | 5   | 152  | 2     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | 182  | -     | -    |
| -   | -   | -   | 136 | -   | -    | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | 138  | 171   | -    |
| -   | -   | -   | -   | 465 | 825  | 2.079 | -    |
| -   | -   | 0   | 0   | -   | -    | 1.483 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | -    | 308   | -    |
| -   | -   | -   | 1   | -   | 347  | -     | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | -    | 532   | -    |
| 1   | 1   | 5   | 0   | -   | -    | 3.270 | -    |
| -   | -   | -   | -   | -   | 102  | -     | -    |



|       | KTH SAMA TAKA               | -   | -   |     |
|-------|-----------------------------|-----|-----|-----|
|       | KTH SEI GANDIS              | -   | 20  |     |
|       | KTH SEPAKAT                 | -   | 520 |     |
|       | KTH SUKSES MANYAM SEJAHTERA | 533 | -   |     |
|       | KTH SUMBER REJEKI           | -   | -   |     |
|       | KTH SUNGAI PASIR LESTARI    | -   | -   |     |
|       | KTH TANGGUL HARAPAN         | -   | -   |     |
|       | KTH TANI SEJATI             | -   | 257 |     |
|       | KTH TELUK NYATU             | -   | -   |     |
|       | KTH VUNAN SIO LESTARI       | -   | -   |     |
|       |                             |     |     |     |
| JENIS | Nama Perhutanan Sosial      | R01 | R02 | R04 |
| HTR   | GAPOKTAN BAGENDANG RAYA     | -   | 1   |     |
|       | GAPOKTAN DANDANG BERSATU    | -   | -   |     |
|       | GAPOKTAN SUMBER REJEKI      | -   | -   |     |
|       | GAPOKTANHUT HTR SENGON      | -   | -   |     |
|       | GAPOKTANHUT HUTAN MAJU      | -   | -   |     |
|       | KOPERASI BETANG TELAWANG    | -   | -   |     |
|       | KOPERASI BHAKTI KARYA ABADI | -   | -   | 42  |
|       | KOPERASI HAPAKAT            | -   | -   | 390 |
|       | KOPERASI HARAPAN ABADI      | -   | -   |     |

|     |     |     |       |       |       |      |      |
|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|------|
| -   | -   | 126 | -     | -     | -     | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | 429   | 20   | -    |
| -   | -   | -   | -     | 71    | 91    | 520  | -    |
| -   | -   | -   | 59    | -     | -     | 389  | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | -     | 238  | -    |
| -   | -   | -   | -     | 68    | 141   | -    | -    |
| -   | -   | 0   | 0     | -     | 669   | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | 338   | 257  | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | -     | 82   | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | -     | 842  | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | -     | -    | -    |
| R05 | R06 | R07 | R08   | R09   | R010  | R011 | R012 |
| 0   | -   | -   | -     | 1.569 | 3.491 | 1    | -    |
| -   | -   | -   | 387   | -     | 388   | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | 275   | -    | -    |
| -   | -   | 88  | -     | -     | -     | -    | -    |
| -   | -   | -   | 106   | -     | -     | -    | -    |
| -   | -   | -   | -     | -     | -     | 396  | -    |
| -   | -   | 53  | 1.051 | -     | -     | -    | -    |
| -   | -   | 988 | 137   | -     | -     | -    | -    |
| -   | -   | 443 | 316   | -     | -     | -    | -    |

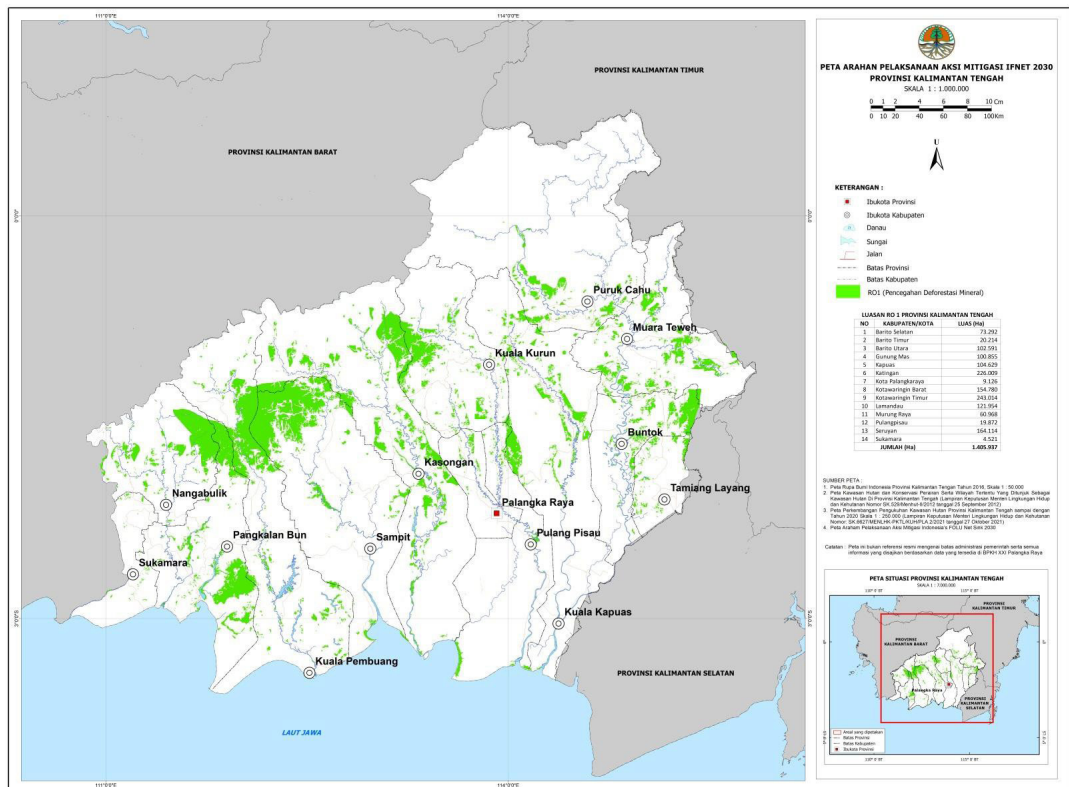
|       | KOPERASI KARYA PUTRA MIRAH     | 28    | -   |     |
|-------|--------------------------------|-------|-----|-----|
|       | KOPERASI KERUING CITRA LESTARI | -     | -   | 95  |
|       | KOPERASI KOLING HAPAKAT        | 9     | -   | 397 |
|       | KOPERASI PRACAYA               | -     | -   | 8   |
|       | KOPERASI SRIKANDI BARITO RAYA  | 187   | -   | 590 |
|       | KT BERSAMA MANDIRI             | -     | -   |     |
|       | KT DAYAK MISIK DESA SAMBI      | 389   | -   | 698 |
|       | KT DAYAK MISIK MULYAJADI       | 114   | -   | 135 |
|       | KT EKA HAPAKAT DAN HATANTIRING | 65    | -   | 57  |
|       | KT MITRA USAHA                 | -     | -   | 507 |
|       | KT SEI ANTAI PARANG HAPAKAT    | 167   | -   | 95  |
|       | KT TUMBANG TIHIS               | -     | -   |     |
|       | KTH BERKAT USAHA II            | 24    | -   |     |
| JENIS | Nama Perhutanan Sosial         | R01   | R02 | R04 |
|       | KTH BITAN SAMPANGO             | 70    | -   | 7   |
|       | KTH BUKIT RAYA                 | 1.160 | -   | 1   |
|       | KTH BUKOI MAJU BERSAMA         | -     | -   |     |
|       | KTH BURUNG HARUEI              | -     | -   | 543 |
|       | KTH DJAPANG HARAPAN BARU       | -     | -   | 18  |
|       | KTH HARAPAN BARU               | -     | -   |     |
|       | KTH HIJAU HUTAN LESTARI        | -     | -   |     |

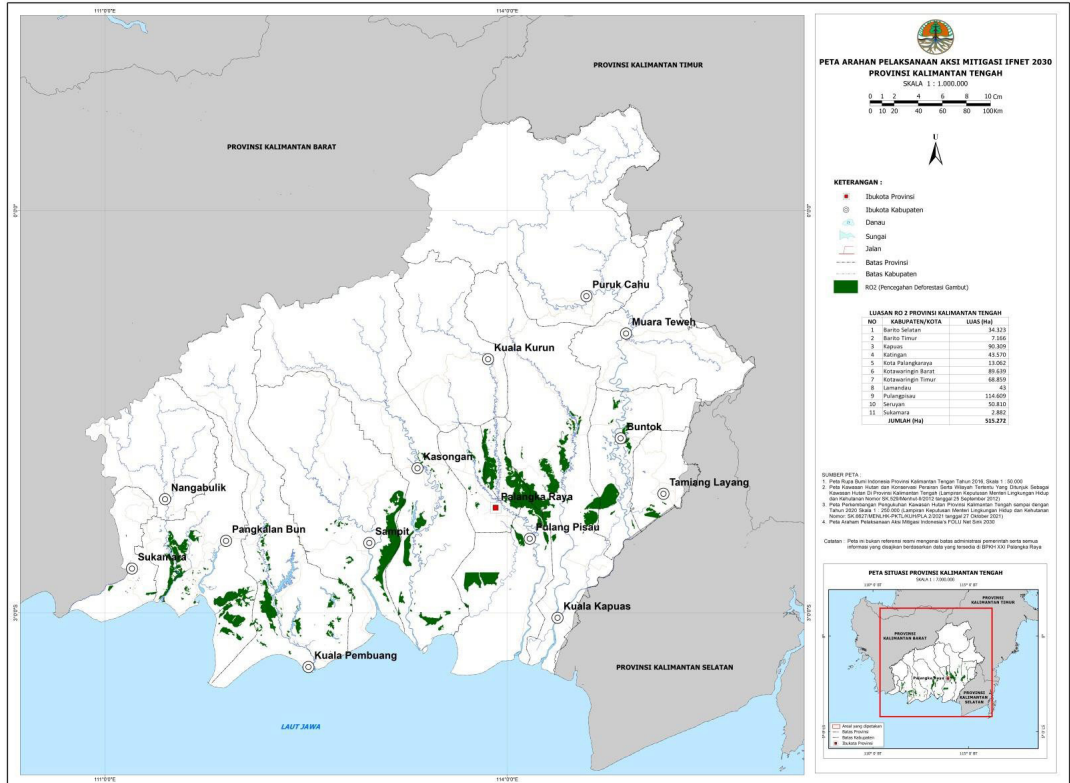
| 0   | -   | 647   | 0   | -   | -   | 28    | -   |
|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| -   | -   | 566   | -   | -   | -   | -     | -   |
| 0   | -   | 800   | 1   | -   | -   | 9     | -   |
| -   | -   | 510   | -   | -   | -   | -     | -   |
| -   | -   | 1.070 | 8   | -   | -   | -     | -   |
| -   | -   | 1.411 | 34  | -   | -   | -     | -   |
| 1   | -   | 2.629 | 15  | -   | -   | 386   | -   |
| 0   | -   | 190   | 633 | -   | -   | 76    | -   |
| 1   | 0   | 424   | 150 | -   | -   | 23    | -   |
| -   | -   | 1.617 | 95  | -   | -   | -     | -   |
| 1   | -   | 843   | 414 | -   | -   | 104   | -   |
| -   | -   | -     | 0   | -   | -   | 292   | -   |
| 0   | -   | 460   | -   | -   | -   | 22    | -   |
| R05 | R06 | R07   | R08 | R09 | R10 | R11   | R12 |
| 1   | -   | 60    | 202 | -   | -   | 97    | -   |
| 304 | -   | 249   | 54  | -   | -   | 1.094 | -   |
| -   | -   | -     | -   | -   | -   | 900   | -   |
| -   | -   | 565   | 208 | -   | -   | -     | -   |
| -   | -   | 76    | 355 | -   | -   | -     | -   |
| -   | -   | -     | -   | -   | -   | 542   | -   |
| -   | -   | 65    | 0   | -   | -   | 89    | -   |

|  |                                  |       |   |     |
|--|----------------------------------|-------|---|-----|
|  | KTH INTI WONOSARI                | 20    | - |     |
|  | KTH JIRAK SEPAKAT JAYA           | -     | - |     |
|  | KTH KARYA USAHA                  | 357   | - | 1   |
|  | KTH KATUTUN ATEI                 | 159   | - | 6   |
|  | KTH KONSU MANDIRI SEJAHTERA      | -     | - |     |
|  | KTH LAHEI MANGKUTUP USAHA MAKMUR | -     | - |     |
|  | KTH LESTARI HUTAN KATANJUNG II   | -     | - |     |
|  | KTH MANTAA HAPAKAT BERSAMA       | -     | - |     |
|  | KTH MITRA PAMAINGAN              | -     | - | 0   |
|  | KTH NYOMBA JAYA                  | 58    | - | 53  |
|  | KTH RIMBA ARUTA BERKAH           | -     | - |     |
|  | KTH SAMA HALU                    | 0     | - |     |
|  | KTH SUMBER MAKMUR LESTARI        | 165   | - |     |
|  | KTH TUWE BERSAMA MAJU            | 76    | - | 24  |
|  | KUD RIAK SIMIN                   | 3.051 | - | 111 |

|    |   |     |     |   |   |       |   |
|----|---|-----|-----|---|---|-------|---|
| -  | - | 43  | -   | - | - | 20    | - |
| -  | - | 959 | -   | - | - | -     | - |
| 0  | - | 617 | 20  | - | - | 352   | - |
| 12 | - | 118 | 16  | - | - | 129   | - |
| -  | - | -   | -   | - | - | 818   | - |
| -  | - | -   | -   | - | - | 877   | - |
| -  | - | -   | -   | - | - | 573   | - |
| -  | - | -   | -   | - | - | 781   | - |
| -  | - | 0   | -   | - | - | 438   | - |
| -  | - | 333 | 20  | - | - | 55    | - |
| -  | - | 336 | 567 | - | - | -     | - |
| 1  | 1 | 1   | 0   | - | - | 1.018 | - |
| 0  | - | 62  | 4   | - | - | 169   | - |
| 0  | - | 642 | 218 | - | - | 75    | - |
| -  | - | 116 | 21  | - | - | 4.268 | - |

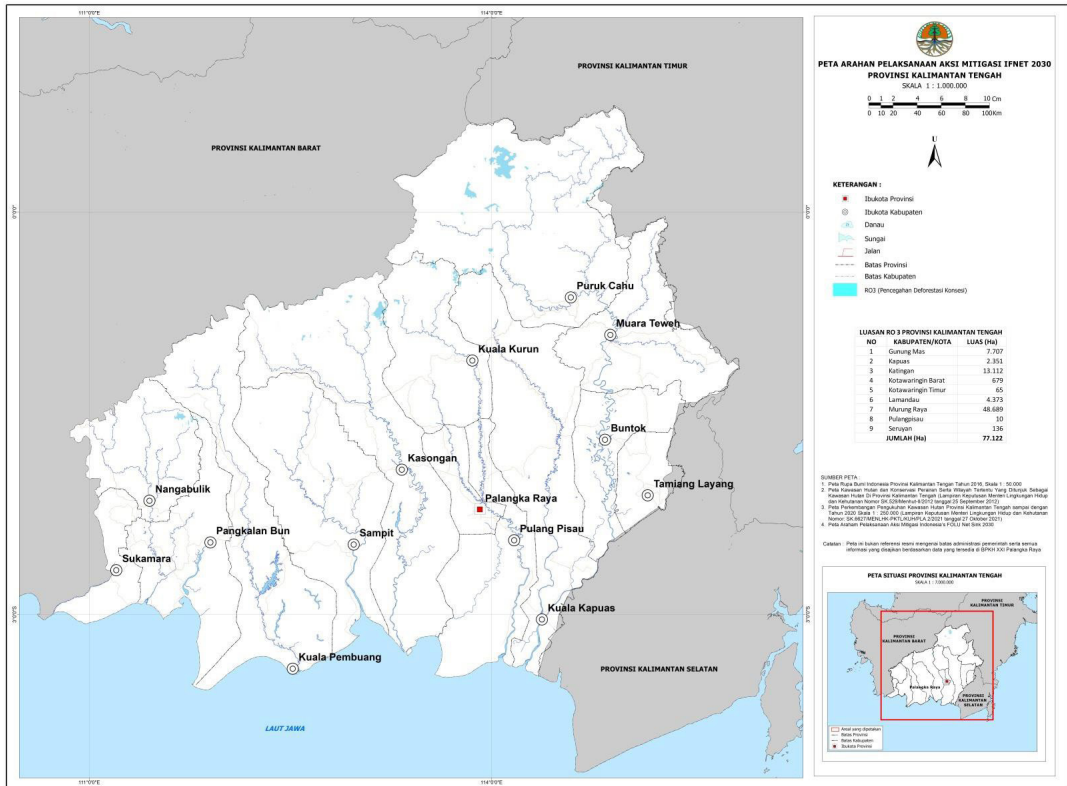
### Lampiran 5 | Peta R01 Provinsi Kalimantan Tengah

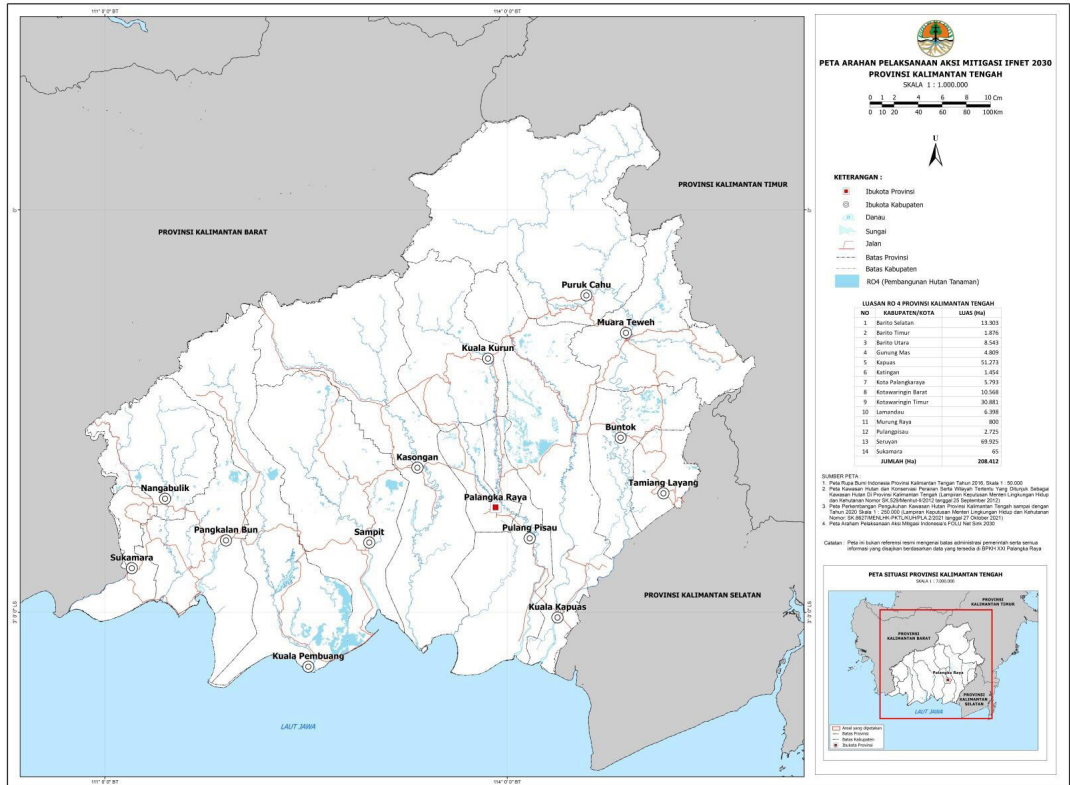




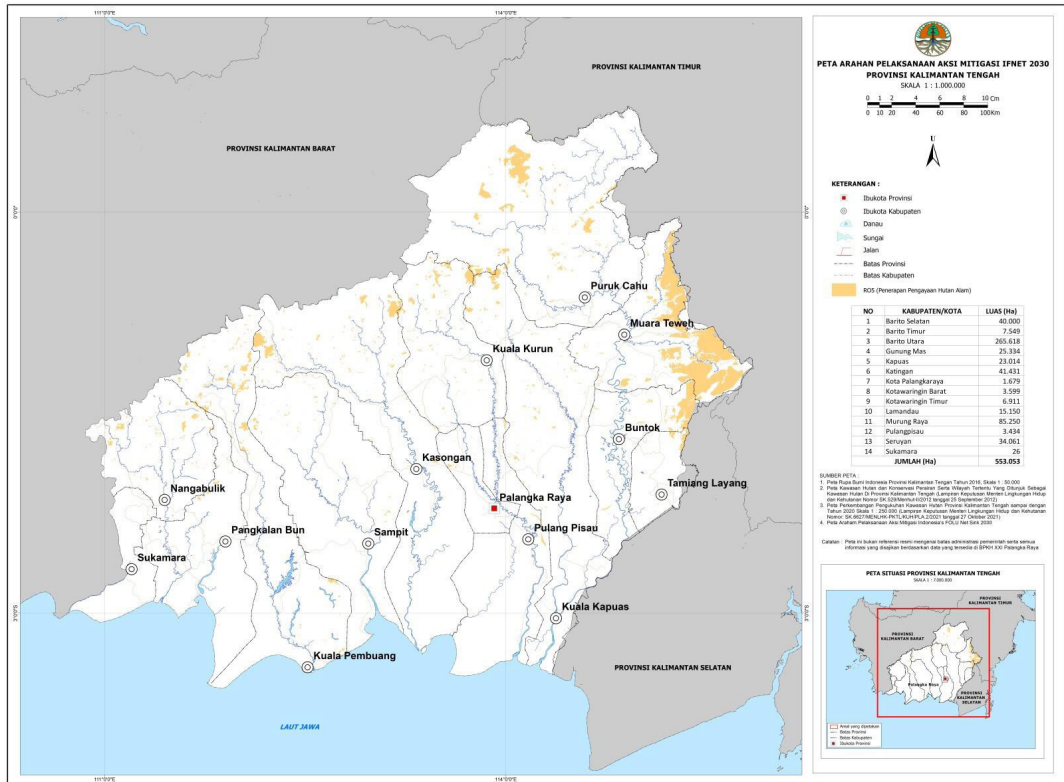


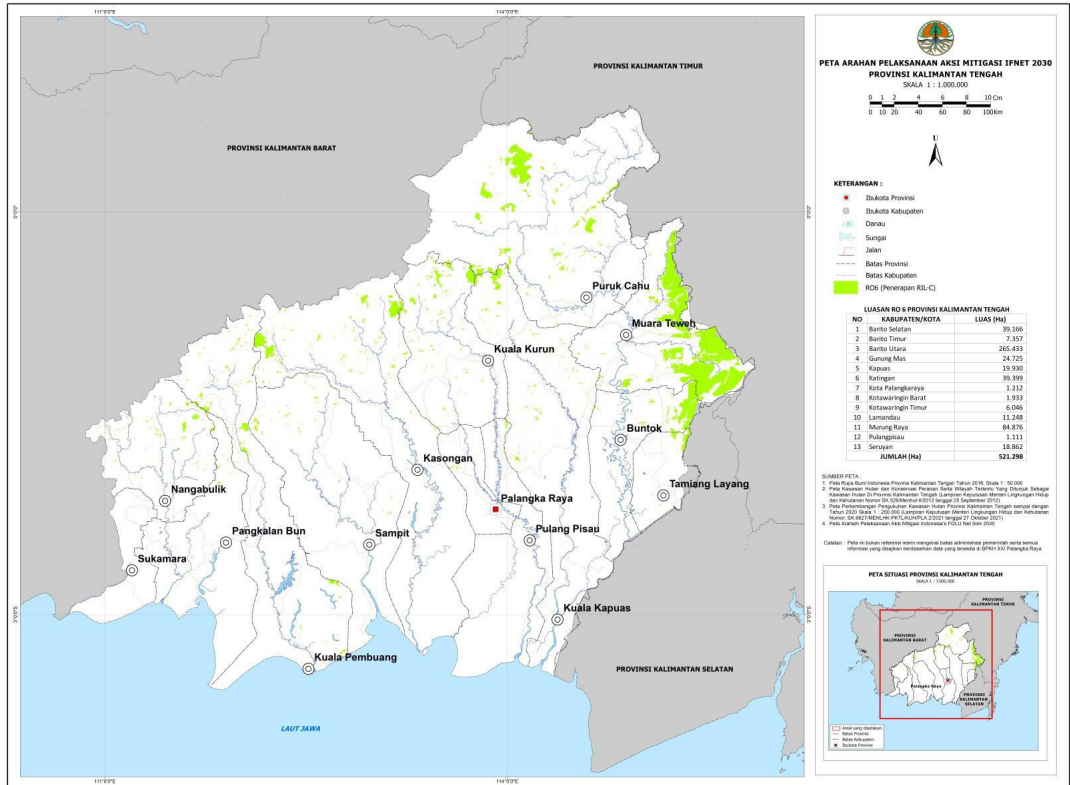
Lampiran 7 | Peta R03 Provinsi Kalimantan Tengah



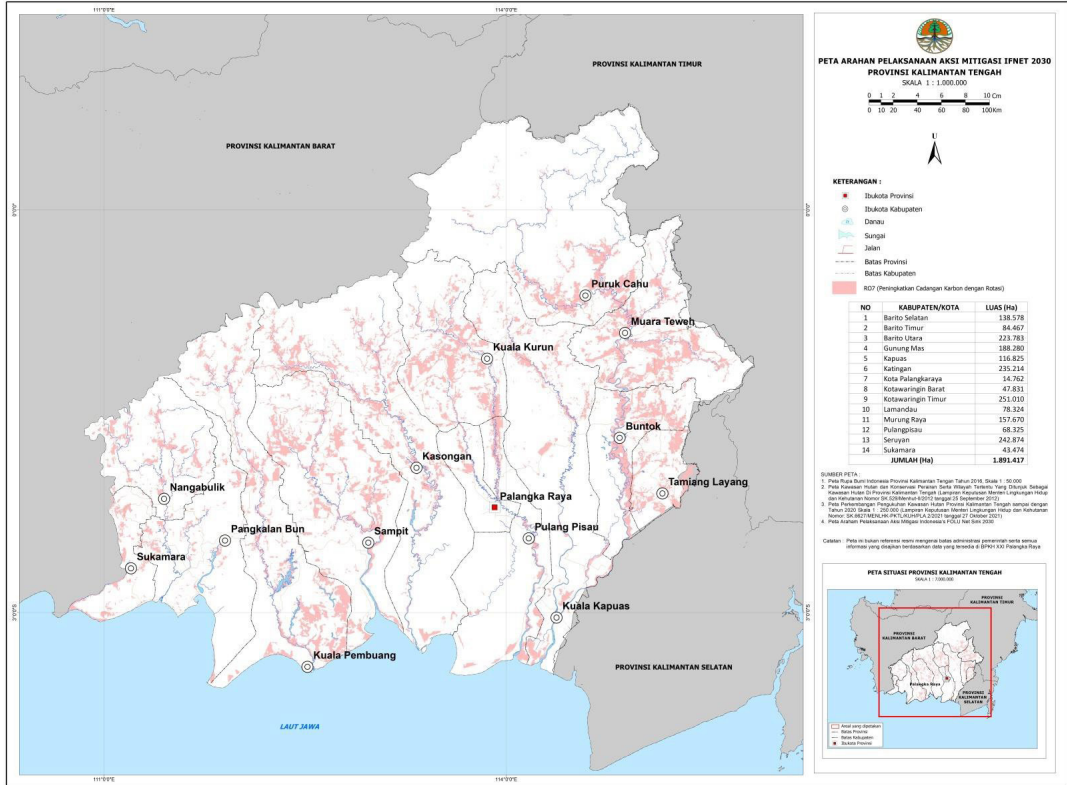
**Lampiran 8 | Peta R04 Provinsi Kalimantan Tengah**


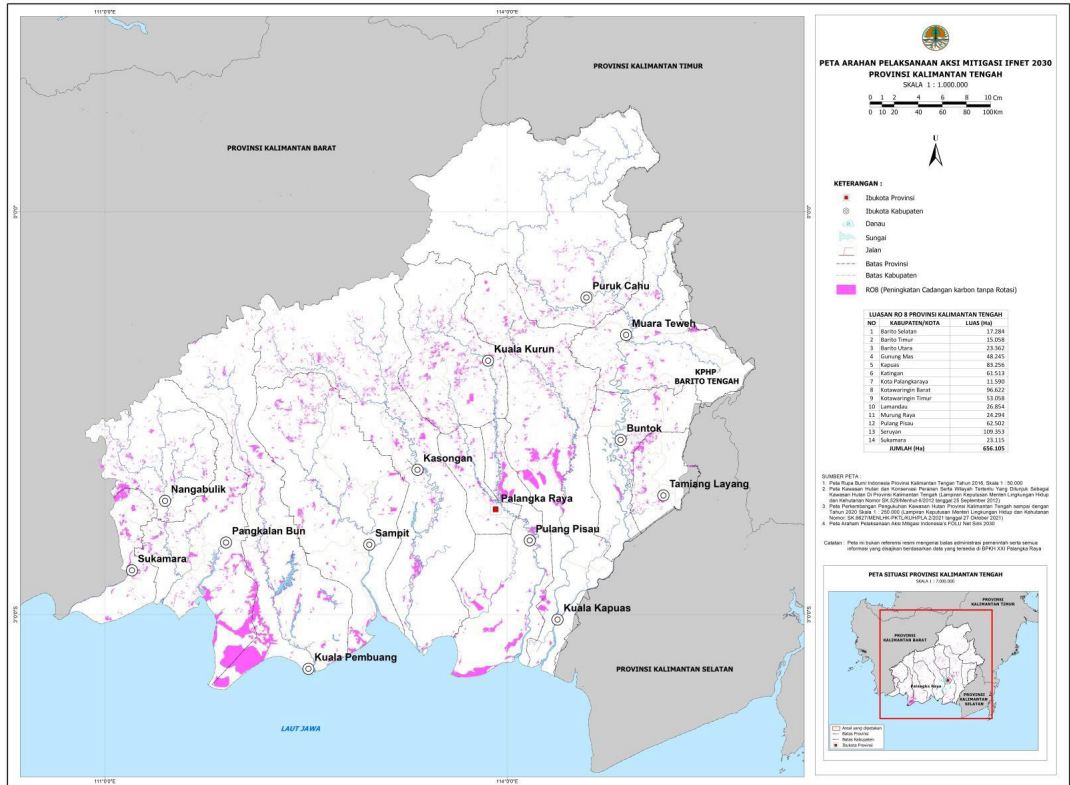
## Lampiran 9 | Peta R05 Provinsi Kalimantan Tengah



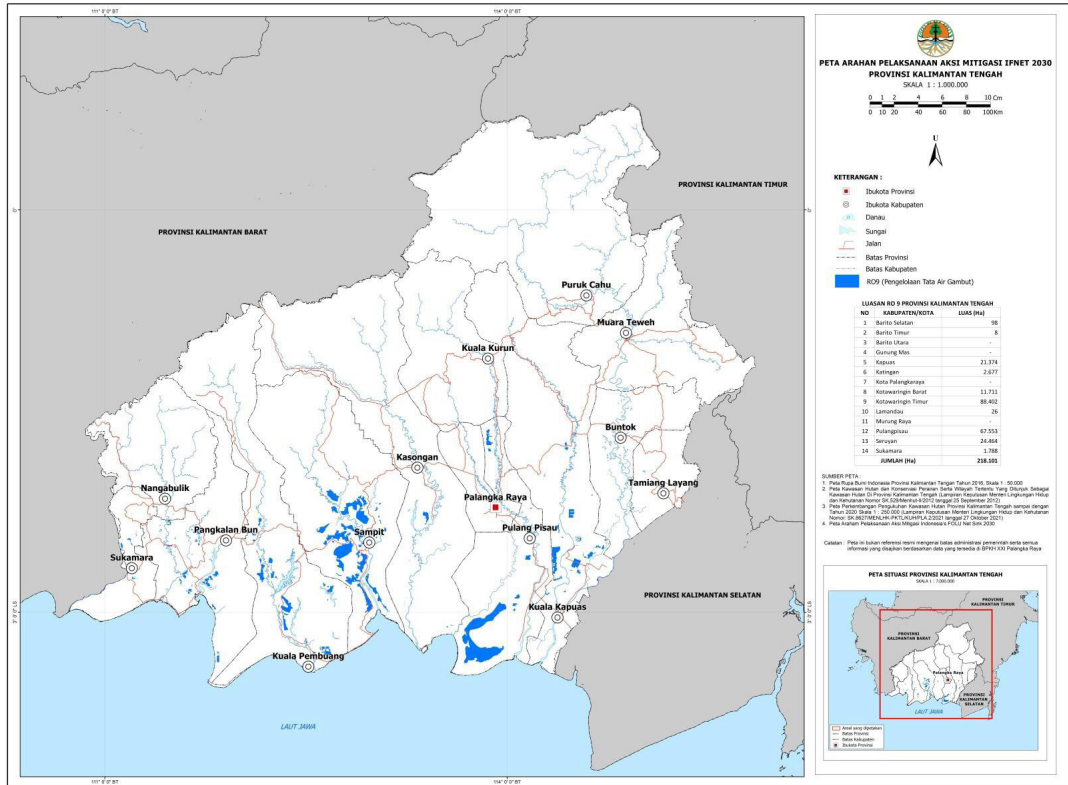
**Lampiran 10 | Peta R06 Provinsi Kalimantan Tengah**


Lampiran 11 | Peta R07 Provinsi Kalimantan Tengah

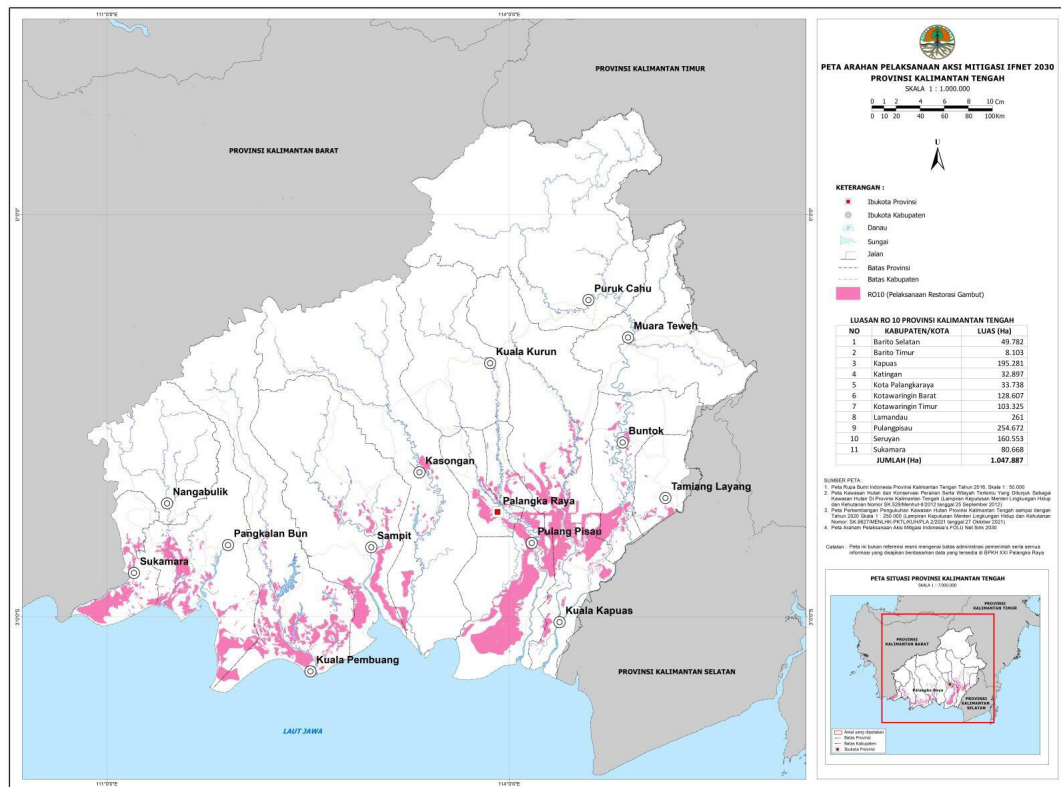


**Lampiran 12 | Peta R08 Provinsi Kalimantan Tengah**


## Lampiran 13 | Peta R09 Provinsi Kalimantan Tengah

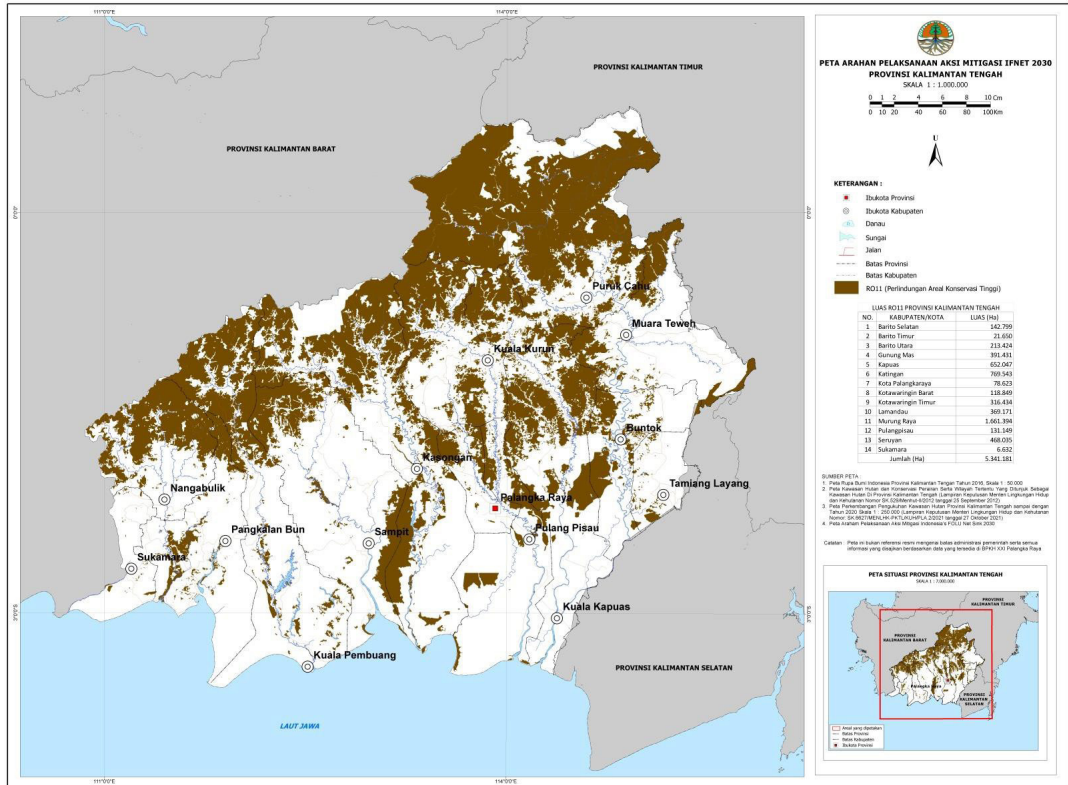


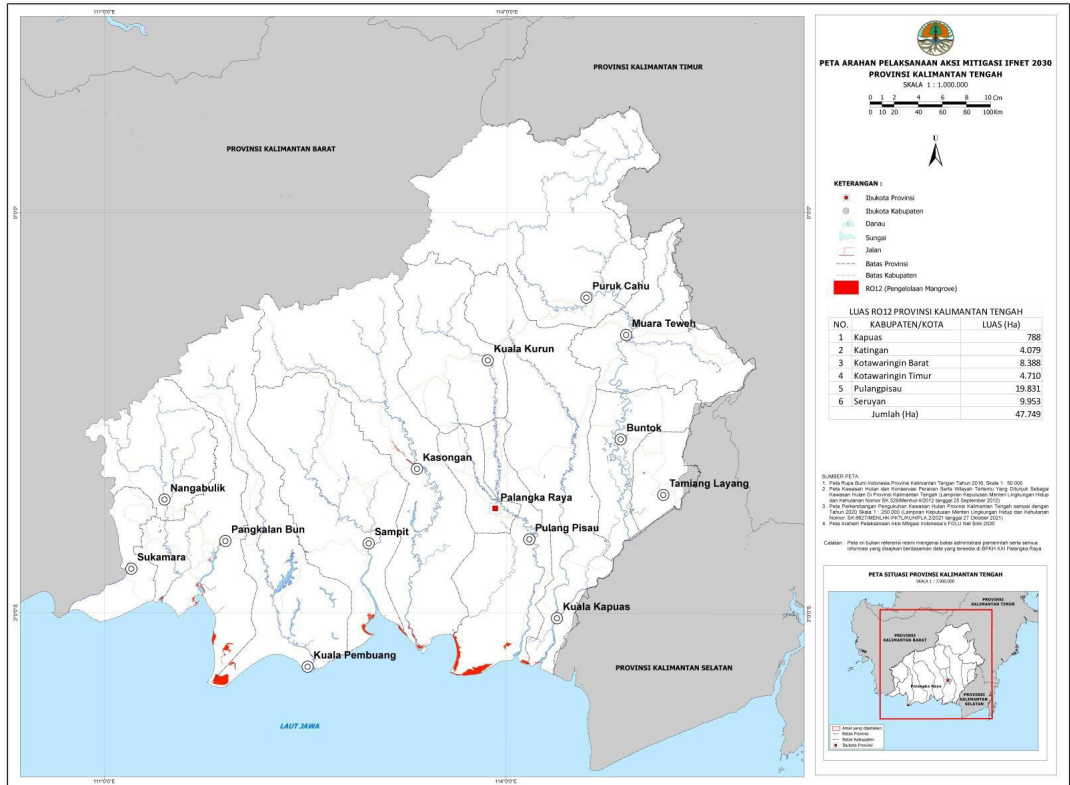




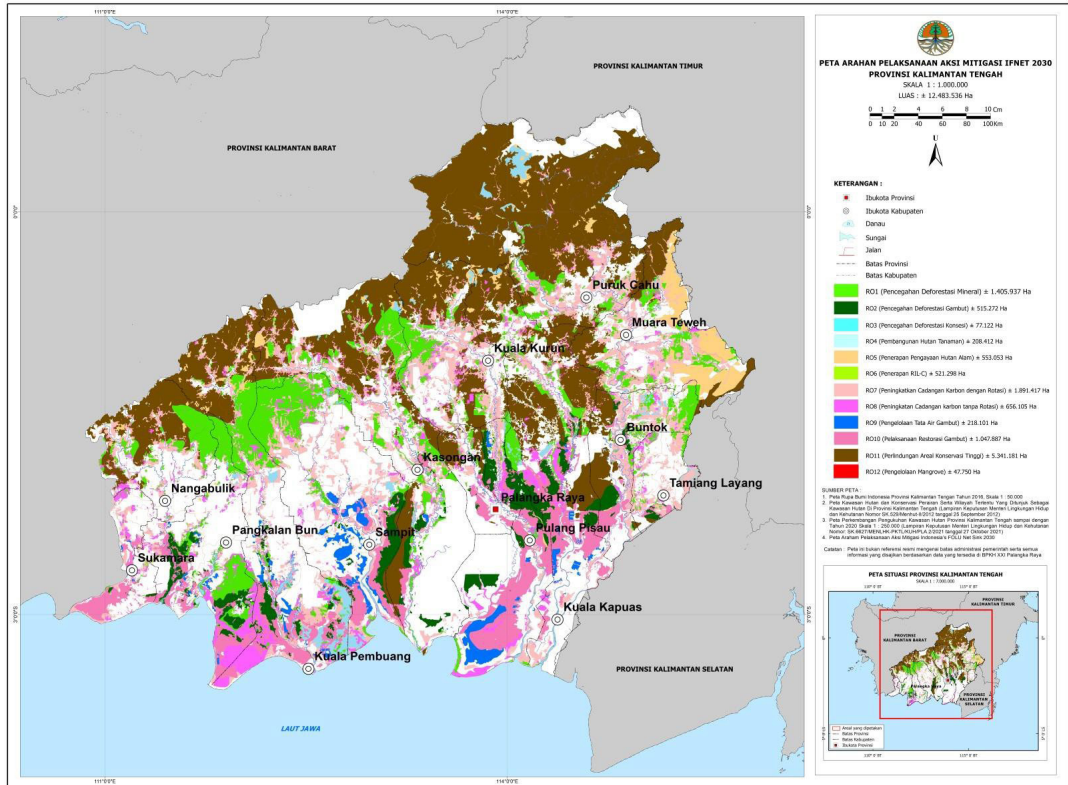


Lampiran 15 | Peta R011 Provinsi Kalimantan Tengah



**Lampiran 16 | Peta R012 Provinsi Kalimantan Tengah**


Lampiran 17 | Peta sebaran R01-R012 Provinsi Kalimantan Tengah





# INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia